Penulis :

KELOMPOK 4 SISPOLINDO JURNALISTIK 4 C

UNGKAP KELOMPOK KEPENTINGAN DALAM SISTEM ' INDONESIA '

Penulis :
KELOMPOK 4 SISPOLINDO JURNALISTIK 4 C

UNGKAP KELOMPOK KEPENTINGAN DALAM SISTEM ' INDONESIA '

"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang."

Ungkap Kelompok Kepentingan Dalam Sistem Indonesia

H. Cecep Suyana
Arfan Muhammad Awali
Muhammad Anasul Huda
Muhammad Lucky Kurnia Aditirta
Muhammad Naufal Ramdhan
Nunung Nailul Inayah
Raisa Azzarine
Rangga Hadiansyah

Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Ungkap Kelompok Kepentingan Dalam Sistem Indonesia

Penulis :
H. Cecep Suyana
Arfan Muhammad Awali
Muhammad Anasul Huda
Muhammad Lucky Kurnia Aditirta
Muhammad Naufal Ramdhan
Nunung Nailul Inayah
Raisa Azzarine
Rangga Hadiansyah

ISBN: 978-623-88132-3-0 (PDF)

Editor:
Asep Iwan Setiawan

Penyunting :
Khoiruddin Muchtar

Desain Sampul dan Tata Letak:
Ridwan Rustandi
Rahmat Ridwan

Penerbit:
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Redaksi:
Gedung Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jl. AH. Nasution No. 105 Cipadung Cibiru Bandung
Telepon : 022-7810788
Fax : 0227810788
E-mail :fdk@uinsgd.ac.id
Website : https://fdk.uinsgd.ac.id/

Cetakan pertama, Juli 2022

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang. Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami. Sehingga kami dapat menyelesaikan makalah tentang Integrasi Dan Konflik Dalam Konteks Indonesia

Adapun tujuan dari penyusunan buku ini ialah untuk memenuhi tugas dari bapak Dr. H. Cecep Suryana, M.Si selaku dosen pada mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Dan tujuan lainnya yaitu agar semakin menambah wawasan keilmuan khususnya bagi penulis dan pembaca pada bidang yg dipelajari.

Kami ucapkan terimakasih kepada bapak Dr. H. Cecep Suryana, M.Si selaku dosen pada mata kuliah Sistem Politik Indonesia yang telah memberikan kami tugas ini. Sehingga kami mendapat tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai bidang yang kami tekuni. Terimakasih kepada bapak Asep Iwan Setiawan yang telah membantu dalam proses percetakan buku kami

Buku ini kami susun dengan semaksimal mungkin dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar peenyusunan buku ini. Untuk itu, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan ini.

Terlepas dari semua itu, Kami menyadari sepenuhnya

bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan kalimat maupun tata bahasanya. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka kami menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar kami dapat menyempurnakan makalah ilmiah ini.

Akhir kata kami berharap semoga makalah yang kami buat tentang Ungkap Kelompok Kepentingan dan Sistem Politik Indonesia ini bermanfaat bagi pembaca.

Bandung, 26 Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

BAB 1 DEFINISI KELOMPOK KEPENTINGAN

A. Pengertian Kelompok Kepentingan

Dalam materi sistem politik Indonesia di dalamnya terdapat sebuah penmbahasan mengenai kelompok kepentingan yang akan dibahas dalam buku ini yang memiliki judul besar " Ungkap Kelompok Kepentingan dan Sistem Politik di Indonesia ". Kata kelompok sendiri sebenernya tidak asing lagi di telinga kita, ssejak sekolah dasar hingga dewasa kita hidup berdampingan dengan sebuah kelompok, bahkan tak jarang kita sendiri yang berada di dalam kelompok tersebut. Dari berbagai macam kelompok pun beragam dan pastinya setiap kelompok mempunyai kepentingan dan tujuannya masing masing. Dalam bab 1 ini kita akan membahas pengertian kelompok kepentingan dari berbagai sumber.

1. Kelompok

1) Pengertian Kelompok

Ada beberapa pengertian kelompok menurut para ahli dan beberapa pengertian kelompok yang berkaitan dengan sosial, diantaranya seperti berikut :

a) Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Tujuan dibentuknya kelompok sosial adalah untuk mewujudkan penerapan nilai-nilai sosial yang ada dan dibutuhkan dalam suatu struktur sosial pada suatu masyarakat. Kelompok sosial merupakan bagian dari realitas sosial yang bersifat universal dan menjadi bagian dari sistem sosial. Pembentukan kelompok sosial terjadi pada para anggota masyarakat yang memiliki latar belakang yang sama serta memiliki kesadaran akan

adanya hubungan yang terjalin di antara mereka. Secara sosiologis, kelompok adalah setiap kumpulan manusia yang memiliki pola interaksi yang terorganisir dan terjadi secara berulang-ulang. Hakikat keberadaan kelompok sosial bukanlah terletak pada dekatnya jarak fisik melainkan pada kesadaran untuk berinteraksi. (wikipedia)

b) menurut beberapa ahli : page and iver (soekarto , 2006) menjelaskan kelompok sebagai hubungan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama , memiliki hubungan timbal balik, dan memiliki kesadaran untuk saling tolong-menolong, sarwono (2009) mendifinisikan kelompok sebagai sekelompok (dua orang atau lebih) yang memiliki persepsi sebagai satu kesatuan serta memiliki perasaan sebagai bagian dari kelompok,memioliki tujuan bersama dan saling ketergantungan satu sama lain.

c) kelompok merupakan tempat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,baik kebutuhan sosiologis,ekonomis maupun kebutuhan psikologisnya. Dengan berkelompok manusia bisa mengembangkan potesnsi,aktualisasi, dan eksistensi dirinya.

2) Proses Pembentukan Kelompok

Layaknya segala sesuatu yang bertumbuh , kelompok pun ada proses pembentukan nya kelompok sosial terbentuk secara alami karena manusia adalah makhuk sosial. Setiap individu memerlukan bantuan individu lainnya guna

memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, tiap individu memiliki minat atau kepentingan yang berbeda-beda, sehingga terbentuklah kelompok dengan minat atau kepentingan yang sama. Naluri untuk selalu bergantung kepada orang lain menjadikan manusia memiliki hasrat untuk menjadi satu dalam masyarakat dan alam. Hasrat ini kemudian membuat manusia hidup secara berkelompok.

Setiap manusia memiliki keadaan atau hasrat untuk hidup bersama, sehingga selalu terbentuk kelompok. Penerimaan dalam kelompok dipengaruhi oleh peran anggotanya, sehingga para anggota kelompok akan mengembangkan potensi dirinya agar dapat memberi manfaat bagi kelompoknya. Perilaku ini kemudian membentuk kebudayaan kelompok yang disebut kelompok sosial. Jika seluruh anggota kelompok memiliki tujuan dalam masa depan bersama maka persatuan dalam kelompok sosial baru akan tercapai. Pembentukan kelompok sosial sepenuhnya terwujud melalui kesatuan manusia yang hidup bersama dan saling bekerja sama disertai dengan hasrat, perasaan dan tujuan yang sama.

3) Ciri – Ciri Kelompok

Setelah mengenal pengertian dan proses pembentukan dari kelompok selanjutnya kita akan mengenal ciri-ciri kelompok. Alam suatu masyarakat terdapat beragam kelompok sosial dengan ciri yang membedakannya dengan kelompok sosial lainnya. Suatu kelompok dapat diketahui sebagai suatu kelompok sosal melalui struktur sosial yang terbentuk sebagai suatu sistem secara utuh. Perbedaan kualitas dan ciri anggota tidak dapat dijadikan sebagai penentu suatu kelompok sosial. Dalam kelompok sosial, setiap anggota harus

patuh terhadap norma sosial yang berlaku guna memenuhi kepentingan kelompoknya. Kelompok sosial dapat terstruktur maupun tidak terstruktur. Strukur pada kelompok sosial dapat terpenuhi jika setiap anggotanya memiliki peranan sosial yang bersifat berubah-ubah tetapi tersusun dengan baik. Selain itu, terbentuknya struktur dalam kelompok sosial dapat terwujud jika nilai sosial dan norma sosial diberlakukan kepada seluruh anggota kelompok.

Kelompok sosial memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan kelas sosial. Ciri-ciri tersebut yaitu:

a) Adanya kesatuan yang nyata dan dapat dikenali dalam kumpulan manusia.
b) Adanya kesadaran pada diri masing-masing anggota terhadap perannya dalam kelompok.
c) Adanya perilaku saling memengaruhi antaranggota kelompok secara timbal balik.
d) Adanya hubungan erat antaranggota untuk mencapai kepentingan bersama.
e) Adanya status sosial tertentu yang mengatur aturan dan perilaku para anggota kelompok.

4) Dampak Kelompok

Segala sesuatu pasti memilki dampah negatif juga positif nya seperti kelompok sosial yang berbeda dapat menimbulkan konflik sosial yang didasarkan pada perbedaan ideologi. Para anggota dari suatu kelompok sosial akan mematuhi segala perintah di dalam kelompoknya, tetapi berusaha menyaingi bahkan mengalahkan kelompok lain yang berbeda paham pemikiran. Hal ini kemudian dapat

menyebabkan terjadinya konflik sosial antarkelompok dengan cara saling mengancam secara wajar dan tidak memperdulikan perundang-undangan yang berlaku. Konflik sosial antarkelompok melibatkan para kelompok sosial yang setingkat. Penyebab konflik terutama adalah adanya situasi dan kondisi baru yang menimbulkan ketidakseimbangan dalam sistem sosial. Sebaliknya, kelompok sosial juga akan menghasilkan integrasi sosial jika ada toleransi antarkelompok.

5) **Alasan Pembentukan Kelompok**

Ada beberapa alesan diantaranya yang harus kita pahami , dari mengapa adanya pembentukan kelompok dan untuk apa, sebagai berikut:

a) kebutuhan Interaksi Sosial ,Kebetuhan dalam interaksi sosial karena manusia ini adalah makhluk sosial yang akan selalu mencari hubungan dengan orang lain.
b) kebutuhan akan keamanan ,Kebutuhan ini memberikan mereka dorongan dan alasan untuk membentuk kelompok,karena menimbulkan rasa aman terhadap sekitarnya.
c) kebutuhan status, Kebutuhan untuk pengakuan atau validasi di lingkungan , menjadi sebuah anggota kelompok.
d) kedekatan tempat kerja, Memberi dan berbagi nilai dibutuhkan dimensi tempat atau ruang yang dapat mendukung adanya interaksi.

2. Kepentingan

1) **Pengertian Kepentingan**

Kepentingan , semua orang mempunyai kepentingan nya masing-masing , begitupun kelompok atau bahkan instansi,

sekolah dan lainya. Yang akan kita pelajari selanjutnya adalah apa pengertian kepentingan yang di ambil dari beberapa sumber seperti berikut :

Menurut kbbi Kepentingan memiliki 3 arti.

a) Kepentingan berasal dari kata dasar penting.
b) Kepentingan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda.
c) Kepentingan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga kepentingan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

2) Kepentingan adalah istilah untuk menyebut kesejahteraan masyarakat umum atau kesejahteraan bersama. Kepentingan umum biasanya dilawankan dengan istilah kepentingan pribadi/perusahaan yang memiliki orientasi yang berbeda.[1] Pengertian kepentingan umum yang dikemukakan oleh Huybers adalah kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan yang memiliki ciri-ciri tertentu, antara lain menyangkut semua sarana umum bagi berjalannya kehidupan yang beradab.

3. Kelompok Kepentingan

1) Pengetian

Kelompok kepentingan merupakan kata yang cukup familiar di dalam dunia politik. Setalah sebelumnya kita bahas tentang kelompok dan kepentingan , selanjutnya kita telaah mengenai pngertian kelompok kepentingan menurut beberapa sumber :

a) Menurut kompas.com Kelompok kepentingan adalah sejumlah orang yang memiliki kesamaan tujuan dalam

mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuannya. Capaian akhir dari kelompok kepentingan adalah untuk memengaruhi keputusan politik dengan meyakinkan pejabat publik agar bertindak sesuai kepentingan kelompoknya. Kekuatan kelompok kepentingan berasal dari status keanggotaan serta sumber daya manusia maupun dana dan jaringan yang dimiliki. Kelompok kepentingan sering menjadi penentu agenda penggalang isu, penyebar gagasan, serta pendesak pemerintah.Meskipun kelompok kepentingan bertujuan mewakili kepentingan-kepentingan anggotanya, tetapi tidak jarang anggota kelompok kepentingan juga memiliki ambisi yang bersifat pribadi. Kelompok kepentingan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah bentuk lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Kelompok kepentingan satu dengan yang lainnya berbeda-beda dalam struktur, sumber pembiayaan, dan basis dukungannya.

b) Wikipedia Kelompok kepentingan atau kelompok advokasi atau kelompok lobi adalah suatu perkumpulan (bisa berbentuk lembaga swadaya masyarakat) yang bertujuan untuk memengaruhi keputusan politik, mencoba untuk meyakinkan para pejabat publik untuk bertindak sesuai dengan suara atau *kepentingan* anggota kelompoknya.[

c) Pengertian kelompok kepentingan secara jelas dipaparkan dalam buku berjudul *Hukum Tata Negara:*

Suatu Pengantar karya Johan Jasin (2016:84) yang menyebutkan bahwa kelompok kepentingan atau kelompok advokasi atau kelompok lobi adalah suatu perkumpulan yang bertujuan untuk memengaruhi keputusan politik, mencoba untuk meyakinkan para pejabat publik untuk bertindak sesuai dengan suara atau kepentingan anggota kelompoknya.Dalam buku tersebut juga tertulis kelompok kepentingan ini dapat berwujud dalam berbagai bentuk, salah satunya dalam bentuk lembaga swadaya masyarakat. Tujuan kelompok kepentingan rupanya cukup beragam. Sebagaimana yang dijelaskan dalam buku berjudul *Buku Ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang disusun oleh Wahono, Abdul Atsar* (2019: 72).Tertulis dalam buku tersebut bahwa kepentingan yang dimiliki oleh suatu kelompok kepentingan dapat berupa kepentingan umum atau bahkan kepentingan bagi kelompok tertentu. Contoh persekutuan yang merupakan kelompok kepentingan di sekitar lingkungan kita antara lain organisasi massa, paguyuban alumni suatu sekolah, kelompok daerah asal, dan paguyuban hobi tertentu.

d) Kelompok atau golongan kepentingan merupakan segolongan orang yang mempunyai misi, kepercayaan, serta tindakan yang sama untuk membangun diri demi melindungi dan mengupayakan kepentingan atau ketentun dari golongan tersebut. Aktivitas dari golongan ini berkaitan dengan yang lebih spesifik melalui aparat

yang mendalami secara lebih intensif dengan upaya yang tidak berlebihan.

Menurut para ahli

a) Menurut David B. Truman, kelompok kepentingan adalah sebuah kelompok pembagi sikap yang akan membuat klaim tertentu kepada instansi pemerintah.
b) Menurut Kay Lawson, kelompok kepentingan adalah sebuah organisasi yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi kegiatan pemerintah. Tujuan ini didasari dengan keyakinan pada orang-orang yang punya posisi di dalam pemerintahan agar bisa bertindak sesuai dengan kepentingan kelompok kepenting tersebut.
c) Gabriel A. Almond berpendapat bahwa kelompok kepentingan adalah semua organisasi yang berusaha buat mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah dengan waktu yang berbeda yang memiliki kehendak untuk bisa memperoleh jabatan politik
d) Ramlan Surbakti, kelompok kepentingan adalah sejumlah orang yang punya kesamaan sifat sikap, kepercayaan atau tujuan yang setuju untuk bersatu demi mencapai tujuan mereka.

B. Tipe Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan merupakan pemeran serta tidak resmi yang memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan di hampir semua negara. kelompok-kelompok kepentingan menjalankan fungsi artikulasi kepentingan, yaitu mereka berfungsi

menyatakan tuntutan-tuntutan dan mmberikan alternatif-alternatif tindakan kepentingan. Selain itu, kelompok ini juga sering memberikan informasi kepada para pejabatpublik dan seringkali informasi yang diberikan bersifat teknis mengenai sifat serta konsekuensi-konsekuensi yang mungkin timbul dari usul-usul kebijakan yang diajukan. Dengan demikian, kelompok kepentingan telah memberikan sumbangan yang berarti bagi rasionalitas pembentukan kebijakan

Kelombok-kelompok kepentingan memiliki keberagaman, Gabriel A. Almond dan Binghm G. Powell dalam buku Comparative Politic today: *A World View* (1992) yang diedit bersama, membagi kelompok kepentingan dalam empat kategori, yaitu: a) kelompok anomi (*anomic groups*), b) kelompok nonasosiasional (*nonassociational groups*), c) kelompok institusional (*institutional groups*), dan d) kelompok asosiasional (*associational gropus*).

1. Kelompok Kepentingan

1) KelompokAnomi

Kelompok-kelompok ini tidak mempunyai organisasi, tetapi-individu-individu yang terlibat merasa mempunyai perasaan frustasi dan ketidak puasan yang sama. Sekalipun tidak terorganisir dengan rapi, dapat saja kelompokkelompok ini secara spontan mengadakan aksi massal jika tiba-tiba timbul frustasi dan kekecewaan mengenai suatu masalah. Ketidakpuasan ini diungkapkan melalui demonstrasi dan pemogokan yang tidak terkontrol, yang kadang berakhir dengan kekerasan. ledakan emosi ini yang serng tanpa rencana yang matang,

dapat saja tiba-tiba muncul, tetapi juga dapat cepat mereda. Akan tetapi keresahan yang tidak cepat teratasi akan dapat memasuki keadaan anomi, yaitu situasi *chaos* dan *lawlessness* yang diakibatkan runtuhnya perangkat nilai dan norma yang sudah menjadi tradisi, tanpa diganti nilai-nilai baru yang dapay diterima secara umum. Contoh : Persatuan pedagang yang akan digusur bersatu saat ingin digusur dengan berdemo dan menghilang saat aspirasi mereka terpenuhi.

2) **Kelompok Nonasosiasional**

kelompok kepentingan ini tumbuh berdasarkan rasa solidaritas pada sanak saudara, kerabat, agama, wilayah, kelompok etinis dan pekerjaan. kelompok-kelompok ini biasanya tidak aktif secara politik dan tidak mempunyai organisasi ketat, walaupun lebih mempunyai ikatan daripada kelompok anomi, anggota-anggotanya merasa mempunyai hubungan batin karena mempunyai hubungan ekonomi, massa konsumen, kelompok etnis, dan kedaerahan. Contoh : Persatuan warga Batak di Jakarta.

3) **Kelompok institutional**

kelompok-kelompok formal yang berada dalam atau bekerja sama secara erat degan pemerintahan seperti birokrasi dan kelompok militer. Contoh : KOPRI, PGRI, TNI, POLRI, dll.

4) **Kelompok asosiasional**

organisasi-organisasi atau kelompok yang dibentuk

dengan suatu tujuan yang eksplisit, mempunyai organisasi yang baik dengan staf yang bekerja penuh waktu. hal ini telah menjadikan mereka lebih efektif daripada kelompok-kelompok lain dalam memperjuangkan tujuannya. Contoh : Ikatan Dokter Indonesia, termasuk serikat perdagangan dan serikat pengusaha.

Anusia adalah makhluk sosial yang secara kodrati tidak dapat hidup tanpa orang lain dan saling memiliki ketergantungan satu sama lainnya. Namun adakalanya, dalam hubungan sosial tersebut memiliki perbedaan-perbedaan sehingga memunculkan adanya jenis kelompok sosial di tengah masyarakat yang diantaranya membawa kepentingan masing-masing.

Secara umum kelompok-kelompok sosial ini muncul karena adanya kedekatan, interaksi, atau kesamaan geografis, maupun kepentingan. Tanpa kita sadari ada banyak bentuk dan jenis kelompok kepentingan sosial disekitar kita. Kira-kira apa saja bentuk dan jenis kelompok kepentingan sosial dimasyarakat yang ada saat ini?

Ada beberapa jenis kelompok kepentingan sosial yaitu klasifikasi menurut Emile Durkeim, klasifikasi menurut Ferdinand Tonnies, Klasifikasi menurut Charles H. Cooley dan Ellsworth Farris, klasifikasi W. G. Sumner, dan klasifikasi menurut Soerjono Soekanto.

2. Klasifikasi

1) Klasifikasi Emile Durkeim

a) Solidaritas mekanik

Ini terjadi dalam kehidupan masyarakat yang ditandai dengan ciri masyarakat sederhana, belum mengenal pembagian kerja, semua anggota kelompok diikat oleh kesadaran kolektif, dan sanksi terhadap pelanggaran bersifat represif atau hukuman pidana.

b) Solidaritas Organik

Ini merupakan sifat ketergantungan antar anggota karena adanya sistem pembagian kerja yang teratur dan keterikatan solidaritas masyarakat yang bersifat kompleks. Sanksi terhadap pelanggaran bersifat restitutif atau membayar ganti rugi kepada yang dirugikan.

2) Klasifikasi Ferdinand Tonnies

a) Gemeinschaft atau paguyuban

Ini adalah hubungan yang dilakukan baik antar individu maupun antar kelompok yang memiliki ikatan kuat, dan mengikat akibat adanya ikatan darah, ideologi maupun kesamaan daerah asal. Ikatan darah atau ikatan kekerabatan adalah ikatan paling kuat karena didasarkan pada ikatan darah yang tidak terputus.

Sementara itu, ikatan berdasarkan tempat atau kesamaan asal adalah ikatan yang bersifat temporer dan dapat menipis ketika telah berada

cukup jauh dan cukup lama dari tempat tinggal asal. Ikatan yang paling lemah dan dapat terputus ketika terjadi perubahan visi adalah ikatan dari ideology atau kesamaan pandangan.

b) Gesellchaft atau patembayan

Ini adalah suatu kelompok sosial yang terbentuk sebagai akibat adanya kepentingan bersama. Umumnya, merupakan ikatan untuk jangka waktu yang pendek, bersifat formal, mekanis, ibarat kerja mesin. Contohnya adalah hubungan dalam dunia instri atau organisasi.

3) Klasifikasi Charles H. Cooley dan Ellsworth Farris

a) Kelompok primer

Ini merupakan hubungan yang terjalin karena keakraban atau interaksi yang bersifat intensif. Kelompok ini ditandai dengan pergaulan, kerjasama dan tatap muka yang intim. Contohnya; keluarga, teman bermain masa kecil dan rukun warga.

b) Kelompok sekunder

Ini merupakan hubungan timbal balik karena adanya kepentingan bersama. Dimana ditandai dengan bersifat formal, tidak pribadi, dan berciri kelembagaan. Contohnya; koperasi dan partai politik.

4) Klasifikasi W. G. Sumner

a) In-Group (kelompok dalam)

Pada umumnya ini didasarkan pada faktor simpati dan selalu mempunyai perasaan dekat dengan anggota-anggota kelompoknya. Kelompok dalam muncul ketika para anggota suatu kelompok merasa bahwa mereka mempunyai suatu tujuan dan cita-cita yang sama, menaati norma-norma yang sama dan nasib yang sama.

b) Out-group (kelompok luar)

Ini merupakan antagonis dan antipasti. Pada umumnya out-group menerapkan sikap etnosentrisme yang menjadi dasar kelompok dalam bersikap atau menilai orang lain.

5) **Klasifikasi Soerjono Soerkanto**

Menurut Soerjono Soerkanto, kelompok kepentingan sosial dapat dibedakan berdasarkan 6 kategori yaitu :

a) Berdasarkan besar kecilnya jumlah anggota

b) Kelompok sosial berdasarkan hal tersebut didalamnya dibagi menjadi 3 bagian yaitu Monad (kelompok kecil yang beranggotan satu orang), Dyad (kelompok kecil yang beranggota dua orang), dan Triad (kelompok kecil yang beranggota tiga orang).

c) Berdasarkan hubungan sosial dan tujuan

Berdasarkan hal ini maka kelompok sosial dibagi kedalam 4 bagian yaitu primer, sekunder, Gemeinschaft (paguyuban), dan Gesellschaft (patembayan).

d) Berdasarkan kepentingan dan wilayah

Dalam hal ini kelompok sosial dibagi menjadi 3, yaitu komunitas, asosiasi, dan kerumunan.

e) Berdasarkan Derajat interaksi sosial

Dalam hal ini kelompok sosial dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu kelompok yang saling mengenal satu sama lain, dan kelompok yang tidak saling mengenal atau memiliki hubungan akrab.

f) Berdasarkan kesadaran terhadap jenis yang sama

Berdasarkan hal ini, kelompok sosial dibagi menjadi 2 bagian, yaitu in group dan out group.

g) Berdasarkan derajat organisasi

Berdasarkan hal ini maka kelompok sosial dibagi menjadi 2 bagian

yaitu kelompok yang terorganisasi, dan kelompok yang tidak terorganisasi.

C. Hakikat Kelompok Kepentingan

Pertama, kelompok kepentingan privat; kelompok kepentingan privat adalah kelompok Kepentingan yang berusaha memperjuangkan kepentingankepentingan anggota-anggota yang Diwakilinya (golongan tertentu) dalam konteks kehidupan umum seperti: pengacara, dokter, Akuntan, dosen, guru, hakim, pengacara, serta golongan professional lain, termasuk juga para Pekerja atau buruh. Juga dalam konteks ini adalah kepentingan produsen atas bidangbidang Usaha tertentu.

Kedua, kelompok kepentingan yang bersifat public; adalah kelompok kepentingan yang lebih Berorientasi mempengaruhi pemerintah agar melakukan tindakan tertentu yang menguntungkan Kepentingan umum secara menyeluruh, ketimbang anggotanya. Contoh dari jenis kelompok Kepentingan ini adalah geraka-gerakan sosial yang mengadvokasi isu-isu lingkungan, pendidikan, Pertambangan, perempuan, ketenagakerjaan, korupsi, kekerasan, perdagangan manusia, konsumen Dan sebagainya

1. **tujuan kepentingan kelompok**
   1) Kelompok kepentingan berbeda dengan partai politik. Demikian juga tujuan dari kelompok kepentingan berbeda dengan tujuan dari partai politik. Jika partai politik bertujuan untuk mendudukkan wakil-wakilnya dalam pemerintahan atau jabatan-jabatan tertentu dalam

pemerintahan, maka tujuan utama dari kelompok kepentingan adalah :

2) mempengaruhi proses pengambilan kebijakan pemerintah agar sesuai dengan keinginan kelompok yang diwakilinya.
3) Selain itu, kelompok kepentingan juga bertujuan untuk :
4) mempresentasikan anggota kelompok dalam mempengaruhi agenda politik.
5) memberikan peluang kepada anggota kelompoknya untuk berpartisipasi dalam proses politik.
6) membantu mendidik individu atau masyarakat yang menjadi anggotanya untuk sadar terhadap isu-isu tertentu yang berkembang di sekitarnya dan mengambil suatu tindakan atas isu-isu tersebut.
7) menjadi pengawas terhadap program-program pemerintah

2. **Strategi yang Digunakan Kelompok Kepentingan dalam Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah**.

Terdapat beberapa cara atau strategi yang biasa digunakan oleh kelompok kepentingan dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Beberapa strategi dimaksud adalah :

1) ***lobbying***, yaitu dengan menjalin komunikasi secara langsung dengan pejabat pemerintah yang terkait.
2) **melalui media massa**, biasnya kelompok kepentingan menggunakan media massa sebagai sarana untuk menarik sentimen dan perhatian umum.

3) ***grass roots pressure***, yaitu dengan menggalang dukungan dari masyarakat lapis bawah untuk menyampaikan isu-isu tertentu

3. Ciri-Ciri Golongan Kepentingan

Golongan kepentingan mempunyai ciri-ciri antara lain yaitu:

1) Kepentingan yang sama diantara mereka yang membuat mereka menyatu untuk berkoalisi membuat sebuah lembaga dengan nama tertentu.
2) Himpunan orang-orang yang tersistematis atas naman satu atau lebih keperluan tertentu yang sangat diperjuangkan
3) Setiap kegiatan yang diselengarakan akan mengatasnamakan masyarakat memandang fungsinya yang yaitu sebagai artikulator kepentingan dalam masyarakat
4) Kegiatan golongan kepentingan tidak dimaksudkan demi memperoleh jabatan publik, namun lebih pada usaha partisipasi politik
5) Setiap kegiatan golongan kepentingan selalu berhubungan dengan rumor publik yang dimaksudkan untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah
6) Terdapatnya bermacam-macam golongan kepentingan yang bergantung pada karakteristik lembaga dari golongan kepentingan.

BAB 2 JENIS-JENIS SIFAT-SIFAT DAN TUJUAN KELOMPOK KEPENTINGAN

Efektifitas suatu sistem politik pada kenyataannya dapat diukur sejauh mana kemampuannya dalam menanggapi tuntutan-tuntutan maupun dukungan yang diterimanya serta merumuskannya dalam bentuk kebijakan ataupunoutput yang tepat. Hasil dari setiap kebijakan merupakan bagian dari proses politik yang mencerminkan beragamnya aspirasi yang muncul yang merupakan konsekwensi dari beragamnya kepentingan masyarakat. Meskipun demikian, dalam sistem politik, tidak semua aspirasi yang muncul dapat disalurkan melalui kekuatan-kekuatan politik formal seperti partai politik yang memiliki fungsi resmi sebagai penyalur aspirasi, tetapi juga kekuatan lain yakni kelompok kepentingan (interest group).Dalam tahap tertentu, keterbatasan partai politik, baik karena sumberdaya material, sumberdaya manusia, orientasi ideologi, kultur, faksionalisme, kepentingan jangka pendek, minat terhadap isu, keterbatasan jaringan, masalah komunikasi, hubungan personil, dan lain-lainmenyebabkan mereka terkadang tidak cukup dapat diharapkan untuk menyampaikan aspirasi dalam masyarakat secara efektif. Keadaaan ini menyebabkan orang lebih menumpukan perhatiannya dalam menyampaikan aspirasi melalui unsur kelompok kepentingan.Dengan demikian, kelompok kepentingan merupakan salah satu kekuatan penting dalam konfigurasi politik yang dalam tahap tertentu dapat mendinamisasikan sistem politik, dalam bentuk lahirnya politik kelompok-kelompok yang menegaskan adanya pluralisme dan kompetisi dalam masyarakat. Bertitik tolak dari penjelasan tersebut, artikel ini akan membincangkan tentang kewujudan kelompok kepentingan, serta pengaruh dan kedudukannya dalam sistem politik. Sejauh ini diskusi-diskusi tentang proses politik lebih banyak

ditumpukan pada partai politik. Padahal dalam kenyataanya seiring dengan membiaknya kehidupan masyarakat dan munculnya sektor-sektor baru dalam kehidupan menyebabkan keberadaan kelompok kepentingan perlu diperhitungkan secara politik.

A. Jenis-jenis Sistem kepentingan politik

Dalam prakteknya ada berbagai macam tipe kelompok kepentingan yang beroperasi dalam masyarakat, yang mana mereka berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah. Sebagai pemain nonpemerintah, mereka dapat berupa: Kelompok professional, persatuan buruh, pedagang, pengusaha, organisasi keagamaan, persatuan pedagang, organisasi-organisasi persatuan mahasiswa, lembaga-lembaga pemikiran, asosiasi cendekiawan atau pakar, asosiasi perusahaan, universitas, organisasi berbasis etnik, daerah, keturunan (wangsa), dan lain-lain. Kekuatan mereka berasal dari status keanggotaan serta sumberdaya manusia maupun dana dan jaringan yang dimiliki. Kelompok-kelompok kepentingan seringkali menjadi penentu agenda, penggalang issu, penyebar gagasan, perumus kebijakan, serta pendesak kepada pemerintah. Meskipun mereka bertujuan mewakili kepentingan-kepentingan anggotanya, dalam artian kepentingan publik yang terbatas, tetapi adakalanya di antara anggota-anggota kelompok kepentingan juga memiliki ambisi-ambisi yang bersifat pribadi. Bahkan ada di antaranya yang secara pribadi berhasil masuk dalam pemerintahan dan bukan atas nama kelompok kepentingannya. Kelompok Kepentingan Hakikatnya terbagi Menjadi 2

1. Kelompok kepentingan privat
2. kelompok kepentingan Publik

Kelompok kepentingan privat adalah kelompok kepentingan yang berusaha memperjuangkan kepentingan-kepentingan anggota-anggota yang diwakilinya (golongan tertentu) dalam konteks kehidupan umum seperti: Pengacara, dokter, akuntan, dosen, guru, hakim, pengacara, serta golongan professional lain, termasuk juga para pekerja atau buruh. Juga dalam konteks ini adalah kepentingan produsen atas bidang-bidang usaha tertentu. Sementara kelompok kepentingan yang bersifat publik adalah kelompok kepentingan yang lebih berorientasi mempengaruhi pemerintah agar melakukan tindakan tertentu yang menguntungkan kepentingan umum secara menyeluruh, ketimbang anggotanya. Contoh dari jenis kelompok kepentingan ini adalah geraka-gerakan sosial yang mengadvokasi isu-isu lingkungan, pendidikan, pertambangan, perempuan, ketenagakerjaan, korupsi, kekerasan, perdagangan manusia, konsumen dan sebagainya.

Almond dan Powell (1980) dalam karya klasiknya membagi kelompok kepentingan menjadi empat jenis, yakni:

1) Pertama, kelompok anomik, yang merupakan kelompok kepentingan yang bersifat spontan, terbatas, muncul seketika. Kelompok kepentingan ini memiliki tingkat kemampuan komunikasi politik yangrendah, dengan ikatan keanggotaan yang longgar, dan hanya dalam rangka untuk menanggapi insiden tertentu. Kelompok ini

lebih merupakanterobosan ke dalam sistem politik berhubungan dengan isu-isu tertentu yang boleh jadi merespon terhadap sikap frustasi tertentu, sehingga melahirkan demonstrasi dan kerusuhan. Namun demikian, setelah aspirasi mereka didengar oleh pemerintah maka kelompok ini akan bubar. Mereka seperti: Ikatan Warga Kampung Pulo yang tergusur; Warga penghuni Kalijodo; Persatuan pedagang rotan di Rawasari, dan sejenisnya.

2) Kedua, kelompok nonassosiasional, yang merupakan kelompok kepentingan yang diorganisasikan secara informal, dengan keanggotaan yang longgar dan aktifitasnya bergantung pada isu-isu spesifik. Jaringan kelompok ini terbatas, tetapi lebih baik ketimbang kelompok pertama di atas. Kelompok nonassosiasional berbeda dengan kelompok anomik dalam hal keanggotaannya, yang biasanya bersifat sama latar belakang atau identitasnya. Kelompok ini mencakup kelompok keturunan, etnik, regional, agama, status, kelas sosial. Contoh kelompok ini adalah: Trah Keluarga Mangkunegaran; Ikatan Warga Yogyakarta di Jakarta, Ikatan Warga Dayak Se-Kalimantan, Ikatan Saudagar Bugis, Alumni ITB, Alumni Pendidikan Lemhannas, Alumni Pondok Pesantren Gontor, kelompok-kelompok arisan keluarga, kantor, kampung, dan lain-lain.

3) Ketiga, kelompok institusional yang merupakan kelompok kepentingan yang melembaga secara formal,

dengan kegiatan rutin, serta jaringan organisasi yang kuat dan keanggotaan yang bersifat resmi. Kelompok ini memiliki fungsi sosial dan politik yang luas, mencakup hampir sebagian besar segi kehidupan (ekonomi, sosial, pendidikan, budaya, seni, hukum, keluarga, lingkungan, dan lain-lain), di samping tujuan-tujuan khusus yang mereka miliki. Contohnya ialah: Organisasi Nahdlatul Ulama (NU); Muhammadiyah; Persatuan Islam (Persis); Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia, dan lain-lain.

4) Keempat, kelompok assosiasional, yaitu kelompok yang memiliki organisasi yang bersifat formal, dan terorganisir secara baik, dengan keanggotaan yang resmi atau bersifat formal pula. Kelompok assosiasional beranggotakan orang-orang yang berasal dari satu profesi yang sama, dengan tujuan spesifik untuk mewakili kepentingan anggotanya atas bidang-bidang tertentu yang menjadi fokusnya. Contohnya adalah: Organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI); Persatuan Insinyur Indonesia (PII); Kamar Dagang dan Industri (IDI), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI); Ikatan Advokat Indonesia (IAI), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan lain-lain.Dari keempat kelompok kepentingan di atas, yang paling efektif dalam menyampaikan pendapat kepada pemerintah serta kemungkinan memperoleh dukungan luas dari masyarakat adalah kelompok institusional dan assosiasional. Sementara pada derajad yang rendah, yang paling tidak efektif adalah kelompok anomik serta

nonassosiasional.

B. Pertumbuhan Dan Perkembangan Kelompok Kepentingan

Kelompok kepentingan sesungguhnya telah lama muncul dalam kehidupan politik moderen dalam berbagai bentuk gerakan maupun organisasi kepentingan. Dalam politik di negara-negara maju seperti di Inggris ditandai dengan munculnya organisasi seperti Masyarakat Abolisi yang menentang perdagangan budak yang dibentuk di tahun 1780-an, yang kemudian diikuti organisasi-organisasi di bidang lain. Di Amerika Serikat gerakan itu ditandai dengan munculnya berbagai asosiasi dalam masyarakat yang bermaksud membela kepentingan-kepentingan kelompok, berhadapan dengan pihak Inggris maupun pertumbuhan pemerintahan Amerika pada masa-masa awal (Cigler and Loomis 2011:8). Perkembangan demokrasi di Amerika Serikat tumbuh subur dan berakar kuat, salah satunya karena didukung oleh munculnya asosiasi-asosiasi masyarakat tersebut. Kondisi ini sepertimana dikemukakan oleh pemikir Perancis Abad 19, Alexis de Tocqueville, ketika mengunjungi negara tersebut dengan menyatakan bahwa, asosiasi-asosiasi telah menjadi bagian inheren dalam budaya politik Amerika Serikat dan menjadi sumbu bagi tegaknya kehidupan demokratis, yang tidak ditemukan pada masyarakat manapun ketika itu (Tocqueville 1994:167).Dalam banyak hal kelahiran kelompok kepentingan hampir mirip dengan partai-partai politik. Hanya saja partai politik lebih diorientasikan pada upaya untuk memenangkan suara pemilih dan menduduki jabatan-jabatan

dalam kekuasaan. Di Indonesia, beberapa kelompok kepentingan telah lahir mendahului partai-partai politik. Mereka bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan, ekonomi, kebudayaan, pendidikan. Sebagian di antaranya malah menjadi cikal bakal partai politik. Beberapa kelompokkepentingan yang awal di Indonesia muncul pada era kolonial seperti: Sarikat Dagang Islam (SDI), Al-Irsyad, Muhammadiyah, Serikat-Serikat Buruh, pekerja kereta api, Taman Siswa, Organisasi Koperasi, Nahdlatul Ulama dan lain-lain, menjadi pelopor awal dalam munculnya politik kelompok. Organisasi-organisasi tersebut sebagian bertransformasi menjadi besar dan mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah. Pada abad ke 20, terutama pasca Perang Dunia Kedua, di era tahun 1950-an dan 1960-an di negara-negara Barat kelompok kepentingan tumbuh menjamur seiring dengan perluasan peran pemerintah ke segala bidang kehidupan. Perluasan birokrasi dan fungsi-fungsi pemerintahan, baik lokal maupun nasional, dalam rangka memenuhi tuntutan pembangunan telah melahirkan tanggapan dari kelompok-kelompok dalam masyarakat, yang merasa perlu terlibat dalam isu-isu tertentu. Hal tersebut juga seiring dengan semakin meratanya tingkat pendidikan dan kesadaran politik, serta meningkatnya keterampilan-keterampilan organisasional. Gejala ini menunjukkan bahwa, semakin banyaknya area di mana pemerintah menjadi terlibat, maka semakin banyak pula kepentingan-kepentingan khusus yang berkembang untuk mempengaruhi kebijakan (Loomis 2011:181-182). Selain itu, kemunculan kelompok kepentingan juga dipicu oleh mencuatnya

isu-isu baru yang menjadi keprihatinan umum, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun global. Bahkan belakangan banyak kelompok kepentingan yang memperjuangkan isu-isu tunggal yang spesifik. Hal tersebut mulai dari masalah kekekerasan anak, perdagangan bebas, kesetaraan perempuan, lingkungan, perdagangan manusia, hak asasi manusia, hutang luar negeri, masalah energi, sumberdaya air, komunitas adat, iklim dan cuaca, hak konsumen, perlindungan binatang, pendidikan kaum marginal, ekonomi mikro, transgender, dan sebagainya. Gerakan ini, untuk sebagian, merupakan bagian dari gerakan sosial baru yang terus memperoleh tempat dalam masyarakat moderen. Sementara pada sektor-sektor tertentu, lahirnya kelompok kepentingan berwujud perjuangan kelompok-kelompok asosiasi profesi, perdagangan, subsektor kehidupan konsumen, kelompok-kelompok dalam birokrasi, kaukus dalam parlemen, aliansi para politisi dalam legislatif maupun eksekutif dan juga yudikatif yang memperjuangkan kepentingan kelompok melalui usulan-usulan, petisi-petisi, dan loby-loby tertentu yang disampaikan.Belakangan setelah reformasi tahun 1998 di Indonesia, gelombang kelahiran kelompok-kelompok kepentingan baru merebak secara nasional. Suasana politik yang demokratis yang ditandai denganledakan partisipasi mengakibatkan sebagian anggota masyarakat menyampaikan tuntutan-tuntutannya dengan menggunakan saluran-saluran baru di luar partai-partai politik, dalam bentuk kelompok-kelompok kepentingan (Horowitz 2014). Selama kurang lebih 17 tahun terakhir ini diperkirakan tidak kurang 2500 an kelompok

kepentingan lahir di seluruh tanah air, yang merangkumi berbagai aspek kehidupan, mulai dari bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, pendidikan, keagamaan adat, etnik, pers, dan lain-lain, dari tingkat lokal sampai nasional.Jaminan kebebasan yang luas serta adanya kompetisi kuat diantara kelompok-kelompok serupa menambah semakin serunya persaingan kepentingan. Kedudukan kelompok-kelompok ini turut mempengaruhi konfigurasi politik serta ikut mendinamisasikan proses pengambilan keputusan pemerintah. Meskipun demikian, hanya sebagian saja di antara kelompok-kelompok kepentingan tersebut yang mampu mewarnai atau mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik, khususnya di tingkat nasional. Sementara sebagian kecil kelompok kepentingan yang lain dibentuk lebih merupakan tanggapan terhadap isu-isu sesaat yang muncul, ataupun ada karena kepentingan partai politik. Kelompok-kelompok ini bahkan untuk sebagiannya justru malah muncul sebagai kelompok penekan.Dalam kaitan ini, penulis tidak memasukkan kelompok-kelompok seperti: Organisasi-organisasi teroris, Organisasi Papua Merdeka, Gerakan Aceh Merdeka dan sejenisnya, karena organisasi-organisasi tersebut tujuannya bukan mempengaruhi kebijakan pemerintah tetapi untukmenjatuhkan pemerintah secara inkonstitusional. Dengan kata lain, mereka berusaha merestrukturisasi sistem politik dan bukan sekadar mempengaruhinya.

C. Tujuan dan cara mempengaruhi Pemerintah

Dalam politik di Indonesia kita bisa mencatat setidaknya

ada beberapa tujuan dari kelompok kepentingan. Pertama,adalah kelompok kepentingan merepresentasikan konstituen mereka dalam mempengaruhi agenda politik. Di mana melalui loby-loby yang dilakukan diharapkan berdampak pada tujuan yang ingin mereka capai. Kedua, kelompok kepentingan memberikan peluang bagi anggotanya untuk berpartisipasi dalam proses politik. Minimal menyangkut satu isu tertentu, anggota-anggotanya dapat terlibat dalam mempengaruhi pejabat pemerintah.

Ketiga, membantu mendidik individu atau masyarakat yang menjadi anggotanya untuk sadar terhadap isu-isu tertentu, sehingga memiliki sikap yang sama dengan anggota yang lain. Keempat, membantu individu untuk mengambil tindakan terhadap isu-isu tertentu, sehingga dapat menjadi perhatian umum. Kelima,kelompok kepentingan dapat menjadi evaluator ataupun pengawas terhadap program-program pemerintah. Mereka bisa menilai kekurangan-kekurangan program pemerintah, serta memberikan masukan-masukan. Syukur-syukur masukan yang disampaikan menjadi agenda legislatif ataupun agensi-agensi pemerintah yang lain untuk meningkatkan mutu pelayanannya.Dalam menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah, kelompok kepentingan biasanya menempuh dua langkah (Jordan and Malanoey 2007:39-40). Pertama,mereka menyampaikan isu-isu yang sudah diartikulasikan sedemikian rupa untuk "dibeli" partai-partai politik. Langkah ini biasanya

ditempuh jika sistem politik yang ada berjalan secara demokratis dan terbuka, di mana partai-partai politik bersaing secara sehat dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik lebih tinggi ketimbang kelompok kepentingan. Selain itu, mekanisme cheks and balances di antara lembaga-lembaga politik juga berjalan baik. Dalam suasana seperti ini, kelompok kepentingan akan dapat maksimal melakukan pendekatan dengan partai politik dan melakukan proses tawar menawar untuk memperjuangkan kepentingannya.

Kedua, kelompok kepentingan langsung menyampaikan aspirasi yang sudah diartikulasikan kepada pemerintah. Proses ini biasanya didahului oleh adanya perdebatan ataupun polemik yang luas dalam masyarakat, khususnya melalui media massa. Terkadang sejumlah anggota kelompok kepentingan sengaja "meledakkan" satu isu tertentu ke media massa agar menjadi perhatian umum, sehingga pemerintah turut mengambil perhatian. Mekanisme ini ditempuh jika sistem politik tidak berlangsung secara terbuka dan partai-partai politik tidak bisa menjalankan fungsi-fungsinya secara maksimal. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik juga rendah. Bagi kelompok kepentingan akan sia-sia saja atau tidak efektif jika menyampaikan aspirasinya melalui partai politik. Karena itu, usaha pendekatan langsung terhadap pejabat-pejabat pemerintah dirasa lebih efektif dan bermakna.

Adapun cara atau strategi yang dipakai untuk mempengaruhi pemerintah adalah.

1) Pertama, melakukan lobbying menjalin komunikasi

langsung dengan para pejabat pemerintah yang terkait, atas isu yang diperjuangkan. Wise Cummings mendefinisikan lobby sebagai, communication with legislator or other government officials to try to influence their decision (Cummings 192:217). Berdasarkan definisi tersebut lobby bukan semata-mata ditujukan terhadap pejabat-pejabat legislatif saja tetapi juga cabang cabang Pemerintahan yang lain Kelompok-kelompok kepentingan, khususnya yang kuat, tidak jarang memiliki peloby-peloby khusus atau menyewa (membayar) seorang peloby professional yang memiliki kemampuan khusus di bidang tersebut. Aktifitas lobby memerlukan keterampilan khusus dan jaringan pergaulan luas. Bidang ini lebih merupakan satu seni daripada ilmu. Profesi peloby di sejumlah negara maju telah menjadi bagian dari pekerjaan resmi yang setara dengan profesi moderen yang lain.

2) Kedua, melalui media massa. Kelompok kepentingan biasanya menggunakan media massa sebagai sarana untuk menarik sentimen serta perhatian umum, sehingga pemerintah mengambil kebijakan atas isu tertentu sesuai yang diinginkan. Pesan-pesan yang disampaikan melalui media diharapkan segera mendapat respon yang memadai dari pemerintah. Namun melalui cara ini tidak ada kontak langsung dengan pejabat pemerintah.
3) Ketiga, grass-roots pressure, di mana kelompok kepentingan menggalang dukungan masyarakat lapis

bawah untuk menyampaikan isu-isu tertentu. Misalnya melalui rapat akbar, pawai massal, demonstrasi, aksi teatrikal di tempat-tempat umum ataupun gedung pemerintah. Melalui cara ini memang ada kontak langsung dengan pejabat pemerintah, tetapi terbatas, dan mungkin saja manipulatif dan situasional.

Adakalanya kelompok kepentingan menggunakan ketiga cara di atas secara serentak dalam mempengaruhi pemerintah. Hal itu dilakukan sebagai cara yang mungkin dipandang efektif menyangkut isu-isu tertentu, terutama sekali kelompok-kelompok kepentingan dengan sumberdaya yang memadai, baik materiil maupun nonmaterial. Namun demikian, keberhasilan kelompok kepentingan dalam mempengaruhi agenda pemerintah memiliki kadar yang berbeda-beda antara satu sistem politik dengan sistem politik yang lain, dari satu negara dengan negara lain, dari satu waktu ke waktu yang lain. Oleh karena itu, ada beberapa aspek yang turut menentukan pengaruh kelompok kepentingan, yakni: Aspek kebudayaan politik, struktur kelembagaan, watak dan sistem partai, watak dan gaya dalam kebijakan publik (Janda, Berry & Goldman 1997:73).

Jika dalam suatu masyarakat kedudukan kelompok kepentingan dipandang absah dan positif, maka keterlibatan individu-individu untuk bergabung di dalamnya akan didorong, dan proses politik yang melibatkan kelompok kepentingan dipandang sebagai wajar. Sementara struktur kelembagaan mengandaikan bahwa jika struktur kekuasaan suatu negara terdistribusikan secara beragam atau plural di antara kelompok-kelompok, maka itu

akan memberikan tempat yang positif bagi kelompok kepentingan. Dengan kata lain, pemerintahan yang terbagi-bagi, di mana tidak ada satupun kelompok yang bisa mendominasi akan lebih kondusif bagi tumbuhnya kelompok-kelompok kepentingan.

Sedangkan tatanan kelembagaan yang tersentralisasi justru merusak keberadaan kelompok kepentingan. Pada aspek sistem politik, jika suatu sistem politik berwatak demokratis maka akan mudah bagi kelompok-kelompok kepentingan untuk eksis. Adanya sistem politik dengan corak kepartaian dominan atau hegemonik akan secara alami cenderung mempersempit ruang kelompok kelompok kepentingan. Begitu juga sebaliknya, jika suatu sistem politik itu nondemokratis maka agak sukar bagi kelompok-kelompok kepentingan mengorganisir secara sukarela, tanpa dikooptasi oleh pemerintah. Rezim-rezim otoriter terbiasa untuk melakukan kooptasi dalam rangka memenangkan dukungan sebagai cara untuk menjinakkan masyarakat sejak awal.

Watak dan gaya pengambilan kebijakan publik bermakna bahwa dalam derajat tertentu sikap intervensionis suatu pemerintah akan memberikan pengaruh pada pelibatan kelompok-kelompok kepentingan dalam perumusan kebijakan publik. Di sejumlah negara-negara Eropa Barat, terutama Skandinavia, sikap intervensionis pemerintah menjadikan kelompok-kelompok kepentingan secara kelembagaan memiliki kedekatan dengan unit-unit dalam pemerintahan secara ajeg. Sementara di sebagian negara-negara yang lain yang gaya pengambilan kebijakan rejim

lebih otonom dan kebal terhadap pengaruh lingkungan politik, pelibatan kelompok kepentingan dalam pembuatan kebijakan publik cenderung kurang. Pemerintah agak berjarak dengan kelompok kepentingan.

Selain itu, secara internal efektifitas kelompok kepentingan dalam mempengaruhi pemerintah juga ditentukan oleh; Kemampuan dalam mengerahkan dukungan, tenaga, dan sumberdaya anggota; juga luasnya sumberdaya yang dimiliki, seperti kemampuan finansial, jumlah anggota, kecakapan politik, kesatuan organisasi, prestise di mata masyarakat dan para pembuat keputusan pemerintahan (Almond 2000:60).

D. Kedudukannya Dalam Sistem Politik

Kedudukan kelompok kepentingan dalam sistem politik adalah terletak di antara pemerintah dengan masyarakat. Posisinya berada di tengah sebagai jembatan yang menghubungkan antara kepentingan-kepentingan masyarakat dan pemerintah.

Karena kedudukan yang seperti itu, maka kelompok kepentingan menempati posisi yang stategis sebagai penghimpun, penyalur, sekaligus perumus aspirasi. Dalam konteks sistem politik, keberadaan kelompok kepentingan ini telah melahirkan perdebatan, baik dari kubu pluralis maupun elitis. Kalangan pluralis memandang bahwa intipati dari demokrasi adalah penyebaran kekuasaan di tangan kelompok-kelompok sehingga tidak ada satupun kekuatan yang mendominasi. Setiap individu

pada kenyatannya berpotensi untuk mengorganisir diri serta memiliki akses yang sama ke dalam pemerintahan. Penyelenggaraan kekuasaan akan mengalami distorsi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, jika tanpa ada keseimbangan dinamis dari unsur-unsur dalam masyarakat. Adanya kelompok kepentingan merupakan sesuatu yang baik dalam sistem politik (Hays 2011:117-118).

Kehadiran kelompok-kelompok justru diperlukan untuk berbicara, berdebat, sekaligus didengar dan dikritik. Dengan kata lain, di mata kaum pluralis demokrasi adalah persaingan di mana masing-masing kelompok secara bebas dan setara memajukan kepentingan-kepentingannya, serta saling mempengaruhi satu sama lain. Model yang paling dekat dengan ide tersebut adalah demokrasi kelompok dalam bentuk wujudnya kelompok-kelompok kepentingan. Hadirnya kelompok kepentingan justru akan memperkuat kekuatan setiap kelompok untuk saling mengimbangi. Dalam perspektif ini, kehadiran politik kelompok dipandang positif, dan diperlukan sebagai alternatif, dari model demokrasi pemilihan yang bersifat konvensional, yang dimonopoli partai-partai politik. Aspirasi-aspirasi konstituen seringkali terlempar begitu pemilihan umum usai, dikalahkan oleh agenda lain yang lebih menarik. Pemilihan umum dan partai saja tidak menjamin keseimbangan negara-negara demokratis. Adanya kelompok aktif berbagai jenis dan ukuran, sangat penting agar bisa mempertahankan proses demokrasi dan agar para warga negara dapat memajukan tujuan-tujuan mereka. Pandangan-pandangan pluralis antara lain bersumber dari pemikiran tokoh-

tokoh seperti, James Madison, salah satu bapak pendiri Amerika, dan juga teoritisi politik moderen Robert Dahl.

Kaum pluralis memandang bahwa, kekuasan politik sepatutnya tidaklah melulu di tangan elektorat ataupun kelompok elit tetapi disebar ke segenap masyarakat. Selain itu, perspektif pluralis meyakini bahwa kelompok kepentingan merupakan representasi sejati demokrasi. Karena di situlah orang dengan bebas berorganisasi, berkomunikasi, dan menggalang kekuatan sendiri secara teratur. Sementara aktifitas pemilu terkadang tidak cukup bagi masyarakat untuk mengkomunikasikan dan menyampaikan pesannya secara utuh dalam masa yang cukup. Adanya kepentingan kompetitif yang berbeda-beda adalah landasan bagi keseimbangan demokrasi serta perkembangan positif bagi kebijakan publik (Hays 2011:121).

Sementara kalangan perspektif elit memandang kehadiran kelompok kepentingan dari sudut pandang yang berbeda. Meskipun perspektif ini menyetujui sebagian argumen-argumen pluralis, namun tidak setuju dalam beberapa aspek yang lain. Kalangan elitismelihat bahwa dimensi kekuasaan di manapun akan melahirkan kekuatan kecil tertentu sebagai kelompok penentu/pengaruh. Pandangan ini untuk sebagian bersumber dari teori Hukum Besi Oligarki Michels. Di berbagai bidang, mereka tidak akan segan-segan mengkonsolidasikan diri, bersatu untuk menancapkan pengaruh/dominasinya. Kekuatan mereka bersifat solid, homogen, monolitik, terarah, distribusi kekuasaan berlangsung dari atas ke bawah, di mana kelompok kecil ini

menjadi pengendali.

Perspektif elitis berargumen bahwa, aktifitas kelompok kepentingan membutuhkan sumberdaya material dan finansial yang tidak sedikit. Sekecil apapun, suatu kelompok kepentingan pasti memerlukan basis finansial yang kuat, agar dapat bertahan. Sumberdaya finansial itu secara alami hanyalah dimiliki oleh sekelompok kecil anggota atau pengurusnya. Mereka tidak mungkin memberikannya secara gratis tanpa tendensi apapun. Karena itu, lahirnya kelompok kepentingan dalam banyak aspek lebih mewakili kepentingan segelintir orang itu, terutama pengurusnya ataupun anggota-anggota utamanya yang sanggup membayar iuran. Lagi pula kesadaran untuk berhimpun atau aktif dalam satu organisasi dalam taraf tertentu hanyalah dimiliki oleh orang-orang yang memiliki komitmen sadar dan punya uang serta waktu luang (Loomis 2011:184).Sementara bagi kebanyakan orang miskin tidak mungkin mereka membentuk kelompok kepentingan yang kuat, mengingat sumberdayanya yang terbatas. Lahirnya kelompok-kelompok kepentingan privat, ataupun assosiasional dalam istilah Almond dan Powell, menjadi petunjuk kuat bahwa orang-orang yang punya uang ini sajalah yang bisa menyampaikan aspirasinya ke pemerintah melalui pembentukan-pembentukan kelompok. Bagi kaum elitis, kelompok kepentingan lebih mencerminkan bias kepentingan kelompok, khususnya golongan atas, serta merupakan cacat bagi demokrasi.

Dalam pandangan perspektif ini, organisasi dan institusi dapat menjalani “hidup mereka sendiri” yang dapat membuat mereka menyimpang, --seperti diramalkan Weber,-- dari keinginan dan kepentingan anggota mereka. Ada kecenderungan oligarki, di mana struktur birokrasi dapat mengeras dan para pemimpin menjadi elite-elite yang tidak tanggap pada sektor swasta atau negeri. Akibatnya, kebijakan publik bisa condong ke arah kelompok kepentingan tertentu yang memiliki organisasi terbaik dan sumberdaya terbanyak, bisa condong ke arah agensi-agensi negara yang secara politik kuat, dan bisa dibelokkan oleh persaingan yang sengit antar sektor-sektor berbeda dari pemerintahan itu sendiri (Hays 2011:122). Pengambilan keputusan sebagai sebuah proses akan selalu mendapat pengaruh dan desakan dari berbagai faktor, termasuk persaingan politik yang keras, strategi pemilihan umum, sumberdaya yang langka, serta pengetahuan dan kompetensi yang kurang. Adanya banyak pusat kekuasaan tidak menjamin bahwa pemerintah akan: (1) mendengarkan mereka semua dengan setara; (2) melakukan apapun selain berkomunikasi dengan pemimpin pusat-pusat itu, (3) mudah terkena pengaruh siapapun selain mereka yang berada di posisi-posisi yang kuat, (4) melakukan apapun tentang isu-isu yang sedang dibahas (Lively 2005::20-24, 54-56).

Meskipun terdapat sejumlah besar kelompok kepentingan yang mengklaim berjuang untuk masyarakat, namun dalam kenyataannya, ideologi dan orientasi yang diusungya, sedikit banyak mengandung bias kepentingan. Karena itu bagi perpektif

ini, orang miskin atau massa tidak mungkin secara instrumental mengorganisir diri dengan keterbatasan sumberdaya. Alih-alih kelompok kepentingan berfungsi sebagai wadah penyalur aspirasi, ianya justru lebih merupakan alat kepentingan kelompok-kelompok atau sub-sub kelompok atas dalam masyarakat untuk terus
Mendominasi

BAB 3 PENGANTAR SISTEM POLITIK INDONESIA

A. Pengertian Sistem Politik

Jika ditinjau dari segi pengertian, Sistem Politik Indonesia terdiri dari tiga kata yang mempunyai makna tersendiri. Oleh karena itu, untuk mengetahui dengan benar mengenai pengertian dari Sistem Politik Indonesia, alangkah baiknya dengan memahami terlebih dahulu makna dari suku katanya. Dengan begitu, akan memudahkan untuk bisa lebih paham terkait segala hal yang berkaitan dengan Sistem Politik Indonesia.

Jika ditinjau dari segi etimologi, Sistem Politik Indonesia disusun oleh tiga kata yang terdiri dari Sistem, Politik dan Indonesia. Pertama, kita harus memahami terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud oleh sistem. Kata *Sistem* berasal dari bahasa Yunani yakni *Systema*. menurut Shrode dan Voich dalam bukunya yang berjudul *Organization and Management:Basic System Concepts* menjelaskan bahwa Sistem adalah keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian. [1]

Menurut Arif Rahman, mengungkapkan dalam Webster New Collegiate Dictionary bahwa Bahwa pengertian sistem adalah suatu kumpulan pendapat pendapat, (collection of opinions), prinsip prinsip (principles), dan lain lain yang membentuk suatu kesatuan yang berhubung hubungan satu sama lain.

Sedangkan menurut Ellias. M. Awad (1979;4) dijelaskan

[1] Shrode, William, A., dan Dan Voich, J., 1974, Organization and Management:Basic System Concepts, Irwin Book Co., Kuala Lumpur.

bahwa Sistem adalah sehimpunan komponen atau sistem yang terorganisasikan dan berkaitan dengan suatu rencana untuk mencapai suatu tujuan tertentu.[2] Dalam hal ini dapat disederhanakan bahwa sistem adalah sekumpulan komponen yang terorganisasikan.

Lalu, menurut Johnson, Kast, dan Rosenzweigh yang dialih bahasakan oleh Pemudji, 1980;4 mengemukakan bahwa sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir; suatu himpunan, perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan komplek atau utuh.[3]

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Systema* atau yang sering kita sebut sebagai sistem adalah sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur, integral, dan merupakan satu kesatuan atau keseluruhan terorganisir. Seiring berjalannya waktu, tentunya istilah tersebut mengalami berbagai perkembangan yang membuatnya mempunya banyak arti atau makna lain. Hal ini tergantung dari kelanjutan dari istilah atau objek yang dikaitkannya. Akan tetapi hal tersebut tidak akan merubah unsur yang berada di dalamnya baik dalam hubungan struktural dan karakteristiknya.

Pada prinsipnya sistem memiliki 4 elemen yang menjadi penunjang, yakni

1. Objek

---

[2] Awad, Elias M,(1979), System Analysis and. D_e_slgn ,Ricard D. Irwin Homewood, Illinois.
[3] S. Pamudji, 1980, Pembinaan Perkotaan di Indonesia, Ikhtiar, Jakarta

Elemen pertama yang menjadi elemen dari sistem ialah objek. Dalam hal ini objek merupakan bagian dari elemen atau variabel yang bisa berbentuk benda fisik, abstrak, ataupun keduanya sekaligus, tergantung kepada siapa sistem tersebut bersifat. Jika ke politik, maka objek dari sistem politik ialah masyarakat yang menjadi objek dari pemerintahan selaku pelaksana sistem politik.

2. Atribut

   Dalam hal ini atribut menjadi pelengkap yang akan menentukan baik atau tidaknya kualitas atau sifat kepemilikan dari sistem dan objek.

3. Hubungan internal,

   Hubungan internal menjadi elemen atau bagian dari elemen dikarenakan didalamnya terdapat hubungan dan interaksi antar objek-objek dalam sistem.

4. Lingkungan

   Terakhir, ada lingkungan yang menjadi bagian dari elemen yang menjadi wadah atau tempat dari sistem itu berada.

Selain itu, elemen yang membentuk sebuah sistem itu sendiri terbentuk dari beberapa poin ini, antara lain:

1. Tujuan

   Tentu setiap sistem memiliki tujuan yang hendak di capainya sebagai goalsnya. Dengan inilah yang menjadi penguat, penyemangat dan memotivasi yang mengarahkan sistem.

2. Input

   Input atau masukan menjadi bagian dari elemen sistem

dalam artian segala sesuatu yang masuk dan menjadi bahan yang mesti diproses. Bisa dikatakan input atau masukan ini bisa berupa hal-hal yang tidak berguna dan dapat diproses menjadi suatu hal yang berguna.

3. Proses

   Proses menjai bagian dari elemen sistem dikarenakan hal ini menjadi kelanjutan dari adanya input yang diproses menjadi output yang lebih berguna dari sebelumnya.

4. Output

   Output atau keluaran merupakan kebalikan dari input yang merupakan hasil dari masukan atau input yang telah diproses. Output tersebut berupa informasi, saran, laporan dan sebagainya.

5. Boundary

   Boundary atau batasan merupakan pemisah antara bagian dalam sistem dengan suatu yang diluar sistem. Dalam artian suatu yang diluar dari sistem ialah lingkungan.

6. Control Mechanism dan Feedback

   Selanjutnya adalah mekanisme pengendalian (Control Mechanism) dapat terwujud bila adanya umpan balik (Feedback) dari lingkungan terhadap output. Tujuan adanya hal ini ialah untuk mengatur agar sistem dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sehingga dapat mempermudah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

7. Lingkungan

   Terakhir, bagian dari elemen sistem ialah lingkungan yakni segala sesuatu yang berada di luar sistem. Elemen ini nantinya

akan memberikan respon atau umpan balik yang mana bisa bersifat baik atau buruk bagi sistem. Tentu jika umpan balik yang diberikan buruk, maka harus bisa dikendalikan agar tidak berpengaruh pada keberjalanan suatu sistem. Sebaliknya, jika umpan balik yang diberikan sangat baik, maka dapat menjadi bahan acuan untuk terus menjaga dan meningkatkan keberjalanan sistem.[4]

Dilihat dari pengertian lain sistem juga dapat diartikan sebagai cara, tata rencana, skema prosesdur atau metode. Hal ini didasaran pada sistem adalah suatu yang berpola serta sering bersifat otomatis.

Selain itu, jika dilihat dari segi terminologi, beberapa ahli mengungkapkan terkait penjelasan dari pengertian dari sistem. Menurut Ellias M Awad (1979:4), menjelaskan bahwa sistem adalah sehimpunan komponen atau subsistem yang terorganisasikan dan berkaitan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan tertentu.[5] Dari pengertian ini dapat dijelaskan bahwa sistem adalah sebuah kumpulan rencana yang tersusun dengan niat untuk mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan menurut Campbell (1973:4), ia mengungkapkan bahwa sistem adalah himpunan komponen atau bagian yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan.[6]

---

[4] Demokrasi style,(2018) , Pengertian sistem politik, dari https://pengertian-ilmu-sistem-politik.blogspot.com/2015/09/pengertian-sistem-politik-umum-para-ahli-02.html diakses pada: 22 April 2022

[5] Awad, Elias M,(1979), System Analysis and. D_e_slgn ,Ricard D. Irwin Homewood, Illinois.

[6] Campbell, B. (1967) “Motivations of pinball players.” Honors thesis. University of Missouri (Columbia).

Dalam hal ini, dapat disederhanakan, sistem ialah suatu kumpulan cara yang saling berurutan dan berkaitan dengan mempunyai peran untuk mencapai tujuan yang telah disepakatkan.

Hal ini juga dijelaskan bahwa oleh Konontz dan O.Donnell (1976: 14) bahwa sistem bukan wujud fisik, melainkan ilmu pengetahuan yang disebut sebagai sistem yang terdiri atas fakta, prinsip, doktrin, dan lainnya.[7] Dalam hal ini ia menjelaskan bahwa unsur-unsur sistem yang meliputi ke 3 hal tersebut yang berperan sebagai satu kesatuan. Dimana semua hal tersebut saling berkaitan dan mendukung untuk mencapai tujuan organisasi atau negara.

Selanjutnya, ada kata politik yang jika ditinjau pengertiannya berasal dari bahasa Yunani yakni polis yang memeiliki arti negara atau kota. Dalam buku yang berjudul A New Handbook of Political science menjelaskan bahwa politik is *the constrained use of social power* (penggunaan kekuasaan sosial yang dipaksakan).[8] Dalam hal ini, politik ditekankan pada penggunaan kekuasaan. Sehingga dapat diartikan bahwa Politik selalu berkaitan atau berhubungan dengan segala hal yang ada kaitannya dengan kekuasaan.

Lalu, ada penjelasan dari Carlton Clymer dalam buku Pengantar Ilmu Politik menjelaskan bahda pada masa Yunani, saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Ketika mereka saling bersaing dan berjuang untuk menentukan posisinya dalam bermasyarakat, kesejahteraan melalui sumber daya, atau berupaya untuk dapat mempengaruhi orang lain,

---

[7] Koontz, Harold Cyril O'Donnel, 1980, Management, Edition VII, Tokyo: Mc Graw-Hill Kogakusha, Ltd

[8] Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann, A New Handbook of Political Science, New York: Oxford University Press, 1996, hlm. 7.

hal ini termasuk dalam kegiatan yang dinamakan politik.[9]

Jika dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa 1) Politik memiliki arti pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan 2)Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Dalam hal ini semakin memperkuat bahwa Politik adalah suatu pengetahuan yang digunakan dalam hal mengatur tatanan negera atau kekuasaan.[10]

Gabriel A. Almond et.al., mengungkapkan definisi dari Politik melalui bukunya yang berjudul Comparative Politics Today: a World View (2004), bahwa:

"... the activities associated with the control of public decisions among a given people and in a given territory, where this control may be backed up by authoritative and coercieve means. Politics refers to the use of these authoritative and coercive means – who gets to employ them and for what purposes."[11]

Jika dialih bahasakan ke bahasa Indonesia, maka penjelasan dari Gabriel A. Almond tersebut antara lain,:

"… Kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, dimana kendali ini disokong melalui instrumen yang sifatnya otoritatif (berwenang secara sah) dan koersif (bersifat memaksa). Politik mengacu pada pengunaan instrumen otoritatif dan koersif ini

[9] Carlton Clymer Rodee et al., Pengantar Ilmu Politik, Cet. 5, Jakarta: Rajawali Press, 2002, hlm. 2-3.
[10] Dilansir dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
[11] Gabriel A. Almond et.al., Comparative Politics Today: a World View, Eight Edition, Delhi: Dorling Kindersley Publishing, Inc., 2004, hlm. 2.

– siapa yang berhak menggunakannya dan dengan tujuan apa.”

Dalam pengertian yang diungkapkan oleh Gabriel Almond ditunjukan mengenai adanya akata otoritatif yang sangat berkaitan dengan politik atau sering diartikan sebagai lembaga pemerintahan. Dimana tidak mungkin adanya sebuah kekuasaan politik jika tidak adanya lembaga pemerintahan yang tidak memiliki otoritas dalam kepemimpinannya. Begitu pula pemerintah tidak akan memiliki otoritas dalam kepemimpinannya bila tidak bisa mempunya kekuasaan atas apa yang dipimpinnya yakni masyarakat.

Biasanya otoritatif atau lembaga pemerintahan yang menjalankan sistem politik tidak akan terlepas dari yang namanya budaya sosial dan pengklasifikasian sosial. Seperti halnya yang dilakukan oleh Max Weber yang mengklasifikasikan masyarakat dalam sistem kewenangan, tradisional, kharismatik dan legal rasional yang semuanya berhubungan dengan persoalan sistem sebagai konsep dan pemahaman politik. Selain Max Weber, salah satu ahli ekonomi yakni Karl Marx juga membuat klasifikasi masyarakat yang didasarakan pada sistem produksi yang diwujudkan dengan adanya kelas sosial yakni Feodal, Borjuis, dan Proletar.

Sedangkan menurut Karl W.Deutch memberikan definisi politik sebagai persoalan bagaimana orang menentukan nasibnya melalui pembuatan keputusan menggunakan fasilitas publik. Lalu, Harold D.Lasswell mengungkapkan bahwa Politik adalah tentang siapa mendapat apa dengan cara bagaimana. Dari kedua orang tersebut menjelaskan terkait teori politik secaa prinsipil sekaligus memberikan ruang politik pada aspek personal. dalam artian politik tidak dapat lepas dari setiap aktivitas dan kegiatan manusia.

Jika melihat kaitan politik dengan suatu entitas lain diluar aspek personal, 3 teori yang dikemukakan oleh 3 ahli ini bisa menjadi suatu acuan mengenai pandangannya terhadap politik. Pertama, David Easton mengungkapkan bahwa Politik melingkupi segala aktivitas yang mempengaruhi kebijakan yang dibuat otoritas. Kedua, Joyce Mitchell memberikan pemahamannya bahwa Politik adalah suatu pengambilan keputusan secara kolektif atau keputusan untuk seluruh masyarakat. Ketiga, Johan Kaspar Bluntschli mengartikan politik sebagai ilmu mengamati urusan negara.

Dari ketiga pandangan yang diungkapkan oleh beberapa ahli tersebut memberikan pencerahan terkait definisi politik. Bisa disederhanakan bahwa politik adalah bagian dari aktivitas manusia dalam mengambil keputusan. Dalam kaitannya sangat erat dengan sosok pemangku kebijakan yang dibuat otoritas lebih luasnya yakni pemerintahan.

Adapun asumsi-asumsi yang mendasari Politik ini sempat diungkapkan oleh Andrew Heywood. Dia mengungkakan bahwa ada 4 asumsi dasar yang mendasari politik, yakni.

1. seni pemerintahan, hal ini menjelaskan bahwa politik suatu pengaplikasian dalam seni untuk mengelola masyarakat melalui pembentukan sebuah kebijakan. Asumsi ini merupakan salah satu asumsi yang paling pertama muncul dan telah berkembang sejak Yunani Kuno.
2. Hubungan publik, dalam hal ini menjelaskan bahwa Politik bisa menjadi salah satu penghubung antara individu satu dengan individu yang lain dengan jalur interaksi melalui sebuah komunitas. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan

oleh Aristoteles yang menyebutkan bahwa manusia adalah binatang publik.

Hal ini sejalan dengan adanya perbedaan antara ruang lingkup “publik” dan “privat” yang sering disebut dengan State (kembangan publik) dan Civil Society (kembangan privat)

Adapun yang termasuk dalam kembangan publik (state) yakni institusi seperti pengadilan, aparat pemerintahan, polisi, tentara, sistem kesejahteraan sosial. Sedangkan, institusi yang termasuk dalam kembangan privat (Civil Society) ialah keluarga, kekerabatan, bisinis swasta, serikat kerja, klub-klub, komunitas, dan sejenisnya.

3. Kompromi dan Konsensus, jika ditarik dari pengertian menurut KBBI mengungkapkan bahwa Konsensus adalah kesepakatan kata tau pemufakatan bersama (mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya) yang dicapai melalui kebulatan suara. Sedangkan Kompromi adalah persetujuan dengan jalan damai atau saling mengurangi tuntutan (tentang persengketaan dan sebagainya).

   Dalam hal ini menjelaskan bahwa tidak ada negara yang kepentingannya dapat terselenggarakan secara sempurna. Suatu tatanan kepemerintahan dapat dikatakan baik apabila setiap pergesekan antara kepentingan yang saling berkaitan dapat diselesaikan melalui kompromi dan konsensus diatas meja, bukan dari hasil pertumpahan darah.

4. Kekuasaan, ialah kemampuan individu atau kelompok untuk mempengaruhi individu atau kelompok lain agar mereka mau

menurutinya. Dalam hal ini kekuasaan menjadi asumsi dasar dari Politik, karena suatu otoritaritatif atau lembaga kepemerintahan mempunyai kewajiban untuk dapat membuat keputusan dan kebijakan yang dapat mengendalikan masyarakat.

Dalam konteks politik, kekuasaan yang dimaksud ialah kekuasaan sosial, yakni produksi, distribusi, dan penggunaan sumber daya suatu masyarakat.[12]

Selain dari beberapa pengertian diatas, 2 teori dari J Barents dan Roger F Soltau ini bisa dijadikan penguat terkait pemahaman politik yang ditinjau dari segi ilmu pengetahuannya. Menurut J Barents, dia menyebutkan bahwa ilmu politik mempelajari suatu negara yaitu bagaimana negara menjelaskan tugasnya. Sedangkan, Roger F. Soltau memberikan gambaran bahwa ilmu politik mempelajari negara dan tujuan negara beserta perangkat-perangkatnya dalam mencapai tujuannya. Selain itu, mencangkup hubungan antara negara (pemerintah) dan warganya. Ditambah politik ini juga meliputi beberapa elemen dasar yang harus hadir yakni kekuasaan, kebijakan, distribusi. Dan alokasi.

Dari beberapa penjelasan definisi politik dapat disimpulkan bahwa politik ialah pengetahuan atau tatacara dalam kenegaraan yang berkaitan dengan cara pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan, atau dalam hal kekuasaan. Negara Politik pada dasarnya menyangkut tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Politik biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara dan organisasi

[12] Shrode, William, A., dan Dan Voich, J., 1974, Organization and Management:Basic System Concepts, Irwin Book Co., Kuala Lumpur.

kemasyarakatan.

Dapat disederhanakan bahwa politik adalah sebuah interaksi yang dilakukan, dijalani, dan difungsikan oleh pemerintah dengan masyarakat dalam membuat suatu kebijakan dan keputusan yang tujuannya mengikan kebaikan bersama antara masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut.

Dalam aspek personal juga meliputi berbagai aktivitas yang dilakukan manusia dalam menentukan setiap hal yang diinginkan dan dicapainya, serta proses berjuang untuk bisa menggapai hal tersebut bisa dinamakan sebagai politik. Sehingga, ruang lingkup dari keberjalanan politik tidak hanya berfokus pada skema pemerintahan saja. Melainkan aspek diri pribadi juga tidak terlepas dari yang namamya politik.

Setelah kita memahami terkait kata “sistem” dan “politik’ secara mendalam melalui teori-teori dan pandangan dari para ahli yang sangat expert dibidangnya. Selanjutnya kita akan memahami terkait penyatuan kedua kata tersebut yakni “Sistem Politik” berdasarkan beberapa pandangan dan teori para ahli.

Akan tetapi alangkah baiknya untuk memahami pengertian sistem politik secara bahasa yang umum dikenal oleh banyak orang. Sistem politik merupakan hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam bentuk prosedur pembentukan peraturan dan kepastian yang menyangkut mengenai kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu kawasan yang spesifik. Dalam artian sistem politik ini akan lebih mengarah kepada hubungan yang dilakoni oleh pemerintah dengan masyarakat yang menjadi objeknya dalam menjalani setiap kebijakan dan keputusan dari otoritatif

(pemerintahan).

Salah satunya menurut David Easton yang menyampaikan pandangannya mengenai definisi atau pengertian dari sistem politik. Dimana ia dalam memberikan teorinya masih memegang posisi kunci dalam studi ilmu politik negara. Dibantu dengan pengertiann dari Gabriel Almond yang semakin mempertajam maksud atau konsep dari teori ini. Dia mengungkapkan bahwa sistem politik adalah hubungan yang digeneralisasikan dari semua perbuatan sosial, Sehingga makna-makna dari bagian secara berkuasa kepada masyarakat.

Dari definisi yang dikemukakan oleh David Easton, Michael Saward memberikan tanggapannya terhadap teori ini , bahwa akan ada 4 konsekuensi logis, antara lain:

1. Hanya ada satu otoritas, yakni negara
2. Peran dalam keluaran (output) keputusan dan tindakan bersifat eksklusif yakni hanya ada di tangan pemiliki otoritas (pemerintah)
3. Menekankan pada kebijakan yang mengikat dari otoritas, Sehingga keputusan dibuat atas dasar konstitusi dan dasar keputusan ditujukan untuk menghindari chaos politik.
4. Negara sangat penting untuk selalu beroperasi secara legitimate

Sedangkan penguat dari Gabriel Almond mengenai teori ini mengemukakan bahwa sistem politik adalah sebuah sistem hubungan yang bisa dijumpai dalam masyarakat independen yang melaksanakan fungsi penggabungan dan penyesuaian. Dalam artian teori ini menguatkan bahwa sistem politik adalah hubungan antara

semua perbuatan sosial yang sering dilakukan oleh masyarakat dalam menanggapi setiap kebijakan yang buat oleh pemangku kekuasaan.

Berikut ini perkataan Gabriel A.Almond dan G. Bingham Powell, Jr tentang sistem politik, ialah:

"The use of this term-instead of such term as "government", "nation", or "state"- reflects a new way of viewing political phenomena. Indeed, the new terms include some new names for old thing, and some new terms refer to activities and processes which were not formerly recognized as being parts or aspects of politics."

(Penggunaan istilah tersebut sebagai pengganti istilah "pemerintah", "bangsa", atau "negara" mencerminkan cara baru dalam meninjau fenomena politik. Memang istilah baru itu mengandung beberapa penamaan baru dan beberapa sebutan baru yang menunjuk pada berbagai aktivitas dan proses yang sebelumnya tidak diakui sebagai bagian dari aspek politik)

B. Sistem Politik Indonesia

Jika mendengar kata Indonesia tidak terlepas dari yang namanya Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara di Asia Tenggara. Pada kali ini, dikaitkan dengan pembahasan sebelumnya mengenai sistem politik.

Berikut ini beberapa definisi Sistem Politik Indonesia yang diantaranya sebagai berikut:

1. Sistem Politik Indonesia adalah sekumpulan interaksi sosial yang disalurkan melalui nilai-nilai sosial kepada masyarakat dan negara Indonesia. Dalam hal ini, interaksi

sosial masyarakat akan mempengaruhi sistem politik indonesia, sperti, ideologi negara, dasar negara, budaya politik, dan lain-lain.

2. Sistem Politik Indonesia adalah sekumpulan atau keseluruhan kegiatan yang ada di dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan proses penentuan tujuan, upaya untuk mencapai tujuan, pengambilan keputusan, seleksi dan penyusunan skala prioritasnya.
3. Sistem Politik Indonesia hanya berlaku di Indonesia, hal ini merujuk pada suatu sistem yang pernah berlaku, sedang berlaku, atau yang berlaku selama berdirinya negara Indonesia sampai saat ini.
4. Sistem Politik Indonesia berfungsi sebagai mekanisme yang disesuaikan dengan dasar negara,

Tentunya banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi sistem politik indonesia, seperti lingkungan, sosial budaya, dan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, David Easton mengungkapkan bahwa sistem politik adalah kehidupan politik yang merupakan sistem interaksi yang ditentukan oleh fakta yang berhubungan dengan penyebaran nilai-nilai secara otoritatif dalam masyarakat.[13]

Menurut Rusadi, negara Indonesia mengandung beberapa sifat yang harus diketahui seperti falsafah, gagasan, cita-cita, nilai-nilai, doktrin, atau wawasan yang melekat pada Indonesia. Dengan demikian, sistem politik Indonesia mempunya sifat keindonesiaan yang ditunjukan melalui nilai-nilai luhur

[13] Dr. Sahya Anggara, 2013, Sistem Politik Indonesia , CV Pustaka Setia, Bandung

Pancasila, UUD 1945, nilai-nilai proklamasi, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Jika ditinjau dari sejarah, sistem politik indonesia memiliki perbedaaan esensial dari periode satu ke periode yang lainnya. Misalnya sistem politik demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi pancasila. Adapun ada 2 kemungkinan yang harus diselidiki dan bisa jadi penyebab adanya perbedaaan tersebut, antara lain:

1. Falsafah negara tidak memiliki perngaruh terhadap sistem politik dan para pelaku politik.
2. Belum ditemukannya standar dan model sistem politik Indonesia yang sesuai untuk mendukung tercapainya cita-cita negara

C. Ciri-ciri, Unsur-unsur, dan Sifat Sistem

1. Ciri-Ciri Sistem

Beberapa ahli mengungkapkan terkait ciri-ciri sistem, antara lain

1) Ellias M, Awad (1979: 5-8)

Berikut ini ciri-ciri sistem yang telah dikemukakan oleh Ellias M.Awad, antara lain:

a) Terbuka,
b) Terdiri atas dua atau lebih subsistem,
c) Saling bergantung,
d) Kemampuan untuk mengatur diri sendiri,
e) Tujuan dan sasaran

2) Dan Voich Jr. dan William A. Shrode

Adapun ciri-ciri sistem yang disebutkan oleh Dan Voiech Jr. dan William A. Shrode antara lain sebagai berikut:

a) Perilaku yang bertujuan,
b) Menyeluruh,
c) Terbuka
d) Melakukan kegiatan transformasi
e) Saling terkait mekanisme kontrol

2. Ciri-ciri Pokok dari Sistem

Adapun ciri-ciri pokok yang ada di dalam sistem ialah, sebagai berikut:

1) Mempunyai tujuan,
2) Mempunyai batas ,
3) Memiliki sifat keterbukaan dalam arti berinteraksi dengan lingkungan,
4) Terdiri atas berbagai unsur atau komponen (sub system) yang saling bergantung dan berhubungan
5) Melakukan kegiatan atau memproses dab mengubah input menjadi output (Processor dan transformator)
6) Memiliki meknisme kontrol dengan memanfaaatkan umpan balik (mechanisme control dan feedback)

3. Sistem, Unsur, dan Tujuan Sistem

Jika ditarik kesimpulan secara sederhana, sistem merupakan sekumpulan unsur yang berkaitan untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini bisa dicontohkan pada bagan berikut:

Sistem	Unsur-unsur	Tujuan
Tubuh	Organ-organ, Kerangka	Homeostatis

Negara	Legislatif, Eksekutif, Yudikatif	Kesejahteraan
DPR	Anggota, perlengkapan bangunan, PNS	Undang-undang

4. Sifat Dasar Sistem

1) Perilaku yang memiliki tujuan

Dalam artian menjelaskan bahwa sistem selalu berorientasi terhadap objek atau perilaku yang memiliki tujuan. Hal ini meniciptakan nilai tersendiri dari hasil kombinasi dan pemanfaatan sumber daya dengan cara tertentu.

2) Pengertian "wholism"

Wholism ialah teori yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang mendeterminasi keseluruhan yang tidak dapat diuraikan bahwa keseluruhan melebihi jumlah dari bagian-bagiannya.

3) Soal keterbukaan

Sistem bisa bersifat terbuka dapat dipengaruhi oleh lingkungin, tetpi juga bisa mempengaruhi lingkungan. Sistem ini menunjukan ciri yang disebut equifinality dapat diartikan sebagai suatu kearifan final sistem tertentu dapat dicapai dari berbagai macam kondisi yang berbeda.

4) Persoalan transformasi

Dalam hal ini, sistem mempunyai media untuk memanfaatkan dan menstransformasi sumber daya yang menjadi output untuk mewujudkan tujuan yang telah direncanakan.

5) Persoalan antar-keterkaitan

Persoalan antar-keterkaitan berhubungan dengan interaksi

internal dan interdependensi berbagai bagian dari sistem. Beserta dengan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan.

6) Persoalan mekanisme pengawasan

   Kebanyakan sistem menunjukan ciri-ciri “lingkaran tertutup” (close loop), adapun sistem yang terbuka beroperasi dalam lingkungan yang kompleks, keadaan keseimbangan yang terus-menerus mengalami perubahan yang disebut sebagai “keseimbangan dinamis”. Dalam upaya mempertahankan kondisi tersebut diharuskan untuk mengevaluasi kondisi, menyesuaikan diri melalui proses umpan balik (feedback) dan penyesuaian (adaptation) dengan menggunakan mekanisme tertentu.

D. Ruang Lingkup Ilmu Politik

Seperti kita ketahui, Ilmu Politik merupakan salah satu konsep yang berkembang dalam ilmu-ilmu sosial. Berikut ini fokus perhatian ilmu politik yang berfokus pada kekuasaan, adalah :

1. Upaya memperoleh kekuasaan
2. Mempertahankan kekuasaan
3. Penggunaan kekuasaan
4. Bagaimana menghambat penggunaan kekuasaan.

Adapun bidang kajian yang dikaji dalam ilmu politik, meliputi:

1. Teori ilmu politik, meliputi teori politik dan sejarah perkembangan ide-ide politik

2. Lembaga-lembaga politik, meliputi UUD, pemerintahan nasional, pemda dan lokal, fungsi ekonomi dan sosial pemerintah dan perbandingan lembaga-lembaga politik
3. Partai politik, yang diantaranya meliputi 1) organisasi kemasyarakatan, pendapat umum, partisipasi warga negara dalam pemerintahan administrasi.
4. Hubungan internasional,yakni meliputi politik internasional, organisisai internasional, administrasi internasional, dan hukum internasional.

Dalam hal ini, kata politik dapat menunjuk pada:

1. Segi kehidupan manusia untuk kekuasaaan (power relation) misalnya:
    1) Kebebasan politik
    2) Kejahatan politik
    3) Kegiatan politik
    4) Hal-hal yang berkaitan dengan politik
2. Tujuan yang hendak dicapai
    1) Politik keuangan,
    2) Politik luar negeri
    3) Dalam negeri
    4) Ekonomi, dan sebagainya

BAB 4 SEJARAH POLITIK

A. Perkembangan Politik Sebagai Studi

Politik sebagai suatu studi juga mengalami perkembangan seiring dengan perubahan zaman. Hermood (2007) rnencoba membagi perkembangan politik sebagai suatu studi dalam tiga tradisi:

1. Tradisi Filosofikal
2. Tradisi Empiris
3. Tradisi Saintifis

Perubahan-perubahan tradisi ini terjadi dikarenakan terdapat perbedaan pemikiran, pandangan dan cara analisis yang dianut oleh para pemikir pada zarnannya. Sebagai contoh, analisis politik yang berbasiskan tradisi filosofikal ini sudah muncul sejak zaman Yunani Kuno. Adalah Plato dan politik melalui tradisi filosofikal ini pertama kali.

Tradisi filosofikal dalam melakukan analisis atau studi tentang potitik ini berbicara mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan secara normatif, yang sesuai dengan etika, dan nilai-nilai lainnya yang sangat memperhatikan tindakan setanjutnya yang harus dan sebaiknya diambil ("*what 'should', `ought' or 'must' be brought about, rather than with what `is*.'") (Heywood, 2007, hat.13). Plato datam karya-karyanya pun pada intinya membahas mengenai kondisi ideal suatu masyarakat dan bagaimana untuk sampai kepada kondisi ideal tersebut. Plato berpendapat bahwa agar masyarakat dapat mencapai tahap yang ideal, maka masyarakat perlu dipimpin oleh *philosopher kings* yang memerintah berdasarkan kebijaksanaan. Pandangan dalam tradisi filosofikat yang dicetuskan oleh Plato dan Aristoteles ini

juga dituliskan kembali oleh dua Eropa pemikir abad pertengahan, yaitu Augustine dan Aquinas (Heywood, 2007).

Karya-karya dan buah pemikiran mereka ini dianggap sebagai pembentuk pendekatan politik yang bersifat tradisional. Pendekatan politik yang bersifat tradisional ini mencakup hal-hal seperti berpikir analitis terhadap hal-hal yang menjadi pembentuk politik seperti ide-ide dan doktrin (Heywood, 2007).

Secara literatur, tradisi filosofikal lebih banyak membahas dan berbicara mengenai sejarah dari para pemikir politik sejak dahulu hingga yang kontemporer. Sehingga, dapat dikatakan bahwa tradisi filosofikal lebih tertarik untuk membahas mengenai pemikiran dari seorang tokoh. Tradisi filosofikal akan lebih banyak membahas mengenai seorang tokoh. Tentang dasar-dasar pemikirannya, ide-ide besar yang menggerakkan pemikiran tersebut, bagaimana ide dan pemikiran tersebut terbentuk, apa yang mencetuskan ia untuk menggagas pemikiran tersebut, dan lain-lainnya yang membahas mengenai seorang pemikir dan juga pemikiran mereka. Tradisi filosofikal juga menambahkan dan membahas mengenai faktor normatif dari pandangan yang dituliskan kembali oleh mereka seperti "mengapa seseorang harus memtuhi peraturan-peraturan dan perintah dari suatu negara" ("*Why should 1 obey the state?*") (Heywood, 2007, hal.14).

Selain tradisi filosofikal, terdapat pula tradisi empirikal. Tradisi empirikal ini berbeda dari tradisi filosofikal karena tidak seperti tradisi filosofikal yang juga membahas mengenai

permasalahan yang normatif, tradisi empirikal ini lebih bersifat deskriptif dan menyampaikan secara apa adanya. Tradisi empirikal ini dapat kita lihat melalui bentuk-bentuk pemikiran dan karya dari Aristoteles yang berupaya untuk melakukan klasifikasi terhadap konstitusi, Machiaveth dengan upayanya untuk menjelaskan keahlian berpolitik (*statecroft*) secara realistis dan Montesquieu dengan teori sosiologi dalam pemerintah dan hukum (Heywood, 2007).

Tradisi empirikal yang berbasiskan kepada pembahasan secara deskriptif ini berawal sejak abad ke 17 dan seterusnya, dengan para pemikir seperti John Locke dan David Hume yang menyebarkan bentuk tradisi empirikal ini melalui karya-karyanya. Tradisi empirikal berawal dari pemahaman yang menganggap penting suatu pengalaman (*experience*) dan mengatakan bahwa hanya melalui pengalamanlah suatu ilmu pengetahuan memiliki dasar. Melalui anggapan seperti itu, maka para pemikir yang menggunakan doktrin empirikal ini berpendapat bahwa teori, asumsi dan hipotesis harus diuji tertebih dahulu melalui suatu proses pengamatan (*process of observation*) (Heywood, 2007). Pengembangan tradisi empirikal pada tahun-tahun berikutnya kemudian menghasilkan sesuatu pendekatan baru yang dinamakan dengan *positivisme* yang digagas oleh Auguste Comte pada abad ke-19 yang menyatakan bahwa ilmu-ilmu sosial beserta nilai filosofis yang ada haruslah mengacu kepada metode-metode seperti yang digunakan pada ilmu-itmu alam (Heywood, 2007).

Tradisi yang ketiga adalah tradisi saintifis. Karl Marx

dengan pendekatan materialisnya dalam melihat konsepsi sejarah adalah orang pertama yang membahas politik dengan pendekatan tradisi saintifis. Tradisi saintifis ini berkembang secara khusus di Amerika Serikat pada tahun 1950 dan 1960an dengan pendekatan behavioralisme yang sangat kental. Behavioralisme sendiri adalah suatu pendekatan yang menyebutkan bahwa suatu teori sosial hanya bisa dibentuk apabila terdapat perilaku (behavior) yang dapat diamati sehingga dapat memberikan data-data penelitian yang bersifat kuantitatif. Ini memberikan suatu penyegaran baru terhadap ilmu politik karena sebelumnya, hipotesis-hipotesis dalam ilmu politik tidak dapat diverifikasi dan dites kebenarannya karena tidak adanya perhitungan ataupun obyektif data yang jelas. Behavioralisme memberikan ruang untuk mempelajari ilmu politik melalui pendekatan-pendekatan yang sebelumnya hanya bisa dilakukan dalam ilmu-ilmu pasti dan ilmu alam. David Easton, salah seorang pemikir ilmu politik di Amerika Serikat, pada dekade 1960an memperkenalkan pendekatan metodologi ilmu-ilmu alam untuk diaplikasikan ke dalam ilmu politik (Heywood, 2007). Hasilnya, penelitian-penelitian yang berbasiskan behavioralisme ini muncul dimana-mana dalam ranah ilmu politik yang sebelumnya tidak pernah mempunyai landasan kuantitatif yang baik. Contohnya seperti penelitian mengenai kecenderungan sikap para pemilih dalam pemilu, sikap para legislator politik, dan juga aktor-aktor lain yang terlibat dalam politik seperti politikus dan pemangku kebijakan (Heywood, 2007).

Behavioralisme ini pun tak dapat lepas dari kritik.

Beberapa mengatakan bahwa pendekatan behavioralisme dalam politik justru terkesan meminggirkan konsep-konsep yang tak dapat diperhitungkan secara pasti atau diperhitungkan secara empiris seperti kebebasan, hak, keadilan dan kesetaraan (Heywood, 2007). Kritik selanjutnya mengenai behavioralisrne memperrnasalahkan tentang inti dari behavioralisme itu sendiri. Pendekatan behavioralisme berusaha untuk objektif dan terpercaya dalam melihat suatu objek sehingga ia bisa dikatakan sebagai pendekatan yang tidak mengikuti suatu nilai-nilai tertentu dalam pendekatannya (*value free*) (Heywood, 2007). Akan tetapi, bagaimana bisa dalam melihat objek yang sangat berkaitan dengan sikap, kita melepaskan dan tidak memperhitungkan nilai-nilai yang mungkin dianut dan menjadi landasan sikap oleh objek tersebut? Jika begitu, maka behavioralisme hanya berupaya untuk menjabarkan dan mendeskripsikan suatu keadaan politik sebagaimana adanya tanpa mencoba melihat apa nilai-nilai yang mendasari terjadinya suatu keadaan politik tersebut.

Tiga tradisi atau pendekatan yang sudah disampaikan sebelumnya, yaitu filosofikat, empirikat dan saintifis ini merepresentasikan alam berpikir dalam memaknai ilmu politik yang terus berkembang seiring waktu dan perkembangan zaman. Politik, seiring waktu pun terus mengalami perkembangan dari segi penerapan maupun persepsi orang-orang dalam memaknai politik itu sendiri.

B. Sejarah Politik Dunia

Politik apabila disangkutpautkan dengan negara, berarti kita berbicara mengenai hampir semua aspek dalam negara itu sendiri. Contohnya seperti bentuk pemerintahan, ideologi, hingga kedaulatan dan kekuasaan dari negara tersebut. Bentuk dan sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara memiliki sejarahnya sendiri tergantung bagaimana negara beserta aspek-aspek di dalamnya bereaksi terhadap suatu perubahan yang ada baik itu terjadi di dalam negara tersebut atau dari luar yang membuat negara tersebut harus menyesuaikan diri. Sepanjang sejarahnya, bentuk-bentuk pemerintahan berkembang. Bentuk pemerintahan yang dahulu populer seperti misalnya monarki absolut, saat ini hanya segelintir negara yang masih memiliki bentuk pemerintahan seperti itu. Berikut akan dijelaskan mengenai bentuk-bentuk dan sistem pemerintahan yang pernah muncul dalam sejarah, baik yang masih aktif ataupun tidak. Berbicara pemerintahan, seperti yang telah diangkat pada bagian sebetumnya, adalah berbicara mengenai potitik. Seiring dengan perkembangan populasi manusia dan perkembangan teknologi, kebutuhan manusia untuk berorganisasi semakin besar, sehingga mengharuskan manusia untuk membuat spesialisasi tugas. Ini berarti bahwa harus ada yang mengatur siapa mengerjakan apa, siapa mendapat apa, siapa yang membuat aturan dan lain-lainnya. Bentuk-bentuk peradaban pertama manusia di Lembah Sungai Indus, Mesopotamia, Mesir, Sungai Yangtze di Tiongkok hingga Meksiko adalah tempat-tempat pertama peradaban manusia yang berkomunitas ditemukan. Metalui tempat-tempat muncutnya

peradaban ini, komunitas-komunitas manusia tumbuh dan berkembang menjadi suatu sistem yang lebih kompleks lagi yaitu kerajaan.

Kerajaan-kerajaan ini saling bersaing, membangun kontak, berdagang, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang menghubungkan kerajaan yang satu dengan yang lainnya. Persaingan memperebutkan kekuasaan atas wilayah atau sumber daya pun menjadi cerita yang mengisi tumbuh kembangnya kerajaan-kerajaan tersebut. Kerajaan-kerajaan dan kekaisaran-kekaisaran yang ada pada rentang waktu tersebut biasanya rnemiliki sistem yang bersifat totalitarian dimana semua yang ada di dalam lingkup kekuasaan suatu kerajaan atau kekaisaran adalah milik kekaisaran atau kaisar.

Di Yunani, bentuk-bentuk komunitas berkembang menjadi bentuk pemerintahan yang bersifat negara-kota. Kota seperti Athena, Thebes, Sparta dan Korinthus memiliki bentuk pemerintahan dan identitasnya sendiri dan tidak jarang, kondisi mempertemukan mereka untuk saling bersaing dalam memperebutkan kekuasaan, wilayah, dan lain sebagainya. Dalam lingkungan yang seperti itulah para pemikir seperti Aristoteles dan Plato mengembangkan pemikiran dan karya-karyanya.

Melalui pengamatannya, Aristoteles melihat bahwa terdapat dua bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan pertama adalah pemerintahan yang mempedulikan kebaikan bersama dan bertindak berdasarkan kepentingan bersama. Pemerintah yang seperti ini dinamakan dengan *good governments* atau pemerintahan yang baik. Sementara itu, bentuk pemerintahan

yang bersifat kebalikan dari pemerintahan yang pertama, dimana pemerintahan ini bersifat mendistribusikan sumber daya yang ada untuk dinikmati hanya oleh segelintir orang-orang dalam lingkup pemerintahannya dinamakan dengan *bad governments* (Burke, 2008).

Aristoteles, lebih lanjut lagi, mengklasifikasikan bentuk pemerintahan menjadi tiga. Bentuk-bentuk pemerintahan tersebut adalah monarki, aristokrasi dan demokrasi dimana ketiganya memiliki bentuk dan sifat yang berbeda. Monarki adalah sistem pemerintahan dimana kekuasaan bersumber pada satu orang dan orang tersebut menjadi pusatpemerintahan. Aristokrasi adalah sistem pemerintahan dimana sekelompok orang menjadi pusat kekuasaan dan mengontrol pemerintah dan negara tersebut sesuai dengan keinginan mereka. Sementara demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana rakyat banyak menguasai pemerintahan (*government by many*).

Selain tiga bentuk pemerintahan menurut Aristoteles tersebut, terdapat juga bentuk-bentuk pemerintahan lainnya yang diklasifikasikan oleh para pemikir setelah Aristoteles. Contohnya seperti:

1. Teokrasi dimana pemerintahan yang berlaku berjalan berdasarkan mandat Tuhan dan dipimpin oleh pemuka agama.
2. Tirani, dimana pemerintahan yang ada dipimpin dan dikontrol oleh kendali satu orang yang memerintah berdasarkan keinginan dan kepentingannya sendiri.

3. Oligarki, dimana pemerintahan diisi dan dijalankan oleh sekelompok orang yang memiliki kepentingan dan keinginannya bersama.
4. Birokrasi, dimana sistem pemerintahan diisi oleh orang-orang administratif dalam pemerintah, yang kemudian membentuk birokrasi di dalam pemerintahan.

Bentuk sistem pemerintahan totalitarian atau despotisme yang lebih kompleks dibandingkan dengan masa-masa ketika manusia masih hidup berkomunitas dalam skala kecil seperti suku ini memberikan pengaruh yang lebih besar juga terhadap kehidupan manusia di dalam lingkup sistem pemerintahan tersebut. Bentuk-bentuk pencapaian dari sistem yang lebih kompleks ini contohnya seperti aturan hukum Hammurabi di Babilonia, sistem jalan raya yang dibuat di sepanjang Kekaisaran Romawi, pembuatan dan standardisasi aksara Cina oleh Kaisar Shi Huangdi adalah beberapa contohnya (Thistlerose Publications, 2006) Di Eropa, Kekaisaran Romawi menjadi kekaisaran yang bermula dari negara-kota hingga tumbuh dan berkembang menjadi kekaisaran yang besar pun memberikan sumbangsih yang cukup fundamental terhadap perkembangan politik, khususnya di Eropa (Burke, 2008) dimana Romawi memberikan prinsip-prinsip hukum dan konstitusi yang kemudian berkembang menjadi bentuk kedaulatan untuk negara dan kekuasaan pemerintah (Burke, 2008).

Bentuk pemerintahan yang bersifat totalitarian tersebut berlangsung cukup lama dalam berbagai wilayah di dunia. Di Eropa, Kekaisaran Romawi berkuasa hingga abad ke 5 masehi

ketika akhirnya hancur oleh serbuan bangsa Jerman. Mengakhiri periode kekuasaan dimana Eropa tersentralisasi oleh kekuasaan Romawi yang berpusat di Roma selama hampir 5 abad. Di Timur, Tiongkok dengan Dinasti Han nya mengisi kekuasaan di wilayah Asia Timur selama kurang lebih 4 abad untuk kemudian dilanjutkan kembali dengan dinasti-dinasti lainnya, tetapi dengan bentuk pemerintahan yang kurang lebih sama yaitu bentuk totalitarian yang terpusat.

Eropa pasca Kekaisaran Romawi diisi oleh kerajaan-kerajaan kecil yang saling berkonflik satu sama lainnya. Dengan pengecualian beberapa kerajaan seperti Kekaisaran Romawi Suci (*The Holy Roman Empire*) yang juga berusaha untuk menyatukan Eropa dalam satu kekuasaan seperti pada zaman sebelumnya. Kekaisaran Romawi Suci, dan kerajaan-kerajaan lainnya di Eropa pada masa yang disebut dengan abad pertengahan ini berbagi kekuasaan dengan institusi keagamaan, yaitu gereja. Perkembangan agama Kristen yang pesat pada masa akhir Kekaisaran Romawi berdampak kepada penetapan institusi agama Kristen yang berpusat di Tahta Suci (*Holy See*) di Roma yang dipimpin oleh Paus. Ini memberikan pengaruh baru bagi konstelasi politik di Eropa pada waktu itu dimana seorang Raja yang berkuasa harus pula memperhatikan hubungannya dengan institusi gereja. Karena tanpa dukungan dari Gereja Katolik Roma, seorang raja dapat kehilangan dukungan dari rakyatnya dan dipandang tidak dapat memerintah karena telah keluar dari jalur yang direstui oleh Gereja.

Pada Abad Pertengahan, bentuk pemerintahan yang

jamak berlaku biasanya bersifat feudalisme, dimana bangsawan memperoleh hak tanah dan kekuasaan untuk wilayah yang dimilikinya dengan imbalan berupa kesetiaan, dukungan ekonomi dan militer bagi raja atau penguasa yangmemerintah. Feudalisme bersifat lokal, dalam artian hanya berlaku di dalam lingkup suatu wilayah kekuasaan yang dimiliki oleh bangsawan tertentu dan tidak bersifat meluas.

Hal tersebut berubah ketika perkembangan ekonomi semakin bersifat masif dan menjangkau wilayah yang lebih luas. Bentuk feudalisme yang bersifat lokal semakin tidak relevan dan kemudian pada akhirnya terjadilah upaya pengkonsolidasian kekuasaan yang berpusat pada pemerintahan dengan skala nasional. Agar dapat mengatur dan memanfaatkan keuntungan ekonomi yang lebih besar, maka suatu kepemerintahan nasional haruslah dibentuk agar dapat lebih efektif dan efisien dalam mengatur sumber daya dan potensi ekonomi yang ada demi keuntungan yang lebih besar (Burke, 2008). Perkembangan menuju sistem politik yang lebih terpusat dan berskala nasional pun semakin diperkuat dengan terjadinya proses reformasi agama Katolik Roma yang terjadi di Jerman di bawah pengaruh Martin Luther, dimana gerakan reformasi tersebut berupaya untuk mengurangi kontrol ketat dari Gereja Katolik Roma. Gerakan reformasi agama ini kemudian berkembang menjadi gerakan" Protestan yang kemudian berkembang. Perkembangan gerakan reformasi Protestan ini juga turut ikut serta memperkuat perkembangan sistem politik yang lebih bersifat nasional.

Pada abad ke-16, bentuk pemerintahan negara-bangsa

(*mation-state*) sudah jamak bermunculan, tumbuh dan berkembang di Eropa. Bentuk kekuasaan yang mewarnai negara-bangsa ini masih bersifat monarki absolut. Bentuk pemerintahan monarki memiliki bentuk ciri kepemerintahan yang memiliki pemimpin seorang raja dimana tampuk kekuasaan dan keberlangsungannya biasanya bersifat dinasti atau turun temurun. Monarki absolut memiliki sifat kekuasaan, baik itu eksekutif, yudikatif ataupun legislatif berada pada satu tangan, yaitu raja. Raja memegang kontrol penuh atas segala sesuatu yang berjalan dalam negara tersebut termasuk rakyat yang dipimpinnya. Prancis pada masa Louis XIV memberikan gambaran yang sangat cocok dengan bentuk kekuasaan monarki absolut. Louis XIV yang menyatakan bahwa “negara adalah saya" (“*L'etat, c'est moi*”) memberikan gambaran kepada kita bahwa sistem kekuasaan yang ada pada saat itu di Prancis bersifat sangat terpusat kepada Louis XIV.

Bentuk kekuasaan monarki absolute ini diguncang oleh semakin banyaknya golongan kelas terpelajar yang semakin menghendaki agar peran raja dalam menentukan segala sesuatu yang ada pada negara semakin dikurangi. Inggris menjadi negara yang menerapkan bentuk monarki konstitusional dimana kekuasaan tidak lagi terpusat kepada raja melainkan kepada perwakilan rakyat yang tergabung ke dalam suatu institusi yang dinamakan dengan parlemen. Bentuk monarki konstitusional tersebut sudah menggambarkan bentuk demokrasi yang terjadi pada negara di masa itu. Perkembangan selanjutnya, dimana terjadi Revolusi Amerika pada tahun 1775 dan Revolusi Prancis

pada tahun 1789 semakin memperkuat gaung demokrasi, persamaan dan liberalisme di dalam kancah perpolitikan dan para sejarahwan memilih untuk menjadikan dua peristiwa tersebut sebagai dasar bagi terbentuknya institusi negara demokrasi modern saat ini (Burke, 2008).

Seiring perkembangannya, negara tidak lagi mengurusi permasalahan yang bersifat menjaga keutuhan, keteraturan dan keamanan selayaknya fungsi negara-negara pada zaman dahulu, tetapi juga sebagai instrumen yang dapat menghadir-kan kemakmuran, keamanan dan memberikan pelayanan sosial bagi masyarakatnya (Burke, 2008). Fungsi negara pun semakin meluas dan semakin mencakup tidak hanya permasalahan yang memiliki sifat keberlangsungan negara, tetapi juga mencakup permasalahan keberlangsungan masyarakat beserta ekosistem pendukungnya sebagai bagian dari negara. Setiap negara memiliki acuan, tata aturan, dan juga pedoman dalam rangka menjalankan fungsi dan tujuannya. Acuan tersebut bernama ideologi, dan perkembangan ideologi pun berbeda-beda seiring dengan zamannya dan juga sejarah dari suatu bangsa atau negara tersebut. Sebagai contoh, abad ke 20 merupakan masa- masa pertentangan ideologi dimana terdapat tiga ideologi besar yang saling bersaing pada dekade awal abad ke 20, sekitar tahun 1920 hingga 1940an. Ideologi tersebut adalah Komunisme, Demokrasi-Liberalismme dan Fasisme. Pertentangan ideologi tersebut memuncak pada Perang Dunia II pada tahun 1939 hingga 1945 dan berakhir dengan kemenangan kubu Sekutu, menyisakan dua ideologi besar, Komunisme dan Liberalisme,

yang membawa dunia kepada babak pertentangan berikutnya, yaitu Perang Dingin yang berakhir ketika Uni Soviet, negara adidaya yang menganut ideologi Komunisme, runtuh pada akhir abad ke 20, tepatnya pada tahun 1991.

Sejarah dari ketiga ideologi tersebut memiliki akar yang berbeda-beda. Komunisme, contohnya, merupakan suatu ideologi yang menemukan momentumnya pada saat Revolusi Industri. Penggagasnya, Karl Marx, berpendapat bahwa industri yang dimiliki oleh kaum kapitalis borjuis, yang digerakkan oleh roda ekonomi berbasiskan kapitalisme, membawa kesengsaraan dan penderitaan bagi kaum buruh atau *proletariat*. Sehingga, ide Marx adalah bahwa segala moda produksi dan sumber daya haruslah dimiliki bersama di bawah suatu pimpinan kaum proletar untuk menghindari terjadinya eksploitasi yang dilakukan oleh kaum borjuis.

Fasisme memiliki bentuk perkembangan dan sejarah yang berbeda. Fasisme memiliki ide besar kebanggaan akan identitas dari suatu negara-bangsa dan bertujuan untuk mengangkat kembali kegemilangan sejarah dan kultur yang dimiliki oleh suatu negara-bangsa tersebut. Fasisme pertama kali muncul di Italia pasca Perang Dunia 1 dengan Benito Mussolini sebagai penggagasnya. Mussolini dengan fasismenya berupaya untuk menjadikan Italia sebagai negara yang terhormat pasca Perang Dunia 1 dan mengangkat kejayaan-kejayaan era Romawi Kuno sebagai salah satu caranya dalam mengingat kejayaan masa lalu. Fasisme pulalah yang kemudian dianut oleh Jerman pada era Nazi di bawah Adolf Hitler, dengan penyebutan Nazisme secara

khusus. Era fasisme sebagai salah satu ideologi yang diperhitungkan runtuh ketika ia menghadapi kekalahan pada masa Perang Dunia II.

Saat ini, globalisasi, perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi yang semakin mengeratkan hubungan antar individu, masyarakat dan komunitas di seluruh dunia membawa perubahan tidak hanya untuk negara, tetapi juga hampir semua aspek yang ada di dalamnya. Globalisasi juga memberikan jalan terhadap semakin berkembangnya demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang dianut oleh sebagian besar negara di dunia.

BAB 5 STRUKTUR SISTEM POLITIK

A. Pengertian Struktur Politik

Struktur politik berasal dari dua kata, yaitu struktur dan politik. Struktur berarti badan atau lembaga, sedangkan politik berarti urusan negara. Jadi, secara etimologis, struktur politik berarti badan atau organisasi yang berkenaan dengan urusan negara. Struktur politik adalah alokasi nilai-nilai yang bersifat otoritatif yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan. Kekuasaan berarti kapasitas dalam menggunakan wewenang, hak, dan kekuatan fisik.

Struktur politik meliputi struktur hubungan antar manusia dan struktur hubungan antara manusia dan pemerintah. Selain itu, struktur politik dapat merupakan bangunan yang konkret dan yang abstrak. Peran merupakan pola-pola perilaku yang teratur, yang ditentukan oleh harapan dan tindakan sendiri dan orang lain. Struktur senantiasa melibatkan fungsi-fungsi politik maka pendekatan yang digunakan biasa disebut sebagai struktural fungsional. Menurut Almond dan Powell Jr., struktur politik dapat dibedakan ke dalam sistem, proses, dan aspek-aspek kebijakan. Struktur sistem merujuk pada organisasi dan institusi yang memelihara atau mengubah *(maintain or change)* struktur politik.

Fungsi dari supra struktur politik dan infra struktur politik

Menurut Gabriel Almond:

1. fungsi dari lembaga suprastruktur politik adalah:
   1) *Rule Making* (membuat undang-undang). Fungsi ini dilaksanakan oleh lembaga (Badan Legislatif)

yangmeliputi DPR, DPRD I, DPRD II, dan DPD. DPD sebagai lembaga yang mewakili aspirasi ini merupakan badan baru yang dibentuk supremasi yang fungsinya berkaitan dengan kegiatan seperti pembuatan RUU tentang keseimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota.

2) *Rule Application* (melaksanakan undang-undang). Fungsiini adalah fungsi peraturan perundangan yang telahdibuat badan eksekutif pemerintahan pusat sampai kepemerintah.

3) *Rule Adjudication* (mengadili pelaksanaan badan yang memiliki fungsi yang ketiga peradilan yang meliputi Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial serta badan sampai ke daerah, seperti PN, PT.

2. Fungsi infrastruktur politik

   1) Pendidikan politik, agar rakyat bermaksimal dalam sistem politiknya.

   2) Artikulasi kepentingan adalah lembaga yang berfungsi menyampai Lembaga ini adalah meliputi antara lain,LSM, Ormas, OKP.

   3) Agregasi kepentingan adalah lembaga yang berfungsi memadukan aspirasi rakyat yang disampaikan oleh lembaga, seperti LSM, Ormas, OKP Lembaga yangmemiliki fungsi adalah lembaga partai politik.

4) Rekrutmen politik adalah lembaga yang berfungsi melakukan pemilihan pemimpin atau calon pemimpin bagi masyarakat.
5) Komunikasi politik adalah kegiatan yang berguna untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat,baik pikiran intra golongan, institut, asosiasi, maupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor pemerintahan".

Menurut Almond, "semua sistem politik memiliki persamaan karena sifat universalitas dari struktur dan fungsi politik. Mengenai fungsi politik ini, terbagi menjadi dua jenis, yaitu fungsi *input* dan *output*. Termasuk dalam kategori fungsi *input* adalah sosialisasi politik dan rekruitmen politik, artikulasi kepentingan, agregasi kepentingan, dan komunikasi politik. Sedangkan fungsi *output* terdiri dari pembuatan aturan, pelaksanaan aturan, dan peradilan dari pelaksanaan aturan".

Selanjutnya, jika struktur proses dapat dipahami sebagai bagian dari isi kebijakan-kebijakan publik yang spesifik atau, setidaknya, seolah-olah fungsi-fungsi proses dilakukan oleh struktur-struktur yang sama untuk semua kebijakan, struktur kebijakan lebih pada kebijakan-kebijakan spesifik, seperti kebijakan pertahanan, kebijakan pangan, dan sebagainya.

Almond dan Coleman membedakan struktur politik atas infrastruktur yang terdiri atas struktur politik masyarakat, suasana kehidupan politik masyarakat, dan sektor politik masyarakat; dan suprastruktur politik yang terdiri atas sektor

pemerintahan, suasa na pemerintahan, dan sektor politik pemerintahan.

Dalam kehidupan politik demokratis, struktur politik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang bersifat formal dan informal. Struktur formal merupakan mesin politik yang dengan abash mengidentifikasi segala masalah, menentukan dan melaksanakan segala keputusan yang mempunyai kekuatan mengikat pada seluruh masyarakat, sedangkan struktur informal merupakan struktur yang mampu memengaruhi cara kerja aparat masyarakat untuk mengemukakan, menyalurkan, menerjemahkan, mengonversikan tuntutan, dukungan, dan masalah tertentu yang berhubungan dengan kepentingan umum. Termasuk dalam struktur informal adalah partai politik, kelompok kepentingan, media massa, *opinion leaders*, dan sebagainya.

Struktur politik sebagai satu spesies struktur pada umumnya, selalu berkenaan dengan alokasi-alokasi nilai yang bersifat otoritatif, yaitu yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan. Bertrand Russel mengatakan bahwa kekuasaan adalah konsep yang mendasar dalam ilmu sosial, seperti halnya energi dalam konsep ilmu alam. Menurut Muhtar Afandi, kekuasaan adalah kapasitas, kapabilitas, atau kemampuan untuk memengaruhi, meyakinkan, mengendalikan, menguasai, dan memerintah orang lain. Kekuasaan adalah sebuah kapasitas; kapabilitas atau kemampuan untuk memengaruhi, meyakinkan, mengen dalikan, menguasai, dan memerintah orang lain. Kapasitas

demikian erat hubungannya dengan wewenang (*authority)* hak *(right),* dan kekuatan *(force, naked power).*

Kekuasaan merupakan fokus inti dari politik. Adapun fokus utama politik adalah keputusan (Morton R. Davis). Keputusan yang dimaksud adalah keputusan yang menyangkut kepentingan keseluruhan masyarakat dan bersifat dapat dipaksakan berlakunya.

B. Struktur Politik Formal

Dalam sistem politik, struktur dibedakan atas kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini menurut ajaran *trias politica,* meskipun tidak banyak negara manerapkan ajaran ini secara murni. Dalam perkembangannya, negara-negara demokrasi modern cenderung menggunakan asas pembagian kekuasaan dibandingkan dengan menggunakan asas pemisahan kekuasaan murni sebagaimana diajarkan oleh John Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1755). Menurut John Locke, kekua saan negara dibagi menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, ke kuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Masing-masing ke kuasaan ini terpisah satu dengan yang lain. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan membuat peraturan dan undang-undang, sedangkan kekuasaan eksekutif merupakan kekuasaan melaksanakan undang-undang, termasuk di dalamnya kekuasaan mengadili. Sementara itu, kekuasaan federatif merupakan kekuasaan yang meliputi segala tindakan yang ditujukan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungannya dengan negara lain, seperti membuat aliansi dan sebagainya.

Montesquieu menyempurnakan ajaran *trias politica* ini dengan membagi kekuasaan pemerintahan menjadi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif melaksanakan undang-undang, dan kekuasaan yudikatif merupakan kekua saan yang mempunyai kewenangan untuk mengadili pelanggaran undang-undang.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi negara tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa kekuasaan negara disusun atas ajaran *trias politica.* Namun, apabila dilihat secara saksama, ajaran *trias politica* ini menjadi dasar bagi pembagian kekuasaan di Indonesia. Dalam hal ini, kekuasaan negara dibagi secara seimbang dan adanya *checks and balances. Checks and balances* di antara penyelenggara negara ini dimanifestasikan dalam wujud:

1. pembuatan undang-undang yang memerlukan persetujuan DPR, DPD, dan presiden yang masing-masing mempunyai kewenangan *veto;*
2. pengawasan dan *impeachment* oleh lembaga-lembaga legislative terhadap presiden;
3. *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi terhadap undangundang dan produk di bawahnya;
4. daerah otonom yang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan pusat;
5. pengangkatan menteri yang memerlukan pertimbangan DPR.

1. Pemerintahan dan Birokrasi

   Dalam sistem politik, pemerintahan dan birokrasi merupakan

struktur politik penting karena menyangkut pembuat an kebijakan dan implementasi kebijakan. Menurut Almond dan Powell, Jr., agenagen pemerintahan meskipun terspesialisasi dalam banyak cara adalah multifungsional. Agen-agen eksekutif membuat kebijakan, memperkuat dan mengambil keputusan-keputusan; agen-agen legislatif berpartisipasi dalam implementasi kebijakan seperti halnya partisipasi yang mereka lakukan dalam membuat kebijakan.

Lembaga pemerintahan didukung oleh para eksekutif politik *(political executive),* yang mempunyai banyak nama dan *title.* Beberapa eksekutif disebut sebagai presiden, tetapi berbeda dalam hal kekuasaan yang mungkin mereka laksanakan dan fungsi-fungsi yang mereka tampilkan. Sementara yang lainnya disebut sebagai perdana menteri. Eksekutif politik juga mempunyai nama kolektif, seperti kabinet, dewan menteri, politbiro atau presidium. Di banyak negara, eksekutif politik ini mempunyai nama-nama yang berbeda, tetapi peran dan fungsinya kurang lebih sama.

Indonesia, setelah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan setelah mengalami amandemen, menganut sistem pemerintahan presidensial, yaitu presiden dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa lima tahun.

2. Lembaga Legislatif

Pada masa Orde Baru, lembaga legislatif sering dianggap sebagai Lembaga yang tugasnya hanya mengesahkan kebijakankebijakan dikeluarkan oleh lembaga eksekutif. Otoritarianisme politik yang dilaksanakan oleh

Soeharto telah memandulkan Lembaga legislatif ini dalam melaksanakan fungsinya untuk melakukan pengawasan *(checks and balances)* terhadap lembaga eksekutif.

Sementara itu, kuatnya hegemoni partai pemerintah, Golkar, dalam sistem politik di Indonesia membuat lembaga perwakilan rakyat yang harusnya melakukan pengawasan terhadap pemerintah ini menjadi mandul. Reformasi telah membawa banyak perubahan terhadap Lembaga legislatif ini. Jika sebelumnya DPR hanya diisi oleh wakil-wakil dari tiga partai politik, pada masa reformasi setidaknya terdapat lima partai politik besar yang mempunyai wakilnya di DPR.

3. Lembaga Peradilan

Pilar ketiga pembagian politik menurut ajaran *trias politica* adalah lembaga yudikatif. Dalam sistem politik demokrasi, peran lembaga semacam ini sangat krusial karena mempunyai kewenangan dalam mengatasi banyak persoalan yang melibatkan lembagalembaga negara. Pada masa reformasi, berdasarkan UUD 1945 yang telah diamandemen, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum keadilan (Pasal 24 ayat (1)). Kemudian, ayat (2) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

C. Struktur Politik Informal

1. Partai-Partai Politik

Partai politik telah menjadi ciri penting politik modern, bahkan menjadi bagian tidak terpisahkan dari sistem politik, baik yang demokratis maupun yang otoriter sekalipun. Dalam hal ini, partai politik mengorganisasi partisipasi politik, dan sistem kepartaian akan sangat memengaruhi batas-batas sampai di mana partisipasi tersebut dapat diperluas. Menurut Huntington, stabilitas, kekokohan par tai, dan sistem kepartaian sangat bergantung pada tingkat pelembagaan dan partisipasinya. Partisipasi yang luas yang disertai dengan tingkat rendah pelembagaan partai politik akan menghasilkan politik anomik dan kekerasan. Huntington menegaskan bahwa partisipasi tanpa organisasi akan merosot menjadi gerakan massal, sementara organisasi yang tidak melahirkan partisipasi cenderung mengarah menjadi klik personal.

Dalam sistem politik demokrasi, partai politik biasanya melaksanakan empat fungsi berikut.

1) Sarana komunikasi politik. Satu di antara sekian banyak tugas partai politik adalah menyalurkan berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat. Partai politik harus responsive terhadap tuntutan-tuntutan masyarakat untuk kemudian disalurkan pada sistem politik melalui agregasi dan artikulasi kepentingan. Di pihak lain, partai politik juga

melakukan diskusi dan penyebarluasan atas berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah

2) Sarana sosialisasi politik. Partai politik merupakan kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuannya adalah meraih kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Itulah sebabnya hampir setiap partai politik mempunyai ideologi, cita-cita,yang selanjutnya diimplementasikan dalam bentuk program kerja. Program-program kerja inilah yang ditawarkan kepada masyarakat agar mendukungnya dalam pemilihan umum. Dalam kaitan ini, partai politik membantu sistem politik dalam menyosialisasikan sistem politik dan mendidik anggotaanggotanya menjadi manusia yang sadar dan bertanggung jawab terhadap kepentingan sendiri dan kepentingan nasional.

3) Sarana rekrutmen politik. Tujuan partai politik adalah meraih kekuasaan. Untuk itu, dilakukan rekrutmen terhadap pemimpinpemimpin politik yang mampu menopang kekuasa an yang mereka raih.

4) Sarana pengatur konflik. Partai politik berperan dalam menjembatani berbagai konflik kepentingan yang ada dalam masyarakat untuk selanjutnya disalurkan dalam system politik. Kestabilan partai

politik sangat menentukan tingkat pelembagaan partisipasi dan dengan demikian kemampuan partai politik dalam melakukan manajemen konflik.

2. Struktur Polituk Informal di Luar Partai Politik

   Struktur-struktur politik informal, seperti media massa, kelompok berbasis agama, LSM atau NGO, dan asosiasi profesi telah menunjukkan eksistensinya dalam sistem politik setelah selama lebih kurang 32 tahun ditekan oleh pemerintah. Bahkan, struktur-struktur politik informal tersebut memainkan peran penting dalam melakukan artikulasi kepentingan dan memberikan input yang berharga bagi sistem politik ketika struktur politik formal mengalami kemandegan dan gagal memainkan fungsi yang seharuskan mereka laksanakan. Dengan kata lain, ketika partai politik gagal melaksanakan fungsinya dalam meng galang dan melembagakan partisipasi politik, kelompok-kelompok informal ini menggantikan peran partai politik dengan memobilisasi dukungan dan terlibat aktif dalam memengaruhi kebijakan-kebijakan publik. Dalam kaitan ini, terdapat banyak kebijakan pemerintah yang akhirnya urung dilaksanakan akibat tekanan yang terus-menerus dari struktur-struktur informal ini. Media massa, misalnya, telah memainkan peran dalam melakukan sosialisasi politik dan komunikasi politik. Kemampuannya dalam menggalang opini publik telah membuatnya menjadi kekuatan demokrasi yang penting dalam beberapa tahun belakangan.

D. Pendekatan Sistem Politik

Sistem politik merupakan mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang menunjukkan proses yang langgeng *(persistent pattern).* Proses tersebut mengandung dimensi waktu (masa lampau, kini, dan mendatang). Dari sudut ini terlihat bahwa sistem politik merupakan bagian sistem yang lebih besar, yaitu sistem sosial. Oleh karena itu, dapat dimengerti apabila dalam analisis sistem *(system analysis)*, teori sistem *(theory system),* dan pendekatan sistem *(system approach),* pengertian sistem politik, kultur politik, peranan politik dibahas lebih mendalam dengan dibantu oleh dan meminjam pengertian sosiologi dan psikologi.

Almond dan Powell menguraikan bahwa pengertian dan pendekatan sistem politik dapat digolongkan dalam tiga bagian, yaitu sebagai berikut.

1. Pendekatan Tradisional

Pendekatan tradisional, yaitu pendekatan sistem politik yang memandang lembaga pemerintahan, kekuasaan, dan keyakinan politik sebagai dasar analisis sistem politik. Tokoh dalam pendekatan ini, antara lain Leo Strauss dan John Hallowell. Tokoh ini menentang pendekatan Behavioralis (perilaku). Alasannya karena terlalu lepas dari nilai dan tidak menjawab pertanyaan "Sistem politik apakah yang paling baik atau masyarakat yang bagaimanakah yang sebaiknya dituju?" Tokoh ini juga memiliki anggapan bahwa pendekatan perilaku

(behavioralis) tidak relevan dengan politik praktis dan menutup mata terhadap masalah sosial yang ada.

Pendekatan ini memiliki asumsi berikut.

1) Kerangka perbandingan sistem politik bersifat sempit, dalamarti cenderung dipengaruhi oleh konsep hukum, ideologi, dan lembaga pemerintah.
2) Memfokuskan perhatian pada pembentukan lembaga (struktur politik), kekuasaan, dan keyakinan politik.
3) Berpedoman pada nilai dan norma serta tradisi yang berlaku di masyarakat (bersifat pragmatis dan domatis).
4) Mengacu pada filsafat *(das sollen).*
5) Mengacu pada ilm terapan (praktis).
6) Konsep pemikiran lebih banyak dipengaruhi oleh konsep sejarah dan hukum (historis dan yuridis).
7) Analisis lebih banyak mengacu pada metode kualitatif.

2. Pendekatan Behavioralisme (Pendekatan Perilaku)

Pendekatan ini sangat dipengaruhi oleh sistem analisis *behavioralis* (sistem analisis perilaku). Dalam arti unit analisisnya lebih didasarkan pada pernyataan, sikap dan perilaku individu, organisasi dan lembaga pemerintahan yang sedang berjalan. Pendekatan ini lebih bertitik tolak pada teori sistem, yaitu dengan mengikutsertakan kenyataan (termasuk kenyataan

lingkungan). Pengaruh para sarjana, seperti Max Weber dan Talcott Parsons menumbuhkan pendekatan baru yang berusaha menguraikan, menjelaskan, dan membuktikan macam-macam fenomena politik atas dasar susunan pengetahuan yang lebih "dirasakan" ilmiah dan teratur Pendekatan baru tersebut bernama pendekatan keperilakuan *(behavioral approach),* sedangkan alirannya disebut aliran keperilakuan *(behavioralisme).* Perkembangan pendekatan perilaku ini bersamaan dengan pendekatan fungsional struktural *(structural-functional approach)* dan pendekatan analisis sistem *(sistems analysis approach)* sehingga ketiganya sering disejajarkan walaupun untuk hal-hal2tertentu terdapat perbedaan (Morton R. Davis).

Sejarah dan prinsip timbulnya pendekatan ini adalah:

1) muncul pada pascaperang dunia II (pada dekade tahun 1950-an);
2) merupakan gerakan pembaharuan dalam ilmu politik;
3) sistem analisis dalam pendekatan ini adalah *Structural and Functional Analysis* (G.A. Almond). Artinya pendekatan ini mengacu pada struktur dan fungsi suatu lembaga pemerintah dan masyarakat dengan berpedoman pada realitas, fakta yang sedang terjadi;

4) memfokuskan perhatian pada “Analisis tingkah laku politik” dan “bukan pada lembaga, kekuasaan, dan keyakinan politik”;
5) berpedoman pada fakta yang berlaku di masyarakat (bersifat struktur dan fungsi);
6) mengacu pada penelitian empiris *(das sain);*
7) mengacu pada ilmu murni (teoretis);
8) konsep pemikiran lebih banyak dipengaruhi oleh konsep sosiologis dan psikologis;
9) analisis lebih banyak mengacu pada metode kuantitatif;
10) memiliki arah studi yang lebih cenderung bersifat luas, yaitu mengupas soal struktur dan fungsi (proses politik) dalam pembuatan kebijaksanaan *(policy making).*

3. Pendekatan Pascaperilaku (Post Behavioralis)

Pendekatan ini adalah pendekatan yang memiliki anggapan bahwa manusia adalah makhluk yang kreatif. Selanjutnya, pendekatan-pendekatan kelakuan, struktural-fungsional dan analisis sistem dalam menekuni mencari dasar ilmu pengetahuan yang empiris, kurang memerhatikan faktor penglihatan ke depan *(vision)* dan daya khayal *(imagination)* yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah-masalah sosial politik yang gawat dan perlu dengan segera diatasi (Miriam Budiardjo).

Pendekatan pascaperilaku *(post behavioral)* ini timbul sebagai reaksi terhadap aliran perilaku

(behavioralism) karena menurut aliran pascaperilaku, aliran perilaku sering melupakan nilai manusiawi. Prinsip-prinsip yang utama dalam pendekatan *post behavioralisme* (pascaperilaku) ini adalah:

1) Fokus utama pendekatan ini lebih bersifat proaktif, kreatif, *imagination*, dan *vision;*
2) memiliki tujuan ingin mengubah pendidikan dan metode penelitian ilmu politik menjadi ilmu pengetahuan yang murni (eksakta) dan metode kuantitatif;
3) mengutamakan penelitian yang bersifat korelatif daripada penelitian yang cermat;
4) menginginkan ilmu politik tidak kehilangan kontak dengan realitas sosial, bahkan ilmu politik merasa harus melibatkan diri dalam usaha mengatasi krisis yang dihadapi manusia;
5) menginginkan nilai sebagai fokus penelitian ilmu politik

E. Kapabilitas Sistem Politik

Suatu sistem politik harus selalu mempunyai kapabilitas dalam menghadapi kenyataan dan tantangan terhadapnya. Kapabilitas adalah kemampuan sistem politik dalam bidang ekstraktif, distributif, regulatif, simbolik, responsif, dan dalam negeri dan internasional untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana yang termaksud dalam pembukaan UUD 1945. Kapabilitas sistem adalah kemampuan sistem

untuk menghadapi kenyataan dan tantangan. Pandangan mengenai keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini berbeda di antara para pakar politik.

Kapabilitas menurut Almond, adalah "sistem politik merupakan kemampuan sistem politik dalam mengatasi pengaruh lingkungan dalam ataupun lingkungan luar terhadap dirinya" Menurut pendapat yang disampaikan oleh Almond " terdapat enam hal untuk menentukan kapabilitas suatu sistem politik, diantaranya:

1) Kapabilitas ekstraktif,

    kemampuan sistem politik untuk melakukan eksplorasi potensi yang ada pada sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kapa bilitas ini merupakan masalah yang sama yang dihadapi oleh sistem politik liberal, system politik demokrasi terpimpin, dan sistem politik demokrasi Pancasila. Kapabilitas Ekestraktir adalah usaha untuk mengumpulkan dan mengolah sumber-sumber material yang berasal dari pengaruh *input dan output* lingkungan atau sumber-sumber alami dan manusiawi. Kapabilitas Ekstraktir berkaitan dengan peluang dalam mencapai tujuan yang dimiliki suatu sistem politik. Hal ini terkait dengan pengukuran sumber yang masuk kedalam suatu sistem politik. Salah satu contohnya, misalnya pendapatan daerah, kekayaan alam, jumlah penduduk, dan sarana untuk mencapai kemampuan.

    Dalam konteks kekinian, kemampuan ekstraktif

system politik dalam pengelolaan sumber-sumber material belum mampu mengolah sumber daya alam untuk menyejahterakan rakyatnya

2) Kapabilitas distributif,

kapabilitas sistem politik dalam mengelola dan mendistribusikan sumber daya alam dan sumber daya manusia berupa barang, jasa, kesempatan kerja, bahkan kehormatan dapat diberi predikat sebagai prestasi real system tingkat pentingnya barang yang didistribusikan. Status, kehormatan, dan kepahlawanan juga merupakan benda-benda abstrak yang didistribusikan menurut pola *merit sistem* ataupun *spoil sistem* yang diyakini oleh sistem politik yang bersangkutan. Kapabilitas distributif adalah kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan dan mendistribusikan SDA dan SDM berupa barang dan jasa yang dimiliki oleh masyarakat dan negara secara merata. Contohnya, alokasi barang, jasa, kehormatan, status dan kesempatan kerja. Tinggi rendahnya suatu kapabilitas distributif ditentukan dari kuantitas, nilai, aspek-aspek kehidupan manusia yang mendapat pengaruh positif dari adanya distributif.

Dalam konteks kekinian, kemampuan distributif berkaitandengan alokasi barang dan jasa, kemampuan sistem politik dalam mendistribusikan barang dan jasa belum maksimal karena masih banyak kesenjangan antara masyarakat kota dan masyarakat perdesaan

3) Kapabilitas regulative,

Kapabilitas system politik untuk menyusun peraturan perundangan mengawasi, mengatur, dan mengendalikan. Regulatif adalah kemampuan pemerintah untuk membuat aturan-aturan yang dapat mengontrol dan mengendalikan perilaku individu atau kelompok agar sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Gabriel Almond beranggapan bahwa kapabilitas regulatif sama penerapan dengan pengaturan yang merujuk pada aliran kontrol atas perilaku individu dan relasi-relasi kelompok dalam sistem politik.

kemampuan sistem politik untuk mengendalikan atau mengatur tingkah laku dari setiap individu atau kelompok yang ada dalam sistem politik. Kapabilitas Regulatif dapat dilakukan dengan cara Dalam menyelenggarakan pengawasan tingkah laku individu dan kelompok dibutuhkan adanya pengaturan, dan negara memainkan peranan penting dalam mengatur dan menjamin hak-hak individu dan kelompok. Dalam konteks kekinian, kemampuan regulatif adalah kemampuan yang sangat kritis terjadi di negara ini. Mengapa tidak? Regulasi hadir sebagai pengontrol dan pengendali tingkah laku dalam berjalannya sistem politik. Menjadi ironi ketika para pembuat regulasi justru melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri, bahkan cenderung "membentengi" diri melalui peraturan yang dibuatnya. DPR misalnya, yang merupakan pembuat undang-undang, justru sering melanggarnya.

4) Kapabilitas Simbolis

Kapasitas Simbolis adalah usaha dalam meningkatkan kepercayaan lingkungan terhadap simbol tertentu yang mencakup nilai-nilai yang dianut pemimpin, hari besar nasional, upacara militer maupun kunjungan kenegaraan. Rendahnya kepercayaan lingkungan terhadap bagian-bagian tersebut dapat menimbulkan kritik terhadap pemerintah atau pejabat negara. Pada kondisi kritis inilah pemerintah dapat melakukan pameran kekuatan dan kekuasaan

5) Kapabilitas Responsif

Kapabilitas Responsif adalah kemampuan sistem politik dalam menanggapi tuntutan, tekanan, maupun dukungan yang berasal dari lingkungan maupun dari luar. Kemampuan sistem politik ini akan membawa pengaruh terhadap kapabilitas responsifnya. Semakin tinggi tingkat kepekaan suatu sistem politik terhadap tuntutan, tekanan, dan dukungan tersebut semakin baik juga kapabilitas responsifnya. Hal ini dapat dilihat dari keterkaitan hubungan antara *input* dari masyarakat dengan *output* yakni kebijaksanaan dari sistem politik,

6) Kapabilitas Domestik dan Internasional

Kapabilitas Domestik meliputi aktivitas atau perilaku yang berhubungan dengan perdagangan internasional, penetrasi politik ke negara lain, misalnya lobi politik Yahudi di Amerika, IMF, pinjaman luar

negeri".

KELOMPOK 6 PROSES POLITIK INDONESIA

PENGERTIAN DEMOKRASI

Demokrasi adalah sebuah sistem untuk tatanan aktivitas masyarakat dan negara. Sistem pemerintahan demokrasi ini menganut kedaulatan di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di Indonesia, terjadi beberapa kali perubahan sistem politik seperti demokrasi Pancasila, demokrasi konstitusional (demokrasi liberal), dan demokrasi terpimpin.

A. Pengertian Demokrasi Liberal

Demokrasi liberal adalah suatu demokrasi yang menempatkan badan legislatif lebih tinggi dari badan eksekutif.

Demokrasi liberal memakai sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan di bidang politik. Demokrasi ini mengedepankan kebebasan dan individualisme.

Jadi, dalam demokrasi liberal berupaya mengurangi kesenjangan dalam bidang ekonomi. Selain itu, rakyat dianggap mempunyai derajat dan hak yang sama. Ciri Ciri Demokrasi Liberal Ciri khas demokrasi liberal yaitu kekuasaan pemerintah dibatasi konstitusi, sehingga tidak diperkenankan campur tangan dan bertindak sewenang pada rakyat. Contoh demokrasi liberal yaitu munculnya partai politik baru sebelum pemilu diadakan.

Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah Presiden bisa dan berhak membubarkan DPR Perdana menteri diangkat oleh presiden Peristiwa Demokrasi Liberal Demokrasi Liberal di

Indonesia terjadi dari tahun 1950 sampai 1959. Ada tujuh kabinet dalam demokrasi parlementer yaitu kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, kabinet Wilopo, kabinet Ali Sastroamijoyo, kabinet Burhanuddin Harahap, kabinet Burhanuddin Harahap, kabinet Ali Sastroamijoyo II, dan kabinet Djuanda.

1. Kabinet

1) Kabinet Natsir (September 1950 - Maret 1951).

Kabinet Natsir merupakan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammad Natsir dari Partai Masyumi. Kabinet ini dibentuk pada 6 September 1950 dan didemisionerkan pada tanggal 21 Maret 1951. Program kerja kabinet Natsir:

a) Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante
b) Menyempurnakan susunan pemerintahan dan membentuk kelengkapan negara
c) Menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketenteraman
d) Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat
e) Menyempurnakan organisasi angkatan perang
f) Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat

Hasil kerja kabinet ini yaitu berlangsungnya perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat. Sementara kendala atau masalah yang dihadapi yaitu upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan

buntu (kegagalan) dan timbul masalah keamanan dalam negeri berupa pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti gerakan DI/TII, gerakan Andi Azis, gerakan APRA, dan gerakan RMS.

Kabinet Natsir jatuh pada 21 Maret 1951 dalam periode 6,5 bulan dan belum sempat melaksanakan program-programnya. Jatuhnya kabinet ini karena adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disetujui parlemen sehingga Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden.

Dalam program Kabinet Natsir, kemudian diterapkan Program Benteng yang didasari oleh gagasan pentingnya mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Program Benteng resmi berjalan selama tiga tahun (1950–1953) dengan tiga kabinet berbeda (Natsir, Sukiman, dan Wilopo).

2) Kabinet Sukiman (April 1951 - Februari 1952).

Kabinet ini merupakan kabinet kedua pada Era Demokrasi Parlementer. Kabinet ini bertugas pada masa bakti 27 April 1951 hingga 3 April 1952, tetapi telah didemosioner sejak 23 Februari 1952. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi antara Masyumi dan PNI. Program kerja kabinet Sukiman:

a) Menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketenteraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara
b) Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk meningkatkan kehidupan sosial dan perekonomian rakyat serta memperbaharui hukum agraria sesuai dengan kepentingan petani
c) Mempercepat usaha penempatan mantan pejuang dalam lapangan pembangunan
d) Mempercepat dan menyelesaikan persiapan pemilihan umum untuk membentuk dewan konstituante dan menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu yang singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah
e) Menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama (collective arbeidsovereenkomst), penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian perburuhan
f) Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta menuju perdamaian dunia, menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dengan Belanda yang sebelumnya berdasarkan asas unie-statuut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa, mempercepat peninjauan kembali persetujuan hasil Konferensi Meja Bundar, serta meniadakan perjanjian-perjanjian yang pada kenyataannya merugikan rakyat dan negara

g) Memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya

Hasil dari program kerja ini tidak terlalu berarti sebab programnya melanjutkan program Natsir, hanya saja terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya, seperti awalnya program menggiatkan usaha keamanan dan ketenteraman namun selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketenteraman. Beberapa kendala atau masalah yang dihadapi, di antaranya:

a) adanya Pertukaran Nota Keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Soebadjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cockran mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA) . Dimana di dalam MSA terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri RI karena RI diwajibkan untuk memperhatikan kepentingan Amerika.
b) adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah.
c) masalah Irian Barat belum juga teratasi
d) hubungan Sukirman dengan militer kurang baik, ditunjukkan dengan kurang tegasnya tindakan pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi.

Kabinet Sukiman tidak mampu bertahan lama dan jatuh

pada bulan Februari 1952. Penyebab jatuhnya kabinet ini disebabkan oleh adanya kegagalan dalam pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Achmad Soebardjo dan Duta Besar AS Merle Cochran. Kesepakatan bantuan ekonomi dan militer dari AS kepada Indonesia didasarkan pada ikatan Mutual Security Act (MSA). DI dalam MSA, terdapat pembatasan terhadap kebebasan politik luar negeri yang bebas aktif. Indonesia diwajibkan lebih memperhatikan Amerika sehingga tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negeri yang bebas aktif dan dianggap lebih condong ke blok Barat. Di samping itu, penyebab lainnya adalah semakin merebaknya korupsi di kalangan birokrat dan gagalnya Kabinet Sukiman dalam menyelesaikan masalah Irian Barat.

3) **Kabinet Wilopo (April 1952 - Juni 1953).**

Program kerja kabinet Wilopo:

a) Mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan umum
b) Berupaya untuk mengembalikan Irian Barat agar kembali menjadi wilayah Republik Indonesia
c) Meningkatkan keamanan dan kesejahteraan
d) Memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran
e) Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif

Kabinet Wilopo banyak mengalami kesulitan, yaitu:

a) Mengatasi gerakan separatisme yang terjadi di berbagai daerah

b) Penekanan Presiden Soekarno yang dilakukan oleh sejumlah perwira Angkatan Darat pada tanggal 17 Oktober 1952 agar parlemen dibubarkan
c) Kejadian Tangjung Morawa yang terjadi di Sumatra Utara. Peristiwa Tanjung Morawa terjadi akibat persetujuan pemerintah sesuai dengan KMB agar memberikan izin kepada pengusaha asing agar dapat mengusahakan tanah perkebunan di Indonesia lagi. Tanah ini sebelumnya digarap oleh para pertani karena bertahun tahun telah ditinggalkan oleh pemiliknya pada saat Kabinet Sukiman. Saat itu juga Mr. Iskaq Cokroadisuryo selaku menteri dalam negeri memberikan persetujuan agar tanah Deli dikembalikan. Tanah tersebut berhasil dikembalikan saat masa Kebinet Wilopo. Kemudian pada tanggal 16 Maret 1953, pihak polisi mengusir penggarap sawah yang tidak mempunyai izin. Akibat pengusiran tersebut, banyak terjadi bentrokan bersenjata yang menewaskan 5 orang petani. Peristiwa bentrokan itu mendapatkan sorotan yang tajam dari pihak parlemen maupun pers. Hal inilah yang tentunya menjadi penyebab jatuhnya kabinet wilopo. Akibatnya Kabinet Wilopo memperoleh mosi tidak percaya dari Sidik Kertapati dari Serikat Tani Indonesia atau Sakti. Lalu Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 2 Juni 1953.

Kabinet Wilopo harus mengakhiri masa tugas karena

tidak berhasil menyelesaikan masalah peristiwa 17 oktober 1952. Peristiwa itu dipicu oleh adanya gerakan yang diprakarsai oleh sejumlah perwira angkatan darat yang tidak puas terhadap kebijakan pemerintah. Mereka menghendaki agar Presiden Sukarno membubarkan parlemen.

4) Kabinet Ali Sastroamijoyo I (Juli 1953 – Agustus 1955).

Program kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo I yang disebut juga Ali-Wongsonegoro:

a) Menumpas pemberontakan DI/TII di berbagai daerah
b) Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta melaksanakan pemilihan umum
c) Memperjuangkan kembalinya Irian Barat kepada RI
d) Menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika
e) Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB
f) Penyelesaian pertikaian politik

Pada masa kabinet Ali-Wongsonegoro, gangguan keamanan makin meningkat, antara lain munculnya pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Daud Beureuh Aceh, dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan. Meskipun dihinggapi berbagai kesulitan, kabinet Ali-Wongsonegoro berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Oleh karena itu, kabinet Ali-Wongsonegoro ikut terangkat namanya. Selain berhasil menyelenggarakan Konfereni Asia Afrika, pada masa

ini juga terjadi persiapan pemilu untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955. Kabinet Ali-Wongsonegoro akhirnya jatuh pada bulan Juli 1955 dalam usia 2 tahun (usia terpanjang). Penyebab jatuhnya kabinet Ali-Wongsonegoro adalah perselisihan pendapat antara TNI-AD dan pemerintah tentang tata cara pengangkatan Kepala Staf TNI-AD.

Pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastroamidjojo I, diselenggarakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 18-25 April 1955. Konferensi ini dihadiri 29 negara Asia dan Afrika yang kemudian membawa pengaruh penting bagi terbentuknya solidaritas dan perjuangan kemerdekaan dari bangsa-bangsa Asia-Afrika. Pemilihan umum pertama yang diselenggarakan pada 1955 juga merupakan rancangan kabinet ini, tetapi pelaksanaannya kemudian dilanjutkan oleh kabinet berikutnya.

5) **Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955 - Maret 1956)**

Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap dari Masyumi serta Wakil Perdana Menteri yaitu R. Djanu Ismadi dari PIR-Hazairin dan Harsono Tjokroaminoto dari PSII. Presiden Soekarno sebenarnya kurang merestui kabinet ini karena yang menunjuk Burhanuddin Harahap sebagai kepala pemerintahan kabinet ini adalah Wakil Presiden Mohammad Hatta. Program kerja Kabinet

Burhanuddin Harahap yaitu

a) mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah;
b) melaksanakan pemilihan umum, desentralisasi, memecahkan masalah inflasi, dan pemberantasan korupsi; serta
c) memperjuangkan pengembalian Irian Barat.

Keberhasilan kabinet ini di antaranya mengadakan perbaikan ekonomi, termasuk mengendalikan harga dengan menjaga agar tidak terjadi inflasi dan sebagainya. Dalam masalah ekonomi, kabinet ini telah berhasil cukup baik. Dapat dikatakan bahwa kehidupan rakyat semasa kabinet ini cukup makmur karena harga-harga barang kebutuhan pokok tidak melonjak naik akibat inflasi. Dalam periode kabinet ini, pemilihan umum pertama tahun 1955 dilaksanakan untuk memilih anggota-anggota DPR. Selain itu, kabinet ini juga mengembalikan wibawa pemerintah Republik Indonesia di mata pihak Angkatan Darat.

Kabinet ini jatuh tidak diakibatkan oleh keretakan di dalam tubuh kabinet, juga bukan karena dijatuhkan oleh kelompok oposisi yang mencetuskan mosi tidak percaya dari parlemen, tetapi karena merasa tugasnya sudah selesai. Pada tanggal 2 Maret 1956 pukul 10.00 siang, Kabinet Burhanuddin Harahap mengundurkan diri, sekaligus menyerahkan mandatnya kepada Presiden

untuk dibentuk kabinet baru berdasarkan hasil pemilihan umum. Kabinet ini terus bekerja sebagai kabinet demisioner selama 20 hari sampai terbentuknya kabinet baru yakni Kabinet Ali–Roem–Idham yang dilantik tanggal 24 Maret 1956 dan serah terima dengan Kabinet Burhanuddin Harahap dilakukan tanggal 26 Maret 1956.

6) Kabinet Ali Sastroamijoyo II (Maret 1956 - Maret 1957).

Kabinet Ali Sastroamidjojo II disebut pula Kabinet Ali–Roem–Idham karena dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dari PNI beserta dua Wakil Perdana Menteri yakni Mohamad Roem dari Masyumi dan Idham Chalid dari NU. Program pokok kabinet ini adalah pembatalan Konferensi Meja Bundar, pemulihan keamanan dan ketertiban, dan melaksanakan keputusan Konferensi Asia–Afrika. Program kerjanya disebut rencana pembangunan lima tahun yang memuat program jangka panjang, yaitu

a) menyelesaikan pembatalan hasil Konferensi Meja Bundar;
b) menyelesaikan masalah Irian Barat;
c) membentuk Provinsi Irian Barat;
d) menjalankan politik luar negeri bebas aktif;
e) membentuk daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD;
f) mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai;
g) menyehatkan keseimbangan keuangan negara; dan

1) mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.

Kerja Kabinet Ali Sastroamidjojo II mendapat dukungan penuh dari presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment, yang hasilnya adalah pembatalan seluruh perjanjian KMB. Kabinet ini pun berumur tidak lebih dari satu tahun dan akhirnya digantikan oleh Kabinet Djuanda karena mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi yang membuat kabinet hasil Pemilu I ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada Presiden.

7) Kabinet Juanda (Maret 1957 - Juli 1959).

Kabinet Djuanda atau juga disebut Kabinet Karya dipimpin oleh Perdana Menteri Djoeanda Kartawidjaja dari PNI, beserta tiga orang Wakil Perdana Menteri yaitu Hardi dari PNI, Idham Chalid dari NU, serta Johannes Leimena dari Parkindo. Kabinet ini memiliki 5 program yang disebut Pancakarya yaitu

a) membentuk Dewan Nasional,
b) menormalisasi keadaan Republik Indonesia,
c) melanjutkan pembatalan Konferensi Meja Bundar,
d) memperjuangkan Irian Barat, dan
e) mempercepat pembangunan.

2. Hubungan Pusat dan Daerah

Silih bergantinya kabinet dalam waktu yang relatif singkat menyebabkan ketidakpuasan pemerintahan daerah. Karena

pemerintahan pusat sibuk dengan pergantian kabinet, daerah kurang mendapat perhatian. Tuntutan-tuntutan dari daerah ke pusat sering tidak didengarkan. Situasi ini menyebabkan munculnya gejala provinsialisme atau sifat kedaerahan. Gejala provinsialisme akhirnya berkembang ke separatisme atau usaha memisahkan diri dari pusat. Gejala tersebut terwujud dalam berbagai macam pemberontakan, APRA, pemberontakan Andi Azis,RMS, PRRI, dan Permesta.

3. Pemilu I Tahun 1955

Pemilihan Umum (Pemilu) sudah direncanakan oleh pemerintah, tetapi program ini tidak segera terwujud. Karena usia kabinet pada waktu itu relatif singkat, persiapan-persiapan secara intensif untuk program tersebut tidak dapat dilaksanakan. Pemilu merupakan wujud nyata pelaksanaan demokrasi. Pemilu I di Indonesia akhirnya dilaksanakan pada masa kabinet Burhanudin Harahap. Pemilu I yang diselenggarakan pada tahun 1955 dilaksanakan dua kali, yaitu:

a) Tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau Parlemen.
b) Tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante (Dewan Pembentuk Undang-Undang Dasar).
c) Partai-partai peserta pemilu I pada tahun 1955.

Secara serentak dan tertib seluruh warga negara yang mempunyai hak memilih mendatangi tempat pemungutan suara untuk menentukan pilihannya. Pemilu berjalan lancar dan tertib dan melahirkan Empat partai yang muncul sebagai pemenang dalam Pemilu 1955 secara berurut: Partai Nasional Indonesia (PNI),

Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

4. Kemacetan Konstituante

Pemilihan umum tahap II pada tanggal 15 Desember 1955 mengantar terbentuknya Dewan Konstituante yang bertugas menyusun Undang Undang Dasar. Namun, antara kurun waktu 1956-1959, Dewan Konstituante belum berhasil merumuskan Undang-Undang Dasar tersebut. Ketidak berhasilan Konstituante menyusun UUD baru dan kehidupan politik yang tidak stabil menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat Indonesia

Pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno berpidato di depan sidang Konstituante yang menganjurkan agar Konstituante menetapkan UUD 1945 menjadi UUD Republik Indonesia. Konstituante kemudian mengadakan sidang untuk membahas usulan tersebut dan diadakan pemungutan suara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pemungutan suara tidak memenuhi kuorum. Banyak anggota Dewan Konstituante yang tidak hadir. Kemudian diadakan pemungutan suara yang kedua pada tanggal 2 Juni 1959. Pemungutan suara kedua juga tidak memenuhi kuorum. Dengan demikian, terjadi lagi kemacetan dalam Konstituante. Pada tanggal 3 Juni 1959 para anggota dewan mengadakan reses atau istirahat bersidang. Ternyata reses ini tidak hanya sementara waktu tetapi untuk selamanya. Artinya, Dewan Konstituante membubarkan diri.

5. Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Untuk menanggulangi hal-hal yang dapat membahayakan negara, Letjen A. H Nasution, selaku Kepala Staf Angkatan

Darat, mengeluarkan larangan bagi semua kegiatan politik terhitung sejak tanggal 3 Juni 1959. Kehidupan politik semakin buruk dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Di daerah-daerah terjadi pemberontakan merebut kekuasaan. Partai-partai yang mempunyai kekuasaan tidak mampu menyelesaikan persoalan. Soekarno dan TNI tampil untuk mengatasi krisis yang sedang melanda Indonesia dengan mengeluarkan Dekrit Presiden untuk kembali ke UUD 1945. Pertimbangan dikeluarkannya dekrit Presiden adalah sebagai berikut:

a) Anjuran untuk kembali kepada UUD 1945 tidak memperoleh keputusan dari Konstituante.
b) Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugasnya karena sebagian besar anggotanya telah menolak menghadiri sidang.
c) Kemelut dalam Konstituante membahayakan persatuan, mengancam keselamatan negara, dan merintangi pembangunan nasional.
d) Oleh karena itu, Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan keputusan (dekrit). Keputusan itu dikenal dengan nama Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Isi dekrit ini adalah sebagai berikut:
e) Pembubaran Konstituante.
f) Berlakunya UUD 1945.
g) Akan dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat.

B. Pengertian Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpimpin, juga disebut demokrasi terkelola, adalah istilah untuk sebuah pemerintahan demokrasi dengan peningkatan otokrasi dan menjadi bagian dari perkembangan demokrasi di Indonesia. Pemerintahan negara dilegitimasi oleh pemilihan umum yang walaupun bebas dan adil, digunakan oleh pemerintah untuk melanjutkan kebijakan dan tujuan yang sama . Atau, dengan kata lain, pemerintah telah belajar untuk mengendalikan pemilihan umum sehingga pemilih dapat melaksanakan semua hak-hak mereka tanpa benar-benar mengubah kebijakan publik. Walaupun mengikuti prinsip-prinsip dasar demokrasi, dapat timbul penyimpangan kecil terhadap otoritarianisme. Dalam demokrasi terpimpin, pemilih dicegah untuk memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan yang dijalankan oleh negara melalui pengefektifan teknik kinerja humas yang berkelanjutan.

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi dijalankannya sistem demokrasi terpimpin, yakni:

1. **Segi keamanan** : Sering terjadinya gerakan separatis, membuat kondisi Indonesia pada masa demokrasi liberal yang semakin tidak stabil. Kondisi ini telah mengguncang ketidakstabilan negara dibidang keamanan.
2. **Segi ekonomi :** Pergantian kabinet yang terlalu singkat pada sistem pemerintahan sebelumnya menyebabkan program-program yang telah dirancang tidak dapat berjalan dengan

lancar. Hal ini menimbulkan efek serius terhadap pembangunan ekonomi yang terhambat.

3. **Segi politik :** Dewan konstituante gagal dalam menyusun UUD baru untuk menggantikan UUDS 1950.
4. Kegagalan dewan konstituante dalam menyusun UUD baru, menimbulkan reaksi dari Soekarno untuk kembali mengusulkan pemberlakuan UUD 1945.

   Usulan itu tampaknya tidak berjalan dengan lancar, sejumlah pihak yang tergabung dalam anggota konstituante menunjukan sikap yang pro dan kontra terhadap usulan yang dicetuskan.
5. Sebagai tindak lanjut reaksi tersebut, diadakan pemungutan suara yang dilakukan oleh seluruh anggota konstituante demi mengatasi konflik yang sedang terjadi.
6. Hasil dari pemungutan suara menunjukan bahwa sebanyak 269 orang setuju kembali pada UUD 1945. Dan sisanya sebanyak 119 orang tidak setuju alias tetap ingin menggunakan UUDS 1950.
7. Melihat dari hasil voting, usulan untuk kembali menggunakan UUD 1945 tidak dapat segera direalisasikan, karena usulan tersebut tidak mencapai 2/3 bagian yang telah ditetapkan pada pasal 137 UUDS 1950.

Berdasarkan pada keputusan itu, maka Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi :

1. Tidak berlaku kembali UUDS 1950
2. Berlakunya UUD 1945
3. Dibubarkannya konstituante

4. Pembentukan MPRS dan DPAS

1. **Besarnya Kekuasaan Presiden**

   Soekarno sebagai presiden memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Soekarno dapat mengubah berbagai peran dari para wakil rakyat yang dianggap tidak sejalan dengan kehendaknya, terutama pada bidang politik.

2. **Pemerintahan yang Sentralistik**

   Sistem pemerintahan yang dikuasai oleh pemerintah pusat menjadikan peran dari partai politik semakin tidak jelas. Aspirasi rakyat tidak dapat tersalurkan dengan baik, sehingga kebijakan yang dibuat justru menimbulkan banyak kekacauan.

3. **Peran Partai Politik Terbatas**

   Pada masa pemerintahan ini, peran partai politik sangat terbungkam. Keberadaan partai politik hanya sekedar menjadi pendukung dari setiap kebijakan Soekarno.

4. **Peran Militer Semakin Besar**

   Peran militer di era ini terlihat sangat kuat. Militer memiliki dua fungsi (dwifungsi), yaitu berperan sebagai garda pertahanan negara serta pemerintahan. Namun pada kenyataannya, kekuatan militer yang tidak terbendung justru mengakibatkan kekacauan politik di tanah air.

5. **Anti Kebebasan Pers**

   Pers sejatinya memiliki peran sebagai penyambung suara antara rakyat dengan pemerintah. Akan tetapi, akibat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah cenderung kontroversial. Hal ini menjadikan sebagian besar media

menutup diri dan tidak berani mengedarkan berita karena adanya ancaman pencekalan.

6. **Berkembang Paham Komunisme**

   Kekacauan politik yang terjadi, membuat hubungan antara Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) semakin baik. Momentum kedekatan itu, dimanfaatkan dengan baik oleh PKI untuk menyebarkan paham komunisme.

7. **Terjadi Pelanggaran HAM**

   Banyaknya masalah yang terjadi seperti pengekangan kebebasan **pers,** pemerintahan yang sangat sentralistik, serta peran militer yang sangat kuat berdampak besar pada meningkatnya tindakan semena-mena terhadap masyarakat. Pelanggaran HAM sangat mudah terlihat ketika ada masyarakat yang menentang kebijakan pemerintah.

Dampak Demokrasi Terpimpin

Meskipun hanya berlangsung singkat, tetapi nampaknya demokrasi terpimpin telah menimbulkan berbagai dampak bagi tanah air. Secara umum, terdapat dua dampak yang membekas di hati masyarakat saat itu, yaitu dampak positif dan dampak negatif.

Dampak pertama yang terjadi adalah negara terhindar dari disintegrasi bangsa dan krisis yang berkepanjangan. Segala bentuk kebijakan yang terpusat pada pemerintah ternyata dapat meminimalisir terjadinya kesalahpahaman antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Namun, akibat terlalu terpusatnya pemerintahan justru mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh

segelintir oknum tidak bertanggung jawab.

Maraknya praktek KKN mengakibatkan efek domino terhadap pendapatan ekspor negara yang semakin merosot. Ketidakstabilan perekonomian Indonesia menimbulkan inflasi yang cukup parah bagi negara yang sedang berkembang kala itu.

Selanjutnya, dengan pemberlakuan kembali UUD 1945 sebagai pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan, Indonesia memiliki harapan untuk bisa melangkah kearah yang lebih baik. Di sini juga tercetusnya cikal bakal terbentuknya dua lembaga tinggi negara, yaitu MPRS dan DPAS.

Pemberlakuan dwifungsi militer yang menjadikannya ikut berpolitik, ternyata menimbulkan ketidak fokusan militer dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara. Adanya kepemimpinan yang *overpower* dan terjadinya pergolakan terhadap perkembangan PKI. Disinyalir terjadi akibat lemahnya pengawasan militer dalam bidang keamanan dan pertahanan negara.

Kondisi politik Indonesia dalam masa demokrasi terpimpin bisa dibilang kurang berjalan lancar, sistem pemerintahan ini dinilai mencoreng nama demokrasi itu sendiri.

Demokrasi tidak sesuai dengan hikmat kebijaksanaan yang terkandung dalam pancasila. Demokrasi telah dipimpin oleh pemerintahan yang dinilai sangat otoriter, bahkan tercatat sebagai masa kelam sejarah demokrasi

C. Pengertian Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi [1] dalam doktrin Manipol USDEK disebut pula sebagai demokrasi terpimpin merupakan demokrasi yang berada dibawah komando Pemimpin Besar Revolusi kemudian dalam doktrin repelita yang berada dibawah pimpinan komando Bapak Pembangunan arah rencana pembangunan daripada suara terbanyak dalam setiap usaha pemecahan masalah atau pengambilan keputusan, terutama dalam lembaga-lembaga negara.[2]

Prinsip dalam demokrasi Pancasila sedikit berbeda dengan prinsip demokrasi secara universal[3]. Ciri demokrasi Pancasila[3]:

1. pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi
2. adanya pemilu secara berkesinambungan
3. adanya peran-peran kelompok kepentingan
4. adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak minoritas.
5. Demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah.
6. Ide-ide yang paling baik akan diterima, bukan berdasarkan suara terbanyak.

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan penyelengaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu Undang-undang Dasar 1945]. Sebagai demokrasi pancasila

terikat dengan UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan UUD 1945.

1. Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila

Selain pengertian Demokrasi Pancasila, dikutip dari buku "Ilmu Kewarganegaraan" oleh Cholisin, ada juga prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila, di antaranya:

1) Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia

   Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia dimaksudkan bahwa hak dan kewajiban yang dimiliki oleh rakyat Indonesia sama dan sejajar.

   Persamaan hak dan kewajiban tersebut tidak hanya dalam bidang politik saja melainkan bidang hukum, ekonomi dan sosial yang diharapkan mampu memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

2) Keseimbangan antara hak dan kewajiban

   Dalam Demokrasi Pancasila, prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban memberikan pengertian bahwa hak yang diterima warga negara harus diseimbangkan dengan kewajiban yang harus ditunaikan.

3) Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain

   Demokrasi Pancasila memberikan kebebasan kepada setiap individu namun dengan batasan yang bertanggung jawab.

   Dengan kata lain, kebebasan ini adalah kebebasan yang harus memperhatikan hak dan kewajiban dari orang lain

dan diri sendiri bahkan, harus dapat dipertanggungjawabkan dengan Tuhan Yang Maha Esa.

4) Mewujudkan rasa keadilan sosial

   Demokrasi memiliki tujuan dalam mewujudkan rasa keadilan sosial untuk semua warga negaranya. Sementara keadilan sosial melingkupi sila dalam Pancasila terutama sila kelima.

   Jadi, prinsip dalam demokrasi Pancasila harus bisa mewujudkan rasa keadilan sosial dalam setiap masyarakat.

5) Pengambilan keputusan dengan musyawarah

   Landasan gotong royong dan kebersamaan merupakan dasar dari pengambilan keputusan dengan musyawarah. Dalam pengambilan keputusan ini mengilhami rasa keadilan bagi semua, di mana tidak hanya mementingkan kaum mayoritas saja, namun juga dapat memperhatikan kaum minoritas.

6) Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan

   Prinsip persatuan nasional terilhami dari sila ketiga dari Pancasila. Rasa kekeluargaan dalam Negara Republik Indonesia, memunculkan persatuan nasional dalam setiap masyarakat.

   Persatuan nasional juga sangat penting dalam pertahanan negara agar negara dapat kuat saat ada gangguan baik dari dalam maupun dari luar.

7) Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional

Tujuan dan cita-cita nasional Negara Indonesia tertuang

dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Dengan Demokrasi Pancasila, tujuan dan cita-cita Negara Indonesia bisa menciptakan kebaikan bagi masyarakat Indonesia serta turut mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia.

2. Ciri-Ciri Demokrasi Pancasila

1) berikut ciri-ciri demokrasi Pancasila:
2) Pemerintah berjalan sesuai dengan konstitusi
3) Adanya pemilu secara berkesinambungan
4) Adanya penghargaan atas HAM dan perlindungan untuk hak bagi kaum minoritas
5) Kompetisi dari berbagai ide dan cara menyelesaikan masalah
6) Ide terbaik akan diterima dibandingkan suara terbanyak
7) Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusi, sehingga kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan.

Sedangkan ciri pemerintahan demokratis, yaitu adanya sistem pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, pemilu, partai politik, perwakilan, dan kepentingan rakyat.

3. Pelaksanaan Demokrasi Periode 1945-1949

Ketika awal kemerdekaan, Indonesia menggunakan sistem demokrasi yang berkembang di masa selanjutnya. Mengutip dari buku Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan, periode awal kemerdekaan menghasilkan:

1) Pertama, pemberian hak politik untuk warga negara yang dianggap dewasa. Pemberian hak politik ini tidak ada diskriminasi.
2) Kedua, presiden secara konstitusional dibatasi kekuasaannya oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), sebagai pengganti parlemen.
3) Ketiga, maklumat wakil presiden memungkinkan untuk membentuk partai politik.

Selain awal kemerdekaan, demokrasi Pancasila ada ketika masa orde lama, orde baru, dan orde reformasi.

KELOMPOK 7 BUDAYA POLITIK INDONESIA

A. Pengertian Budaya Politik

Politik memiliki makna cukup beragam. Ada yang menyebutnya dengan seni dan ilmu pemerintahan, ilmu tentang negara, dan pembagian kekuasaan. Pada dasarnya politik berkenaan dengan perilaku manusia dalam mendapatkan kekuasaan, menjalankan kekuasaan, dan mempertahankan kekuasaan.

Ilmu politik merupakan salah satu ilmu tertua dari beberapa cabang ilmu yang ada. Secara etimologis, politik berasal dari Bahasa Yunani “polis” yang artinya negara kota. Dari istilah polis ini, berkembang konsep polites yang berarti warga negara dan konsep politikos yang berarti kewarganegaraan. Dari arti etimologis tersebut, politik dapat diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan atau antara warga negara pada suatu negara kota. Dalam bahasa Inggris, akar katanya adalah politics, yang bermakna kebijaksanaan (policy). Jika dilihat dari kedua bahasa tersebut, bahasa Yunani dan Inggris, maka politik dapat dipahami sebagai suatu proses dan sistem penentuan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan erat dengan warga negara dalam satu negara kota (Sitepu, 2012).

Politik merupakan suatu proses dalam bentuk “siapa yang mendapatkan apa, kapan dan bagaimana” (politics as who gets, what, when, and how). Easton (1981) merumuskan politik sebagai pola-pola kekuasaan, aturan dan kewenangan, kehidupan publik, pemerintah, dan konflik. Affandi (1971) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan politik sebenarnya ialah usaha-

usaha yang dijalankan oleh para warga negara untuk mencapai kekuasaan dalam negara. Menurut Budiarjo (2008) politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem (sosial) yang menyangkut proses menentukan dan melaksanakan tujuan.

budaya politik yaitu merupakan suatu pola dari tingkah laku masyarakat dan juga orientasinya kepada kehidupan politik, hal tersebut bisa berupa penyelenggaraan administrasi negara, adat istiadar, hukum, norma yang biasa dilakukan setiap orang di kehidupannya sehari-hari maupun politik pemerintahan.

Tidak hanya itu, beberapa juga ada yang mengatakan pengertian dari budaya politik yaitu suatu persepsi dari setiap masyarakat pada sebuah negara dan akan diwujudkan ke dalam pola sikap kepada peristiwa politik yang sedang terjadi. Maka dari itu, pengertian budaya politik lainnya yaitu merupakan suatu nilai yang dapat berkembang serta dipraktikkan oleh masyarakat ketida dalam berpolitik. Sejumlah ahli juga memberikan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan budaya politik.

Menurut G.A. Almond dan S. Verba (1991), budaya politik adalah sikap orientasi warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu. Menurut Marbun (2005), budaya politik adalah pandangan politik yang mempengaruhi sikap, orientasi, dan pilihan politik seseorang. Budaya politik lebih mengutamakan dimensi psikologis dari suatu sistem politik, yaitu sikap, sistem kepercayaan, simbol yang dimiliki individu dan yang dilaksanakannya dalam masyarakat. Contohnya adalah

budaya politik rakyat Amerika dan Jepang yang sangat berbeda. Rakyat Amerika secara tradisional menolak patuh terhadap siapapun. Mereka menganggap bahwa itu adalah hak demokrasi mereka sejak lahir untuk mengkritik bagaimana negara dijalankan. Sedangkan rakyat Jepang cenderung mematuhi otoritas pejabat negara, meskipun mereka sendiri tidak menyukai korupsi dan ketidakmampuan para pejabat.

Menurut Larry Diamond (2003), budaya politik adalah keyakinan, sikap, ide-ide, nilai, sentimen, dan evaluasi suatu masyarakat tentang sistem politik negeri mereka dan peran masing- masing individu dalam sistem itu. Menurut Mas'oed dan Andrews (1986), budaya politik adalah sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan politiknya. Menurut Almond dan Powell (1966), budaya politik adalah suatu konsep yang terdiri dari sikap, keyakinan, nilai-nilai, dan keterampilan yang sedang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat, termasuk pola kecendrungan-kecendrungan khusus serta pola-pola kebiasaan yang terdapat pada kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Austin Ranney mendefinisikan budaya politik sebagai seperangkat pandangan tentang politik dan pemerintahan yang memiliki pola orientasi-orientasi terhadap objek-objek politik.Dennis Kavanagh menafsirkan budaya politik sebagai pengakuan terhadap lingkungan perasaan dan sikap terhadap sistem politik yang tengah berlangsung. menurut Miriam Budiardjo adalah keseluruhan pandangan politik, seperti norma-norma dan pola orientasi terhadap politik dan falsafah pada

umumnya.

Budaya politik menurut Mochtar Massoed adalah sikap dan orientasi warga sebuah negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan politiknya.

Gabriel Abraham Almond dan George Bingham Powell Almond dan Powell mengartikan budaya politik sebagai sebuah konsep yang terdiri dari sikap, keyakinan, nilai-nilai dan keterampilan yang sedang berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Budaya politik diwujudkan dalam pola-pola kecenderungan eksklusif dan pola-pola kelaziman yang ada dalam kelompok masyarakat.

Robert Dahl Budaya politik menurut Robert Dahl adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang terdiri dari ide, pengetahuan, adat istiadat, dan mitos. Nilai-nilai tersebut dikenal dan dinyatakan oleh sebagian besar masyarakat. Budaya politik yang sudah ada kemudian menjadi alat ukur rasional untuk menampik atau menerima nilai dan norma lain. Budaya politik menurut Rusadi Kantaprawira adalah persepsi manusia, pola, dan sikap terhadap sekian banyak masalah politik dan peristiwa politik. Sikap tersebut terbawa ke dalam pembentukan struktur dan proses pekerjaan politik masyarakat maupun pemerintahan.

Selain itu, Alan R. BallAlan R. Ball beranggapan bahwa pengertian dari budaya politik yaitu merupakan sebuah susunan yang didalamnya terdapat kepercayaan, emosi, sikap serta terdapat nilai-nilai dari masyarakat yang berhubungan erat dengan isitem politik maupun isu-isu politik yang ada.

B. Tipe-Tipe Budaya Politik

1. Tipe-tipenya diantaranya

1) Budaya Politik Parokial (Parochial Political Culture)

   Budaya politik yang level partisipasinya sangat rendah. Dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah atau buta huruf. Budaya Politik ini terbatas pada satu wilayah atau lingkup yang kecil atau sempit. Pada umumnya budaya politik ini terdapat dalam masyarakat yang tradisional dan sederhana. Dalam masyarakat seperti ini, spesialisasi sangat kecil dan belum banyak berkembang.

2) Budaya Politik Subyek (Subject Political Culture)

   Menurut Muchar Mas'oed dan Colin MacAndrews, budaya politik subjek menunjukkan pada orang-orang yang secara pasif patuh pada pejabat-pejabat pemerintahan dan undang-undang (UU), tetapi tidak melibatkan diri dalam politik ataupun memberikan suara dalam pemilihan.

3) Budaya Politik Partisipan (Participant Political Culture)

   Budaya politik di mana kesadaran masyarakatnya sangat tinggi untuk aktif dalam aktivitas politik. Budaya politik partisipan adalah budaya politik paling baik. Menurut Almond dan Verba, budaya politik partisipan adalah suatu bentuk budaya dimana anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eskplisit terhadap sistem sebagai keseluruhan dan terhadap struktur dan proses politik serta administratif. Budaya politik ini ditandai oleh adanya kesadaran bahwa dirinya ataupun orang lain,

sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik. Ini menunjukkan pada orang orang yang tidak dalam kegiatan politik, paling tidak dalam kegiatan pemberian suara (Voting) dan memperoleh informasi yang cukup banyak tentang kehidupan.

4) Pendidikan Politik

Menurut Gabriel Almond dalam Mas'oed (1986), pendidikan politik adalah bagian dari sosialisasi politik yang khusus membentuk nilai- nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Mohammad Nuh sebagaimana dikutip oleh Wayan Sohib (2009) mengatakan, pendidikan politik tidak terbatas pada pengenalan seseorang terhadap peran individu dalam partisipasinya dalam pemerintahan, partai politik dan birokrasi. Tetapi pada hakikatnya adalah terbangunnya proses pendawasaan dan pencerdasan seseorang akan tanggung jawab individu dan kolektif untuk menyelesaikan permasalahan bangsa sesuai otoritasnya yang mengandung makna mentalitas dan etika dalam berpolitik.

Menurut Surono sebagaimana dikutip Ramdlang Naning (1982:8), pendidikan politik adalah usaha untuk masyarakat politik, dalam arti mencerdaskan kehidupan politik rakyat, meningkatkan kesadaran warga terhadap kepekaan dan kesadaran hak, kewajiban dan tanggung

jawab terhadap bangsa dan negara.

politik dalam arti kata yang longgar yaitu sosialisasi politik adalah bagian langsung dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Disenangi ataukah tidak, diketahui ataukah tidak, disadari ataukah tidak, hal itu dialami oleh anggota-anggota masyarakat, baik penguasa ataupun orang awam. Jadi kalau boleh disimpulkan, pendidikan politik (dalam arti kata yang ketat) dapat diartikan usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai– nilai politik yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil penghayatan itu akan menghasilkan/melahirkan sikap dan tingkah laku politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal itu, dan bersamaan dengan itu lahir pula kebudayaan politik baru.

Menurut Kantaprawira (2004), pendidikan politik yaitu untuk meningkatkan pengetahuan rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Sesuai paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, rakyat harus mampu menjalankan tugas partisipasi. Bentuk- bentuk pendidikan politik dapat dilakukan melalui:

a) Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lainlain bentuk publikasi massa yang biasa membentuk pendapat umum;
b) Siaran radio dan televisi serta film (audio visual media);

c) Lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal ataupun informal.

5) Bentuk dan Proses Pendidikan Politik

Bentuk dan proses sosialisasi atau pendidikan politik menurut Kavang (1998), itu terbagi atas dua jenis, yaitu:

a) Bentuk dan proses yang bersifat laten atau tersembunyi dimana kegiatan atau aktivitasnya berlangsung dalam lembaga-lembaga sosial non politis seperti lingkungan keluarga, lingkungan sosial dan keagamaan, lingkungan kerja maupun lingkungan sekolah atau kampus.

b) Bentuk dan proses yang bersifat terbuka di mana aktivitasnya berlangsung dalam lembaga politis tertentu (termasuk pemilu dan perangkat-perangkatnya).

Adapun bentuk sosialisasi politik berdasarkan jumlah peserta (audience) atau massa yang mengikutinya dibedakan menjadi bentuk umum dan bentuk terbatas. Bentuk umum terjadi bila massa (audience) yang melaksanakannya tidak dibatasi jumlahnya sedangkan bentuk yang terbatas jumlahnya dibatasi untuk kalangan tertentu.

6) Partisipasi Politim

Secara etimologi kata partisipasi berasal dari kata latin

"Pars" dan "capere". Pars berarti bagian- bagian dan capere berarti mengambil atau ikut serta. Jadi diartikan partisipasi adalah "ikut serta mengambil bagian". Kemudian dalam bahasa Inggris, disebut participate atau participation berarti mengambil bagian atau mengambil peranan. Rush dan Althoff (2001) mengatakan bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan individu sampai macam-macam tingkatan di dalam sistem politik.

Menurut Budiardjo (2008), sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup kegiatan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai, atau salah satu gerakan sosial dengan direct action dan sebagainya.

7) Bentuk Partisipasi Politik

Menurut (Mas'oed & Andrews 1986) partisipasi politik terbagi dalam 2 (dua) bentuk, yakni secara Konvesional dan Non Konvensional. Hal tersebut adalah:

a. Partisipasi politik secara konvensional adalah pemberian suara (voting), diskusi politik, kegiatan

kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrasi.

b. Partipasi politik secara non konvensional adalah pengajuan petisi demonstrasi, konfrontasi mogok, tindakan politik terhadap harta benda (perusakan, pemboman, pembakaran), tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan, perang gerilya dan revolusi).

C. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik diartikan oleh Marshall (dalam Owen 2008, 4) sebagai penyampaian pola melalui tindakan, hukum dan norma, serta budaya politik melalui sejumlah agen sosialisasi seperti keluarga, institusi pendidikan, teman sebaya (peer), media massa, institusi politik, kelompok organisasi, kelompok agama, dan militer. Definisi tersebut menjelaskan bahwa peran masyarakat dalam sosialisasi politik dapat memberikan pengaruh terhadap pengetahuan politik individu. Sehingga informasi mengenai pola pikir, tindakan, hukum, dan norma politik terhadap seorang individu sangat dipengaruhi oleh individu lain. Definisi yang dikemukakan oleh Marshall tersebut dapat membantu menganalisa permasalahan yang penulis teliti, karena definisi tersebut melibatkan agen sosialisasi politik sebagai salah satu elemen yang dibutuhkan untuk melakukan sosialisasi politik. Sebab untuk melihat

proses sosialisasi politik tidak cukup apabila hanya ditinjau dari sudut pandang psiko-sosial saja. Dalam hal ini, definisi yang dikemukakan oleh Almond dan Verba (1963) tidak menjadikan unsur sosial masyarakat dalam menyampaikan nilai, norma, dan budaya politik sebagai elemen utama dalam sosialisasi politik. Ia lebih menegaskan bahwa budaya politik dibentuk dalam diri individu itu sendiri berdasarkan tingkah laku politiknya. Sehingga, definisi yang digunakan oleh Almond dan verba tersebut kurang relevan digunakan untuk menganalisa kasus yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

Namun, agen sosialisasi yang disebutkan dalam konsep tersebut belum menyebutkan media sosial sebagai agen sosialisasi. Mengingat saat ini konteks masyarakatnya lebih akrab dengan penggunaan teknologi, salah satunya media sosial. Jadi, penelitian ini mencoba menambahkan agen sosialisasi baru berupa media sosial pada definisi konsep tersebut. Didukung dengan tulisan dan penelitian sebelumnya, penelitian ini mencoba melihat proses sosialisasi politik pada kaum muda berdasarkan konteks sosial masyarakat kaum muda, konten yang tersedia dalam mesia sosial dan pendekatan yang dilakukan melalui media sosial. Maka untuk itu dalam penelitian ini berfokus pada: Pertama, konteks sosial masyarakat yang menurut penulis penting untuk dilihat karena hal tersebut berhubungan dengan media seperti apa yang dapat diterima oleh kelompok masyarakat tersebut. Hal tersebut diperkuat

dengan kerangka penelitian yang dilakukan oleh Gimpel (2003) "*...political socialization is not uniform within a society but is shaped by the local political and social circumstances in which individuals find themselves*." (Gimpel 2003, 10). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Kahne dan Middaugh juga memfokuskan pada aspek sosial masyarakat, seperti agen sosialisasi apa dan kondisi sosial seperti apa yang dapat mengubah pandangan sosial kelompok lainnya (Kahne dan Middaugh 2012). Sehingga kerangka berpikir tersebut dapat diaplikasikan dalam penelitian ini untuk melihat fenomena yang terjadi dalam konteks Indonesia.

Kedua, keberhasilan sosialisasi politik dapat dilihat dari bagaimana kaum muda menerima pesan yang disampaikan.Hal ini terkait dengan konten apa yang diberikan dan bagaimana cara agen sosialisasi menyempaikan hal tersebut. Lee, Shah, dan McLeod (2012) mengemukakan kemampuan komunikasi atau pendekatan sebagai salah satu faktor keberhasilan dalam upaya penyampaikan sosialisasi politik. Kemampuan komunikasi merupakan stimulan bagi kaum muda agar dapat mengeksplorasi pandangannya, memproses informasi, dan merefleksikan peristiwa sosial. Dengan menggunakan pendekatan yang tepa, maka agen sosialisasi akan memfasilitasi kaum muda untuk menyampaikan argumen dan opini, mengungkapkan ketidak-setujuannya, dan

memahami isu kompleks (Lee, Shah, dan McLeod 2012).

Berdasarkanuraian di atas, penelitian ini mencoba menjelaskan bahwa dalam konteks kaum muda perkotaan di Indonesia ada agen sosialisasi baru yang diterima oleh kaum muda, yaitu media sosial. Internet dianggap sebagai new media use in digital era yang mampu mengubah pandangan masyarakat, salah satunya pandangan politik melalui media sosial (Bennett 2008; Kahne dan Middaugh 2012). Media sosial dan media online lainnya digunakan sebagai salah satu media komunikasi yang paling mudah diakses oleh siapa saja, memberikan informasi yang sangat beragam, keterbukaan dan kebebasan yang menjadikan media sosial menjadi salah satu referensi bagi penggunanya (Bennett 2008; Sen dan Hill 2007). Dalam penelitian ini, penulis membatasi media sosial hanya berupa facebook, twitter, instagram, blog, dan youtube. Media sosial jenis tersebut yang paling banyak diakses oleh masyarakat Indonesia.

Pada akhirnya, setelah kaum muda mendapatkan sosialisasi politik, maka akan berimplikasi pada partsipasi politik. Dalam membahas partisipasi politik, yang harus dipahami terlebih dahulu adalah bahwa partisipasi politik merupakan elemen dari perilaku politik. Selanjutnya Surbakti (1992) membagi partisipasi politik ke dalam dua tipologi, yaitu aktif dan pasif. Partisipasi politik aktif merupakan tindakan yang dilakukan individu dalam mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan, mengajukan kritik dan perbaikan, membayar pajak, dan memilih pemimpin

pemerintahan (pemilu atau pilkada) (Surbakti 1992). Sedangkan partisipasi politik pasif berarti individu tersebut hanya sebatas mengikuti, mentaati, dan menjalankan kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah (Surbakti 1992). Namun, penelitian ini hanya berfokus pada partisipasi politik aktif individu, khususnya kaum muda. Sosialisasi politik bertujuan untuk mencerdaskan bangsa, membangun masyarakat yang paham akan politik, pemerintahan dan cara pengambilan kebijakan oleh pemerintah.

Sosialisasi politik menumbuhkan kesadaran dan pemahaman politik bagi orang dewasa maupun anak-anak sebagai penerus bangsa. Dengan begitu individu dapat berpatisipasi secara aktif dalam sistem politik yang ada di pemerintahan.

1. Memelihara sistem politik

   Sosialisasi politik berfungsi untuk mengenalkan sistem politik yang telah lalu dan yang sedang dijalani. Pemahaman dari sosialisasi politik kemudian diterapkan dalam memelihara sistem politik yang ada dalam suatu negara.

   Sosialisasi politik sangatlah penting dalam masa modernisasi d globalisasi karena sistem politik biasanya disesuaikan dengan kemajuan jaman.

   Kesadaran dan pemahaman politik dibutuhkan untuk memodifikasi bahkan menciptakan sistem politik baru bagi masa depan bangsa

2. Jenis Sosialisasi Politik

   1) Pendidikan Politik

Pendidikan politik adalah proses pembelajaran politik pemerintahan antara pemberi materi dan penerima materi. Pendidikan politik dilakukan untuk membangun kesadaran, pemahaman, pendapat, dan perilaku individu untuk turut berpartisipasi secara aktif dalam bidang politik. Pendidikan politik dilakukan dari usia dini dan akan terus berlanjut.

2) Indoktrinasi politik

   Indoktrinasi tidak bertujuan mencerdaskan bangsa melainkan pemerintah yang mengontrol pandangan politik masyarakatnya. Indoktrinasi memaksa individu untuk mendukung suatu orientasi politik, mengikuti nilai-nilai, dan menghambat demokrasi.

Dilansir dari Oxford Handbooks Online, berikut yang termasuk dalam sarana atau agen-agen sosialisasi politik adalah:

1. Keluarga

   Orang tua dan keluarga adalah agen utama sosialisasi politik seorang anak. Anak akan mengadopsi pandangan politik yang dimiliki oleh orang tuanya. Orang tua yang aktif berpartisipasi politik biasanya memiliki anak yang juga tertarik dalam bidang politik dan memiliki pemahaman politik yang baik.

2. Sekolah

   Sekolah merupakan agen penting dalam sosialisasi politik. Dilansir dari Oxford Handbooks Online,

pendidikan sangat berkolerasi dengan pengetahuan politik, minat, jumlah pemilih, dan bentuk partisipasi politik lainnya.

3. Rekan

   Rekan dalam peer group maupun teman pergaulan yang sebaya merupakan agen sosialisasi politik yang efektif. Kesadaran politik akan tumbuh dilingkungan teman sebaya yang juga menyukai diskusi tentang politik serta pemerintahan. Rekan dan teman sebaya sangatlah penting dalam hubungan sosial dan penerapan norma sosial dalam kehidupan seseorang.

4. Media Massa

Pada jaman modernisasi dan globalisasi ini, hampir semua orang menggunakan dan menghabiskan waktunya pada media massa ataupun media sosial. Sehingga media massa menjadi agen penting dalam sosialisasi politik. Media massa harus bisa menayangkan pemberitaan maupun sosialisasi politik dalam segala bentuk dengan efektif dan tidak tertutup oleh konten hiburan. Sehingga masyarakat lebih paham terhadap sistem politik pemerintahan, tidak hanya melihat hiburan semata.

5. Peristiwa Politik

   Peristiwa politik merupakan agen sosialisasi politik yang secara rutin memberikan pendidikan bagi masyarakat. Sosialisasi politik oleh peristiwa politik paling sering terjadi saat masa pemilihan dan

pemungutan suara untuk memilih pemerintah yang akan berkuasa. Sosialisasi politik tersebut dapat dilakukan secara langsung oleh pemerintah, maupun oleh parta-partai politik yang terlibat di dalamnya.

3. Contoh-contoh Sosialisasi Politik
    1) Pendidikan kewarganegaraan di sekolah
    2) Pengenalan politik oleh orang tua
    3) Kampanye dan penjelasan sistem pemilihan ketua osis
    4) Kampanye dan penjelasan sistem pemilu baik RT, RT, camat, lurah, gubernur, DPR, DPD, hingga Presiden.
    5) Pemberitaan politik pemerintahan di media sosial
    6) Penyiaran berita hingga pandangan politik ahli di televisi
    7) Siaran sidang pemerintahan dalam pengambilan kebijakan di media massa.
    8) Acara politik seperti pendidikan, wawancara, juga debat di media massa.

D. Budaya Politik Indonesia

1. Budaya Politik yang Ideal

   Budaya politik didefinisikan oleh Almond dan Verba (1963) sebagai suatu sikap orientasi yang khas suatu warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara didalam sistem itu. Pengertian budaya politik ini membawa pada suatu pemahaman konsep yang memadukan dua tingkat orientasi politik, yaitu orientasi sistem dan orientasi individu. Sebagai

sebuah sistem organisasi politik(negara) hendaknya memiliki orientasi yang bertujuan mengupayakan kesejahteraan warga negara. Aspek individu dalam orientasi politik hanya sebagai pengakuan pada adanya fenomena dalam masyarakat tertentu yang semakin mempertegas bahwa masyarakat secara keseluruhan tidak dapat terlepas dari orientasi individu. Artinya, hakikat politik sebenarnya bukan berorientasi pada individu pemegang kekuasaan dalam politik, melainkan kesejahteraan rakyat yang menjadi orientasinya.

Konsep budaya politik yang didefinisikan oleh Almond dan Verba diatas sebagai suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu, dapat mengandung pemahaman yang luas. Pengertian budaya politik ini membawa pada suatu pemahamankonsep yang memadukan dua tingkat orientasi politik, yaitu orientasi sistem dan orientasi individu. Sebagai sebuah sistem, organisasi politik hendaknya memiliki orientasi yang hendak mengupayakan kesejahteraan warga negara. Aspek individu dalam orientasi politik hanya sebagai pengakuan pada adanya fenomena dalam masyarakat tertentu yang semakin mempertegas bahwa masyarakat secara keseluruhan tidak dapat terlepas dari orientasi individu. Artinya, hakikat politik sebenarnya bukan berorientasi pada individu pemegang kekuasaan dalam politik, melainkan kesejahteraan rakyat yang menjadi orientasinya.

Kesejahteraan rakyat menjadi tujuan dari politik dalamnegara. Warga negara senantiasa mengidentifikasikan diri mereka dengan simbol-simbol dan lembaga kenegaraan berdasarkan orientasi yang mereka miliki. Dengan orientasi itu pula mereka menilai serta mempertanyakan tempat dan peranan mereka didalam sistem politik.

Dalam pemahaman dan pengertian lain, budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Namun,setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya, seperti antara masyarakat umum dengan para elitenya. Seperti juga di Indonesia,menurut Benedict R.O'G Anderson, kebudayaan Indonesia cenderung membagi secara tajam antara kelompok elite dengan kelompok massa.Kedua jenis kelompok yang nyata ada dalam Negara Indonesia, dipastikan memiliki pola budaya politik yang berbeda pula.

Sementara itu, mengenai objek politik dalam pembahasan mengenai budaya politik menurut Almond dan Verba (1963) mencakup tiga komponen: *kognitif, afektif,* dan *evaluatif*. Komponen kognitif digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan seseorang mengenai jalannya sistem politik, tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yang mereka ambil, atau mengenai simbol-simbol yang dimiliki sistem politiknya secara keseluruhan. Dalam pemahaman pada komponen ini, lebih menyoroti pada seberapa besar seseorang mengetahui tentang system politik dan bagian-bagian yang ada di dalamnya. Komponen afektif berbicara

tentang aspek perasaan seorang warga negara yang dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik tertentu. Sikap yang telah lama tumbuh dan berkembang dalam keluarga atau lingkungan seseorang juga dapat mempengaruhi pembentukan perasaan tersebut. Sehingga kondisi tersebut akan terus terbawa dalam perilaku dan cara bersikap terhadap jalannya proses dalam sistem politik. Sementara komponen evaluatif ditentukan oleh evaluasi moral yang dimiliki seseorang. Di sini, nilai moral dan norma yang dianut dapat menentukan serta menjadi dasar sikap dan penilaiannya terhadap sistem politik. Oleh karena itu, diperlukan penanaman nilai-nilai moral bagi masyarakat, agar dapat menilai dan memihak dengan benar danarif, salah satunya melalui institusi pendidikan. Ketiga komponen dalam objek politik yang menjadi bagian dari indikator untuk menilai seberapa besar tingkat budaya politik yang melekat dalam warga negara tersebut.

Bila dikaitkan dengan warga negara sebagai individu, maka konsep budaya politik pada hakikatnya berpusat pada imajinasi (pikiran danperasaan) manusia yang merupakan dasar semua tindakan. Oleh karena itu,dalam menuju arah pembangunan dan modernisasi dalam penyelenggaraan negara, suatu masyarakat akan menempuh jalan yang berbeda antara satu masyarakat dengan yang lain dan itu terjadi karena peranan kebudayaan sebagai salah satu faktor. Budaya politik ini dalam suatu derajat yang sangat tinggi dapat membentuk aspirasi, harapan,preferensi, dan

prioritas tertentu dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh perubahan sosial politik. Setiap masyarakat memiliki common sense yang bervarisi dari satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain, yang berimplikasi pada perbedaan persepsi tentang kekuasaan,partisipasi, pengawasan control)sosial, serta kritik masyarakat. Pengaruhini akan terus terbawa dalam aktivitas politik dalam pengambilan keputusan politik dalam pemilu, pilkada maupun cara berpartisipasi dalam berbagai kegiatan politik, sosial dan pembangunan. Sehingga keluaran dari proses politik yang berlangsung dapat mencirikan tingkat budaya politik warga masyarakat tersebut.

2. Budaya Politik Indonesia

Affan Gaffar (2005) dalam teori politiknya mengemukakan bahwa budaya politik masyarakat Indonesia terbagi menjadi tiga: hierarkhi tegar,patronage (patron-client), danneo patrimonialistik. Hierarki yang tegar memilahkan dengan mengambil jarak antara pemegang kekuasaan dengan rakyat sehingga kalangan birokrat sering menampakkan diri dengan self-imageyang bersifat benevolent. Seolah-olah mereka sebagai kelompok pemurah, baik hati dan pelindung rakyat, sehingga ada tuntutan rakyat harus patuh, tunduk, dan setia pada penguasa. Perlawanan terhadap penguasa akan menjadi ancaman bagi rakyat. Lebih tragis lagi, suatu upaya untuk melindungi hak mereka sendiri pun diartikan sebagai perlawanan pula. Dalam pemahaman budaya politik yang

bersifat hierarkhi tegar makapola hubungan yang terjadi terpisahkan antara penguasa (negara) dan yang dikuasai (rakyat). Budaya politik patronage menurut Gaffar sebagai budaya yang paling menonjol di Indonesia. Pola hubungan dalam budaya politik patronage ini bersifat individual, yakni antara sipatrondan siclient,majikan dan pembantu, atasandan bawahan. Antara keduanya terjadi interaksi yang bersifat resiprokal atau timbal balik dengan mempertukarkan kekuasaan, kedudukan, jabatan dengan tenaga, dukungan, materi, dan loyalitas. Budaya politik ini menjadi salah satupenyebab maraknya praktik KKN dan ketidakadilan dalam masyarakat. Berikutnya adalah budaya politikneo-patrimonialistik karena negara memiliki atribut yang bersifat modern dan rasionalistik, seperti birokrasi disamping juga memperlihatkan atribut yang bersifat patrimonialistik. Ini mengandung pemahaman bahwa negara modern dan rasional akan didukung oleh bir okrasi, namun dalam praktiknya pola tradisional dengan bercirikan patrimonialistik tetap ada dalam penyelenggaraan negara. Dalam model yang ketiga ini pola KKN lebih 'ditutupi' melalui tameng kebijakan atau hukum. Sehingga dalam tataran permukaan, masyarakat umum melihat bahwa sistem politik negara berjalan baik. Padahal sejatinyaia masih sebagai budaya politik yang bercirikan patronage.

Nurcholish Madjid(1999) menyatakan, "Sistempolitik yang sebaiknya diterapkan di Indonesia adalah sistem

politik yang tidak hanya baik untuk kelompok, tetapi yang sekiranya juga akan membawa kebaikan untuk semua anggota masyarakat Indonesia”. Artinya, cita-cita politik seharusnya bertujuan untuk mewujudkan kebaikan bersama secara kemanusiaan, tidak hanya menguntungkan kelompok atau golongan ,terlebih individu tertentu sebagai pemegang kekuasaan. Apapun budaya politik yang dianut, yang terpenting bahwa penguasa politik jangan menjauh dari realitas rakyat yang telah memilihnya.Secara sederhana dapat diasumsikan bahwa budaya politik masyarakat idealnya tetap sebagai pola orientasi dan sikap yang mampu berkontribusi melalui tindakan-tindakan konstruktif dalam sistem politik. Pemilihan umum yang damai, pilkada yang tidak bergejolak dan semakin berkurangnya konflik politik di masyarakat, menjadi ciri bahwa budayapolitik semakin membaik. Kondisi tersebut akan berdampak secara positif dalam proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintahan yang terpilih. Namun fenomena yang sering terjadi, sebagai misal pasca pemilu2004 atau 2009 atau pilkada sepanjang tahun 2006 sampai 2010 ini,menunjukkan bahwa setelah memenangkan pemilu atau pilkada dan berhasil menjadi pemimpin, mereka lupa diri dan bahkan mereka tidak lagi perduli pada rakyat. Bila kekuasaan masih didominasi oleh sistem feodaldan patrimonial-irrasional, maka demokrasi yang didambakan oleh setiap orang akan sulit terwujud. Budaya politik yang seperti tersebut sangat tidak mendukung terhadap upaya

demokratisasi dalam penyelenggaraan Negara Indonesia.Dengan demikian sampai saat ini kondisi budaya politik Indonesia masih jauh dari ideal. Ini merupakan permasalahan yang harusterus diupayakan menjadi semakin baik dan terbangun secara konstruktif.

3. Membangun Gerakan Budaya Politik Indonesia

Fakta yang terlihat di dalam masyarakat Indonesia, mayoritas masyarakat Indonesia menganut budaya politik yang bersifat parokial-kaula di satu pihak dan budaya politik partisipan di pihak lain. Sikap ikatan primodalisme masih sangat mengakar dalam masyarakat Indonesia. Masih kuatnya paternalisme dalam budaya politik Indonesia menjadikan polaorientasi dan sikap politik masyarakat bersifat patronage. Halini nampak dalam pola-pola perilaku masyarakat termasuk pula dalam perilakubirokrat dan elite politik. Budaya politik masyarakat lebih didominasi parokial kauladan pada sisi lain diikat oleh primordialisme, maka hal ini cenderung tidak akan membangun demokrasi Indonesia yang konstruktif. Nilai-nilai yang dianut masyarakat telah membatasi dirinya untuk tidak bebas bergerak, termasuk dalam pengambilan keputusan di bidang politik baik pada aras pemerintahan pusat maupun di daerah. Benturan-benturannilai yang terjadi relatif tidak bisa berkolaborasi secara positif dengan etikadan prinsip-prinsip demokrasi modern. Warga masyarakat telah terpolakan dalam budaya sungkan, dan ewuh pakewuh. Politik balas jasa adalah bagian yang telah menyatu dalam diri mereka dan

membatasi diri dalam menyalurkan aspirasi politiknya. Ini menjadikan tidak berkembangnya budaya politik.

Terdapat berbagai penyebab mengapa budaya politik masyarakat tidak berkembang secara konstruktif atas sistem politik demokrasi di Indonesia, salah satunya adalah terjadinya krisis keteladanan dalam kaderisasi kepemimpinan dalam masyarakat sosial dan masyarakat politik. Krisis keteladanan menjadi salah satu penyebab muramnya wajah perpolitikan di tanah air. Buktinya adalah betapa sulitnya kita menemukan sosok pemimpin yang mampu menjadi panutan bagi setiap masyarakat. Pada setiap momen dimana proses pergantian pemimpin politik (negara) maupun daerah, melalui pemilu maupun pilkada, maka sudah dipastikan tidak ada sosok yang mampu menjadi panutan masyarakat.

Rendahnya keteladanan pemimpin bagi rakyatnya mengakibatkan timbulnya krisis kepercayaan masyarakat. Kondisi seperti ini berimbas pada hilangnya legitimasi penguasa itu sendiri. Jika dalam penyelenggaraan politik dan pemerintahan sudah tidak dimilikinya legitimasi maka sudah dipastikan akan terjadinya pola hubungan disharmonis antara masyarakat warga negara dan pemerintah atau wakil politik yang terpilih. Hanya pemerintah atau wakil lembaga politik yang memiliki komitmen dan berjiwa teladanlah yang dipastikan akan membawa pada harmonisnya penyelenggaraan pemerintahan. Untuk membangun keteladanan sebagai wujud dari gerakan budaya politik

Indonesia, maka diperlukan sikap dari para elite politik, pejabat negara dan tokoh-tokoh yang duduk pada lembaga tinggi maupun lembaga publik di tingkat daerah. Proses membangun kualitas keteladanan para pelaku politik tersebut tidak bisa berlangsung secara instan, karena harus terpolakan dan tersistematisasikan secara baik. Hal tersebut jelas memerlukan upaya serius dari berbagai komponen bangsa dan para pengambil keputusan.Upaya membangun gerakan budaya politik Indonesia bisa dilakukan melalui program pendidikan, baikjalur pendidikan formal maupunn nonformal. Sebagai alasannya bahwa pendidikan tidak dapat terpisah dari struktur kebudayaan, di mana proses pendidikan itu terjadi. Artinya penanaman nilai-nilai positif bagi masyarakat bisa dimulai dari pendidikan ini. Proses pendidikan bukan semata-mata transmisi kebudayaan dan ilmu pengetahuan, tetapi merupakan proses dekonstruksi dan rekonstruksi kebudayaan. Tentu saja nilai-nilai, norma, etika dan cara bersikap dalam berpolitik merupakan bagian yang diberikan dalam program pendidikan.

Dalam hal pendidikan politik, maka peranan partai politik sangatlah penting. Sebagai lembaga yang merepresentasikan kelompok masyaraka politik dalam ideologi maupun nilai-nilai yang dianut, harus mampu menjadikan dirinya sebagai change agent bagi perubahan orientasi dan sikap politik masyarakat kadernya menjadi semakin baik. Hal tersebut akan bisa dicapai manakala partai politik memiliki komitmen terhadap kepentingan bangsa dan negara.

Membangun gerakan budaya politik yang konstruktif, hendaknya dilaksanakan secara berkelanjutan. Karena ini terkait dengan regenerasi dan kaderisasi kepemimpinan politik negara. Tujuannya kedepan agar dalam setiap perhelatan politik, maupun proses dalam berbagai penyelenggaraan pemerintahan baik di Pusat maupun diDaerah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan aturan main dan UU yang berlaku. Masyarakat akan semakin dewasa dalam berpolitik dan tingkat konflik politik semakin berkurang, sehingga stabilitas politik negaraakan tetap terjaga dalam koridor hukum yang menjadi landasannya.

E. Budaya Politik Era Reformasi

Budaya politik yang berkembang pada era reformasi ini adalah budaya politik yanglebih berorientasi pada kekuasaan yang berkembang di kalangan elit-politik. Budaya sepertiitulah yang membuat struktur politik demokrasi tidak dapat berjalan dengan baik. Walaupunstruktur dan fungsi-fungsi sistem politik Indonesia mengalami perubahan dari era yang satuke arah selanjutnya, namun tidak pada budaya politiknya. Budaya Jawa telah mempunyai peran yang cukup besar dalam mempengaruhi budaya politik yang berkembang di Indonesia.Relasi antara pemimpin dan pengikutnya pun menciptakan pola hubungan patron-klien(bercorak patrimonial). Kekuatan orientasi individu yang berkembang untuk meraihkekuasaan, dibandingkan sebagai pelayan publik di kalangan elit merupakan salah satu pengaruh budaya politik Jawa yang kuat. Birokrasi publik masih

mempersiapkan dirinyasebagai penguasa daripada sebagai abdi yang bersedia melayani masyarakat dengan baik.

Hal ini dapat dilihat dari perilaku para pejabat dan ahli politik yang lebihmemperjuangkan kepentingan kelompoknya dibandingkan dengan kepentingan rakyat secarakeseluruhan. Dengan menguatnya budaya paternalistik, masyarakat lebih cenderung mengejarstatus dibandingkan dengan kemakmuran. Reformasi pada tahun 1998 telah memberikansumbangan bagi berkembangnya budaya politik partisipan, namun kuatnya budaya politik patrimonial dan otoriterianisme politik yang masih berkembang di kalangan elite politik dan penyelenggara pemerintahan masih senantiasa mengiringi. Walaupun rakyat mulai pedulidengan input-input politik, akan tetapi tidak diimbangi dengan para elite politik karenamereka masih memiliki mentalitas budaya politik sebelumnya. Sehingga budaya politik yang berkembang cenderung merupakan budaya politik subjek-partisipan (Roni Gosal, 2014:8).

Budaya subjek-partisipan merupakan peralihan atau perubahan dari budaya subjek(pemerintahan yang sentralistis) menuju budaya partisipan (demokratis). Cara-cara yang berlangsung dalam proses peralihan dari budaya parokial menuju budaya subjek turut berpengaruh pada proses ini. Dalam proses peralihan ini, pusat kekuasaan parokial dan lokalturut mendukung pembangunan infrastruktur demokratis (Almond dan Verba, 1984: 22).Ignas Kleden telah melakukan analisis terhadap capaian-capaian reformasi politik 1998. Iamengemukakan lima proposisi tentang perubahan politik dan budaya politik yang

berlangsung sejak reformasi 1998.

Proposisi pertama orientasi terhadap kekuasaan. Pada masa sebelum dan sesudahreformasi, orientasi ini tidak mengalami perubahan apa pun. Menurut Kleden, orientasi utamadalam real politik adalah pada usaha memperebutkan kekuasaan (*power building*) dan bukan pada efektivitas penggunaan kekuasaan (*the use of power*).

Proposisi kedua yang dikemukakan Kleden adalah politik mikro versus politik makro.Dalam hal ini, politik Indonesia sebagian besar lebih berkutat pada politik mikrodibandingkan dengan politik makro. Politik makro berkenaan dengan politik sebagai tempatterjadinya tukar-menukar kekuatan-kekuatan sosial (*ex change of social forces*), dan yang berperan besar adalah agregat-agregat politik seperti negara, masyarakat, struktur politik,sistem hukum, civil society, pasar, modal, peran militer, dan kekuatan internasional.Sementara itu, politik mikro lebih pada hubungan antara para aktor politik, khususnya yangmenyangkut persoalan sirkulasi elite politik yang kembali berhubungan dengan patronase politik, bentuk rekutmen, permainan money politics, dan kedekatan tokoh-tokoh politik. Jika politik makro berhubungan dengan bergesernya titik gravitasi politik karena adanya perubahan konfigurasi struktural, politik mikro, menurut Kleden, terbatas pada hubunganantara aktor-aktor politik, yang terba tas pada tukar-menukar kepentingan politik (*exchangeof political interest*).

Proposisi ketiga adalah menyangkut kepentingan negara vis a vis kepentingan masyarakat. Pada kenyataannya, sukar

disanggah bahwa real politik ini lebih berorientasi pada kepentingan negara (state heavy) dan belum bergeser ke arah kepentingan masyarakat(society oriented).

Proposisi keempat yang dikemukakan Kleden berkenaan dengan bebas dari kemiskinan dan kebebasan beragama. Dalam kaitan ini, ia menegaskan bahwa reformasi1998 lebih merupakan reformasi sosial-politik dan reformasi sosial budaya, dan bukan merupakan reformasi dalam bidang ekonomi. Meskipun demikian, perubahan pada bidangsosial-politik dan sosial-budaya pun masih bertumpu pada bidang ekspresi saja dan belum banyak menyangkut perubahan pada sistem dan strukturnya. Kleden mengatakan bahwa dalam budaya politik, orientasi kita masih paternalistis. Pemimpin masih diandaikan sebagai panutan, tetapi tidak dipersoalkan bagaimana membuat pemimpin menjadi panutan atausekurang-kurangnya menjadi figur yang tidak terlalu memalukan dan tidak terlalu parahdalam kinerjanya.

Proposisi kelima adalah mengenai desentralisasi politik. Dalam kaitan ini, catatan yang diberikan Kleden adalah otonomi daerah yang diberlakukan selama ini lebihmemberikan otonomi dalam konteks pemerintahan dibandingkan dengan memberikan otonomi masyarakat dalam pengertian yang sesungguhnya. Dengan kata lain, perubahan yang diakibatkan oleh implementasi otonomi bukan pada desentralisasi politik, melainkan lebih pada berpindahnya sentralisme politik dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Otonomi membuat pemerintahan daerah kuat,tetapi masyarakat tetap lemah ketika

berhadapan dengan peme rintahan lokal. Dalam kaitan ini, perlu dipertegas bahwa tujuan desentralisasi politik dalah memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada warga negara atau para wakil yang duduk di lembaga perwakilan dalam proses pembuatan keputusan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Almod, Gabrield and James S. Coleman. (1960). The Politics of Developing Area. Princeton: Princeton University Press.

Almond, Gabriel A. dan Sidney Verba. 1963.The Civic Culture.Princeton:Princeton University Press.

Almond, Gabriel. 1965. *Studi Perbandingan Sistem Politik.* Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Andrew Heywood, Politics, 2nd Edition, New York: Palgrave MacMillan, 2002, icard D. Irwin Homewood, Illinois.

Budiardjo, Miriam. (1992). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.

Budiarjo Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993

Budiarjo Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993

Buku *"DINAMIKA POLITIK KONTEMPORER;Internasional dan lokal dengan hambatan dan tantangan dalam pencapainnya*." (Halaman. 33-38; Bab.2 "Sejarah Perkembangan Politik Dunia") Penulis, Dr.Yudi Rusfiana, M.Si dan Dr.Ismail Nurdin, M.Si

Easton, David. (1984). Kerangka Kerja Analisis Sistem Politik. Jakarta: Bina Aksara.

Easton, David. (1992). Aproaches to The Study of Politics. New York: Macmillan Publishing Company.
Erlangga, 1984

Gabriel A. *Almond et.al., Comparative Politics Today*: a World View, Eight Edition,

Gaffar, Afan. 2005.*Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi.*Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Hadaad, Ismid (ed.). (1981). Kebudayaan Politik dan Keadilan Sosial. Jakarta: LP3ES.

Huntington, Samuel. 2003. *Tertib Politik pada Masyarakat yang Sedang Berubah.* Edisi Terjemahan. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Huntington, Samuel. 2003. *Tertib Politik pada Masyarakat yang Sedang Berubah.* Edisi Terjemahan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hutauruk, M. Garisbesar Ilmu Politik pelita keempat 1984-1989, Jakarta:

Hutauruk, M. Garisbesar Ilmu Politik pelita keempat 1984-1989, Jakarta: Erlangga, 1984

Imawan, Riswandha. 2000. “Reformasi Politik dan Demokratisasi Bangsa”. Dalam Selo Soemarjan. *Menuju Tata Ind*

Mas`oed, Mohtar dan Colin MacAndrews. (1991). Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Rahmat, Jalaluddin. 2000. *Komunikasi Politik Khalayak dan Efek.* Bandung: Rosda Karya.

Rauf, Maswadi dan Mappa Nasrun (eds.). (1993). Indonesia dan Komunikasi Politik. Jakarta: Gramedia.

Rauf, Maswadi. (2000). Konsensus Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis. Jakarta: Dirjen Pendidikan Tinggi Diknas.

Sjamsuddin, Nazaruddin, Toto Pribadi, dan Zulkifli Hamid. (1995). Sistem Politik Indonesia. Jakarta: Universitas Terbuka.

Varma, SP. Teori Politik Modern. Jakarta: Rajawali Pers.1992 Supardan Dadang. Pengantar Ilmu Sosial. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2008

BIOGRAFI PENULIS

Dr. H. Cecep Suryana, Drs. M.Si. Menamatkan pendidikan kesarjanaannya S1 di Fakultas ushuluddin IAIN SGD Bandung dengan mengambil spesial di Bidang Dakwah pada tahun 1991 dengan gelar Doktorandus {Drs}. Setelah mengikuti prosesi wisuda Sarjana Bulan Maret tahun 1992 berkesempatan menjadi dosen magang di almamaternya. Hingga pada tahun 1994 memperoleh kesempatan diangkat sebagai Dosen PNS. Pada tahun 2003 berhasil menyelesaikan pendidikan S2 nya dengan memperoleh gelar Magister Sains {M.Si.} dari Unpad Bandung dengan mengambil kajian Komunikasi. Merupakan pendidikan terakhirnya jenjang S3 diselesaikannya pada tahun 2016 di Uninus Bandung dengan Judul disertasi yang ditulisnya "Strategi Komunikasi Kebijakan Pendidikan" dengan mendapatkan gelar akademik sebagai Doktor bidang Manajemen Pendidikan. Kurang lebih 4 tahun belakangan ini mendapat kepercayaan dari pimpinan fakultasnya yaitu Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN SGD Bandung untuk mengampu mata kuliah di S1 yaitu, : Komunikasi Politik, Pengantar Ilmu Politik, Dasar-dasar Ilmu Komunikasi, Sistem Politik Indonesia pada Prodi Jurnalistik,Hubungan Masyarakat, Bimbingan Konseling Islam, dan Komunikasi Penyiaran Islam. Adapun pada jenjang S2 di Prodi Komunikasi Penyiaran Islam mengampu mata kuliah Komunikasi Politik. Penulis pun beberapa kali mendapatkan kesempatan menjadi narasumber pada kegiatan diskusi, seminar, workshop, perumusan dan pembuatan perda pendidikan yang diadakan Dinas Pendidikan.

Buku yang ada di hadapan pembaca ini merupakan buah dari kolaborasi terhadap penugasan pada mahasiswa Komunikasi penyiaran Islam semester enam dan mahasiswa jurnalistik semester empat tahun 2022 bekerjasama dengan dosen pengampu Mata Kuliah Sistem politik Indonesia Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Tentu saja, amat di sayangkan bila hasil dari penelitian mahasiswanya tidak sampai dibuat menjadi buku. Atas niat yang mulia

itu ditambah kebaikan dari fihak penerbit, akhirnya buku ini bisa hadir dihadapan pembaca. Sebelumnya, Buku pertama yaitu : Komunikasi Politik : Teori dan Praktik yang diterbitkan pada tahun 2019 di terbitkan oleh CV. Mimbar Pustaka Bandung, Buku ke 2 yaitu : Pesan-pesan Pelatihan Terhadap Peningkatan Partisipasi Pembangunan di Kalangan Pegawai yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh Lufti Gilang Banyumas. Buku ke 3, yaitu Komunikasi Kebijakan Pendidikan di terbitkan oleh Jakad Media Surabaya pada tahun 2021. Beberapa tulisannya pernah dimuat pada Jurnal Ilmu Dakwah, Jurnal Annida, Jurnal Communicatus, yang diterbitkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi tempat tugasnya mengabdi selama ini. Ada juga tulisannya yang telah terbit di jurnal internasional. Untuk lebih jelasnya lagi bisa dilihat pada akun Google Cendikia : Cecep Suryana. Beberapa kegiatannya sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat di posting pada akun face book dengan alamat cecep suryana majalengka dan akun instagram dengan alamat @csuryana56.

Muhammad Anasul Huda

Penulis bernama lengkap Muhammad Anasul Huda, tempat lahir Garut pada 01 Juni 2001. Ia merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan ayah bernama Hasan dan seorang ibu bernama Idah Saidah. Saat ini, ia tengah menempuh sarjana di salah satu Universitas di Kota Bandung yakni UIN Sunan Gunung Djati. Dengan mengambil program studi Ilmu Konsentrasi Jurnalistik di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Selain itu, ia juga berprofesi sebagai seorang content writer di salah satu portal media daerah di Kabupaten Garut. Buku ini merupakan salah satu karya nya bersama rekan-rekan kelompok. Dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Politik Indonesia.

Nunung Nailul Inayah

Penulis Bernama lengkap Nunung Nailul Inayah, yang akrab di sapa Nai atau Ilul, Ia lahir di Kota yang dijuluki Kota santri, iya bear sekali Kota Tasikmalaya, pada 11 Januari 2002. Ia merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, anak bungsu dari pasangan Abah Dede dan Umi Rohimah. Kini penulis tercatat sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Program Studi Ilmu Komunikasi Jurnalistik semester 4. Selain itu ia juga bersetatus sebagai mahasantri di Pondok Pesantren Al-Ihsan, ia aktif di berbagai organisasi kampus dan juga pesantren. Bergabung di salah satu media fakultas, lalu bergabung pula di organisasi keprtokolan fakultas dan aktif di kepengurusan pusat organisasi pesantren. Buku ini merupakan karya kedua ia, dan ini salah satu karya nya bersama rekan-rekan kelompok dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Politik Indonesia.

Muhammad Naufal Ramadhan

Penulis lahir di Tangerang, 7 Desember 2001. Ia adalah anak kedua dari empat bersaudara dan memiliki hobi yaitu berolahraga.Saat ini, penulis tercatat sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN) Bandung jurusan Jurnalistik. Penulis ikut bergerak untuk menyumbangkan tulisannya.Hal ini dikarenakan untuk memenuhi tugas akhir kuliah di semester 4. Bagi saya pendidikan didalam maupun diluar kuliah memang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari

Muhammad Lucky Aditirta Kurnia

Penulis bernama lengkap Muhammad Lucky Kurnia Aditirta , Tempat lahir Jakarta , 18 Februari 2002. Ia adalah anak ke tiga dari tiga bersaudara . Saat ini ia tercatat sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung (UIN Bandung) jurusan Jurnalistik . Penulis ikut bergerak untuk menyumbangkan tulisannya . Hal ini dikarenakan untuk memenuhi tugas Ulangan Akhir Semester (UAS) di semester 4. Bagi saya, ilmu yang kita punya sangat teramat mubazir jika tidak dibagikan kepada orang - orang lain

Rangga Hadiansyah

Penulis bernama lengkap Rangga Hadiansyah, tempat lahir Bandung 22 agustus 2002, ia adalah anak kedua dari tiga bersaudara. saat ini 2022 ia merupakan mahasiswa dari jurusan Ilmu Komunikasi Jurnalistik di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Selain menjadi mahasiswa, ia juga bekerja menjadi seorang penyiar dan penulis naskah di RRI Bandung. Pada kesempatan kali ini ia pertama kali menulis yang karyanya dijadikan sebuah buku. Baginya mimpi jauh lebih baik dari pada target

Raisa Azarine

Penulis ini Bernama Raissa Azarine, lahir di Bandung tanggal 16 April 2002. Anak Terakhir dari empat bersaudara. Seorang mahasiswa Ilmu Komunikasi Jurnalistik di salah satu Universitas di Bandung yaitu UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Selain berukulisah di UIN jurusan Jurnalistik, mengikuti juga himpunan jurusan yang ada di Jurnalistik, juga mengikuti beberapa program kerja yang di miliki himpunan.

Arfan Muhammad Awali

Penulis bernama lengkap Arfan Muhammad Awali, lahir di Bandung 12 Febuari 2003. Ia adalah anak pertama dari empat bersaudara. Saat ini ia adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Jurusan Jurnalistik. Ia sangat hobi menulis sedari ia menginjak bangku SMP. Penulis ikut bergerak untuk menyumbangkan tulisannya. Hal ini dikarenakan untuk memenuhi tugas Ulangan Akhir Semester (UAS) di Semester 4. Bagi saya, ilmu yang kita miliki saat ini harus terus dikembangkan dan digali untuk memajukan Bangsa dan Negara Indonesia.

Sistem Politik sebuah negara tidak bisa lepas dari kehadiran sebuah kelompok kepentingan. Hal ini berdampak pada efektivitas suatu sistem politik yang dapat diukur dari sejauh mana pemerintah dapat menanggapi, Merangkul dan memberi respon setiap tuntutan masyarakat melalui kebijakan yang tepat.

Adapun kebijakan ini merupakan suatu proses politik yang mencerminkan beragamnya aspirasi yang muncul dari berbagai macam kelompok kepentingan khususnya masyarakat. Oleh karena itu, dalam sistem Politik tidak semua aspirasi dapat disalurkan melalui kekuatan partai politik yang memiliki fungsi resmi sebagai penyalur. Akan tetapi bisa juga melalui kekuatan lain yakni kelompok kepentingan.

Dalam sistem politik, akan terungkap bagaimana peran-peran dari berbagai kelompok kepentingan khususnya di Indonesia? Bagaimana pula sejarah dari kelompok kepentingan ini bisa muncul? Apakah peran Kelompok kepentingan ini membantu masyarakat atau sebaliknya? jika keduanya saling membutuhkan, bagaimana pola interaksi yang akan terjadi antara keduanya?

Tentu dalam buku ini akan membahas secara lengkap dan tuntas mengenai aspek yang berkaitan dengan sistem politik khususnya kelompok kepentingan politik. Semoga disusun nya buku ini dapat memenuhi setiap khalayak yang membutuhkan dan berminat untuk menggali lebih dalam mengenai kelompok kepentingan dalam sebuah sistem politik. Adapun Buku ini disajikan dalam bentuk bahasa yang diusahakan sedemikian rupa agar enak dibaca dan dicerna isinya.

ISBN 978-623-88132-3-0 (PDF)
9 786238 813230